

**ANALISIS POLA REKRUTMEN DAN KADERISASI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI
PERJUANGAN) DALAM PENDEKATAN GOOD
ADMINISTRATION AND PERFORMANCES**

(Studi pada Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang)

SKRIPSI

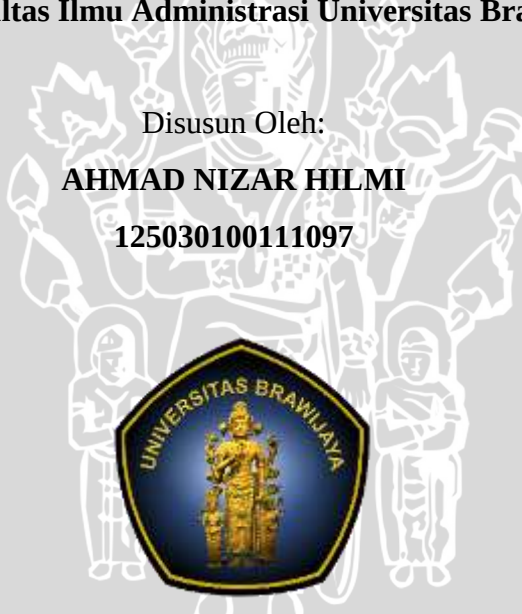
Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:

AHMAD NIZAR HILMI

125030100111097



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2016

MOTTO

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

(Albert Einstein)

“If the facts don’t fit the theory, change the facts.”

(Albert Einstein)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pendekatan
Good Administration Performance (Studi pada Kantor DPC
PDI Perjuangan Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Ahmad Nizar Hilmi

NIM : 125030100111097

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 8 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005



Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Agustus 2016
Jam : 12.00-13.00
Skripsi atas nama : Ahmad Nizar Hilmi
Judul : Analisis Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pendekatan *Good Administration and Performances* (Studi pada Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang)

Malang, 18 Agustus 2016

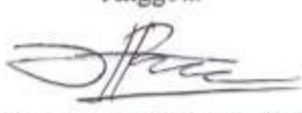
Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

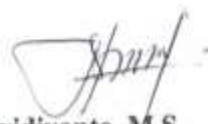
Ketua


Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005

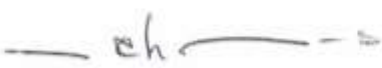
Anggota


Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

Penguji I


Dr. Siswidivanto, M.S
NIP. 19600717 198601 1 002

Penguji II


Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Analisis Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) dalam Pendekatan *Good Administration Performance*”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelas sarjana akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003), (Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Mahasiswa



Ahmad Nizar Hilmi
NIM. 125030100111097

RINGKASAN

Ahmad Nizar Hilmi, 2016, **Analisis Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pendekatan *Good Administration and Performances* (Studi pada Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang)**. Skripsi. 1) Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS 2) Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP.

Regenerasi di dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan pola rekrutmen dan kaderisasi dari PDI Perjuangan dengan studi pada kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. penelitian ini bertujuan untuk meneliti masalah etika di dalam konsep rekrutmen dan kaderisasi partai politik, yaitu di PDI Perjuangan dengan mengambil contoh pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang serta menggali pandangan-pandangan tentang pelaksanaan dan dampak selama ini.

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan pengumpulan data untuk menganalisis pola rekrutmen dan kaderisasi serta menggali pandangan tentang pelaksanaannya, kemudian akan dilakukan pendekatan teori mengenai etika di dalam administrasi, yakni *good administration and performances*. Penelitian ini dilaksanakan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Alasan dipilihnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dikarenakan pencapaian pengurus DPC selama periode 2010-2020 yang sukses menjalankan semua program politiknya termasuk rekrutmen dan kaderisasi di tingkat DPC. Bahasan ini sangat penting untuk diidentifikasi lebih mendalam guna mengetahui pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang telah berjalan secara etis. Namun terdapat kelemahan-kelemahan yang ditemukan lewat analisis yang dilakukan. Realisasi rekrutmen dan kaderisasi tidak berdampak baik pada periode berikutnya meskipun jumlah massa juga bertambah.

Kata Kunci: *Rekrutmen, Kaderisasi, PDI Perjuangan, Good Administration and Performances*

SUMMARY

Ahmad Nizar Hilmi, 2016, **Pattern Analysis Recruitment and Regeneration of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in the approach of Good Administration and Performance (Studies in the Office of the Indonesian Democratic Party of Struggle Malang District)**. Skripsi. 1) Prof. Dr. Susilo Zauhar, MS 2) Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP.

Regeneration in an organization is very important. This study aimed to describe the pattern of recruitment and regeneration of the Democratic Party of Struggle with a study on the office of the Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) Malang District. This study aimed to examine the ethical issues in recruitment and regeneration concept of political parties, namely in the Democratic Party of Struggle by taking the example of the Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) Malang District and explore views on the implementation and impact over the years.

This study uses the paradigm of post-positivism with qualitative approach and descriptive method by collecting data to analyze patterns of recruitment and regeneration and explore views on its implementation, and then will be theoretical approach on ethics in administration, namely good administration and performances. This research was conducted in the Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) Malang District. The reason for choosing the PDI-P Malang because of the branch council achievement during the period 2010-2020 were successfully run all of its political program, including recruitment and regeneration at DPC level. This discussion is very important to identify more depth in order to determine the pattern of recruitment and regeneration are carried out for later analysis.

The results showed that the pattern of recruitment and regeneration of the PDI Perjuangan Malang District has run ethically. But there are weaknesses that were identified through the analysis conducted. Realization of recruitment and regeneration does not impact either in a subsequent period even though the number of mass also increases.

Keywords: Recruitment, Regeneration, Democratic Party of Struggle, Good Administration and Performances

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Pola Rekturmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pendekatan *Good Administration and Performances*. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Orang tua tercinta, Bapak Drs. Farid Wajdi Sjaifullah yang senantiasa memberi semangat dan dukungan moral, serta Ibu Dra. Cahyowatin yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan doa tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Progam Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi dengan penuh kesabaran dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan skripsi dan motivasi lebih sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.

8. Bapak Drs. Hari Sasongko Wakabid Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang selaku informan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menanggapi setiap pertanyaan penulis di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang
9. Bapak Herman Hidayat Oktiono Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kepanjen Kabupaten Malang selaku informan yang telah dengan sangat ramah dan bersahabat telah bersedia menjadi informan bagi penelitian skripsi ini.
10. Saudara Marhaendra Pramudya Mahardika Manajer Program Indopolling Network Jakarta selaku informan pendukung yang dengan lugas memberikan dukungan informasi kepada penulis
11. Kepada saudara-saudaraku, sahabat, dan kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, intimidasi, dan lain-lain dalam membantu penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat membawa manfaat yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan karya tulis ini, penulis sampaikan terimakasih.

Malang, 10 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik dalam Administrasi Publik	
1. Pengertian Administrasi Publik	13
2. Pengertian Politik	14
3. Pemikiran Administrasi Publik dan Politik	17
B. Partai Politik	
1. Klasifikasi Partai Politik	19
2. Partai Politik dalam Demokrasi	25
3. Fungsi-Fungsi Partai Politik	27
C. Rekrutmen Politik	
1. Konsep Rekrutmen Politik	36
2. Pola Rekrutmen	37
D. Konsep Kaderisasi	
1. Pengertian Kaderisasi	41
2. Subyek dan Obyek Kaderisasi	45
3. Kaderisasi Formal dan Informal	47
E. Good Administration Performance	
1. Konsep Reformasi Administrasi	50
2. Good Administration and Performances	54

3. Good Administration and Performance dalam Partai Politik.....	57
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Fokus Penelitian.....	61
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	64
D. Sumber Data Penelitian	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Penentuan Informan	67
G. Instrumen Penelitian	72
H. Analisis Data.....	71

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Objek Penelitian

1. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	
a. Partai dan Parlemen di Era Kemerdekaan Hingga Orba	75
b. Proses Menuju Fusi Lima Partai.....	83
c. Fusi dan Perkembangan Awal PDI.....	93
d. Kemunculan Megawati Sukarnoputri	106
e. Munculnya PDI Perjuangan.....	108
2. Visi PDI Perjuangan.....	110
3. Misi PDI Perjuangan	111
4. Organisasi Sayap PDI Perjuangan	114
5. Profil Singkat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.....	115
6. Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang	116
7. Ruang Lingkup Kerja Bidang	
a. Ruang Lingkup Kerja Bidang Organisasi.....	118
b. Ruang Lingkup Kerja Bidang Kaderisasi dan Ideologi.....	119

B. Penyajian Data dan Pembahasan Fokus Penelitian

1. Konsep Pola Rekrutmen dan Kaderisasi PDI Perjuangan	
a. Dasar Pola Rekrutmen PDI Perjuangan.....	121
b. Dasar Pola Kaderisasi PDI Perjuangan	123
2. Konsep Sekolah Partai PDI Perjuangan	
a. Dasar Pendidikan Sekolah Partai.....	127
b. Model Pendidikan.....	128
c. Sasaran.....	131
d. Tata Kelola Sekolah Partai	134
3. Pola Rekrutmen dan Kaderisasi oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang	

a. Rekrutmen Administratif Anggota dan Kader di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang	135
b. Rekrutmen Akademis Anggota dan Kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang	145
c. Hubungan Good Administration and Performances dengan Pola Rekrutmen dan Kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Malang.....	155
4. Pandangan tentang Rekrutmen dan Kaderisasi PDI Perjuangan dan Isu-Isu Strategis	
a. Pandangan Konsep Pola Rekrutmen dan Kaderisasi PDI Perjuangan	165
b. Isu-Isu Strategis	172

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	185
B. Saran.....	188

DAFTAR PUSTAKA	190
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Peringkat Partai Politik berdasarkan raihan suara Pileg 2014.....	5
2.	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Malang tahun 2014.....	6
3.	Daftar Informan Penelitian.....	70
4.	Susunan DPP PDI Tahun 1973	95
5.	Data DPP PDI Hasil Kongres I tahun 1976	100
6.	Data DPP PDI Hasil Kongres II Tahun 1981.....	103
7.	Data DPP PDI Bentukan Mendagri Tahun 1986	105
8.	Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Masa Bakti 2015-2020	117
9.	Kerangka Proses Pembelajaran Kaderisasi Pratama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang	149
10.	Penerapan Konsep <i>Good Administration and Performances</i> (GAP) di dalam Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik.....	158

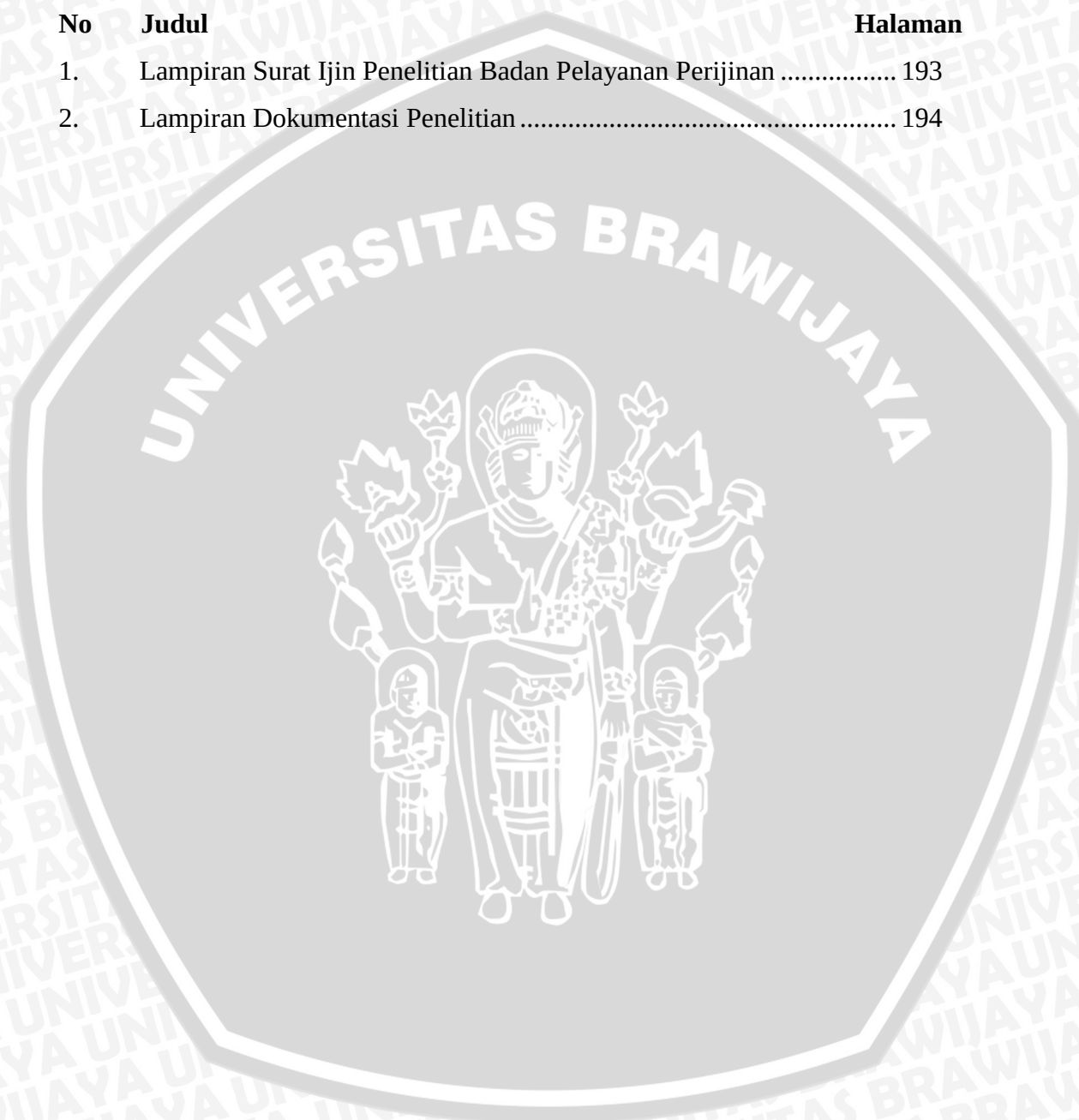
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Komponen-komponen analisa data model interaktif	72
Gambar 2 Sekolah Partai sebagai Pertemuan antara Tradisi Keilmuan dan Tradisi Kepartaian	130
Gambar 3 Mekanisme Penerimaan Anggota Baru berdasarkan AD/ART.....	138
Gambar 4 Contoh KTA PDI Perjuangan tampak depan	139
Gambar 5 Contoh KTA PDI Perjuangan tampak belakang	139
Gambar 6 Mekanisme Rekrutmen Politik PDI Perjuangan (Rekomendasi DPC untuk Caleg dan Eksekutif	148



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Lampiran Surat Ijin Penelitian Badan Pelayanan Perijinan	193
2.	Lampiran Dokumentasi Penelitian	194



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi tahun 1998, Partai Politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan-jabatan politik misalnya, hasil perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tahun 1999–2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam Pemerintahan (*eksekutif*), Perwakilan (*legislatif*), dan Peradilan (*yudikatif*) baik di tingkat Pusat maupun Daerah memiliki mekanisme melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis.

Menurut Almond yang diikuti dalam Rusadi (2004:91) partai politik yang termasuk salah satu kelompok infrastruktur politik adalah organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka pendek sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.

Adapun fungsi partai politik secara ideal menurut Almond dan Coleman (1996) adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut

serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun output pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan.

Secara optimis dapat dikatakan selama reformasi telah terjadi perbaikan yang signifikan dalam demokrasi yang lebih partisipatif. Namun tantangan pokok yang menyertainya adalah membangun demokrasi substansial yang diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan publik terkait pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan dan kemiskinan serta peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya. Hal ini senada dengan asumsi Heywood (2014 : 5) yang mengatakan bahwa politik adalah suatu bentuk seni, seni yang dimaksud adalah penyelenggaraan control di dalam masyarakat melalui penegakan keputusan bersama. Barangkali hal ini merupakan peminjaman istilah daripada makna asli politik di dalam masa Yunani Kuno.

Situasi paradoksnya adalah jika demokrasi terkesan lebih menunjukkan wajah prosedural dan kurang atau mengabaikan aspek substansialnya sehingga berpotensi memunculkan defisit demokrasi. Proses demokratisasi yang berlangsung di tengah tekanan kuat globalisasi, arus liberalisasi pasar yang jika tidak mampu dikelola dengan baik dapat berpotensi melemahkan kinerja ekonomi yang merupakan substansi pokok tujuan demokrasi itu sendiri. Sementara itu proses pemilu dan pilkada di Indonesia hampir menghabiskan biaya 50 milyar US

\$ atau sekitar 45-47 triliun rupiah. Belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat. Hal ini kemudian menimbulkan kesan biaya tinggi dan menjadi ironi ditengah ekonomi bangsa yang masih terpuruk dan belum sepenuhnya keluar dari ancaman krisis. Biaya sebesar ini memang berbanding lurus dengan kondisi wilayah Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar, namun juga dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan untuk mengefisiensikan biaya proses demokrasi prosedural tersebut.

Di era reformasi, terdapat sejumlah partai politik dan organisasi yang mempunyai hubungan ideologis dengan partai-partai di era orde lama. Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan Bung Karno, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan kaum Santri, serta partai-partai baru lainnya. Kendati diperbolehkan berdiri, pemerintahan B. J. Habibie memaparkan bahwa ideologi lama perlu diwaspadai dalam upaya memperkuat persatuan bangsa sehingga menimbulkan sanggahan dari orang yang menyatakan dirinya ideologis. Dewasa ini ideologi yang dahulu melekat pada diri partai telah berubah menjadi bentuk dari asas partai. Tetapi dengan berlakunya Pancasila sebagai asas tunggal, ideologi partai yang sebelumnya dianut tidak boleh digunakan lagi sebagai asas organisasi. Kondisi tersebut kemudian mempengaruhi pola kaderisasi dari sebuah partai politik itu sendiri dalam mencetak kader-kader yang akan mengisi pos-pos pemerintahan.

Dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu “*product*” yang menentukan daya jual partai kepada publik. Semakin baik pola rekrutmen

dalam tubuh sebuah partai, maka semakin baik pula mutu “*product*” yang dihasilkan dan ditawarkan kepada publik. Semakin baik mutu “*product*” yang diajukan, maka semakin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Sehingga kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya.

Kader dari sebuah partai politik umumnya didistribusikan ke dalam sebuah instansi pemerintahan sebagai upaya pembangunan negara. Suatu keniscayaan bahwa kader yang didistribusikan merupakan seorang pejabat politik yang bekerja didalam konteks administrasi negara atau administrasi publik. Agar tercipta seorang pejabat publik atau administrator yang memiliki etika dan integritas tinggi, maka perlu diberikan sebuah stimulan berupa pendidikan ideologi. Harus ada sebuah pendidikan dari sebuah partai politik yang mampu menjawab kebutuhan daripada seorang pemimpin dalam rangka meningkatkan etika dalam kepemimpinannya,

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah salah satu diantara banyak partai nasional yang mampu mengembangkan sayapnya di era reformasi. Dewasa ini, PDI Perjuangan telah menjadi partai pemenang di dalam pemilu legislatif dengan memperoleh suara terbanyak untuk porsi kursi legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah, kondisi yang membuat PDI Perjuangan menjadi partai yang cukup dominan di dalam pengawalan kebijakan di setiap daerah. Untuk kursi eksekutif, PDI Perjuangan pun meraih kemenangan

dengan mencalonkan Joko Widodo sebagai calon Presiden, dengan Jusuf Kalla sebagai pendamping yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di dukung pula dengan beberapa partai nasional seperti Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dengan kemenangan suara di kursi legislatif dan eksekutif, PDIP kemudian menjadi partai dengan dominasi tinggi di kancah nasional maupun daerah di Indonesia.

PDIP Perjuangan sendiri pada pemilu legislatif tahun 2014 telah menorehkan catatan baik dengan meraih suara terbanyak di seluruh Indonesia, yakni 23.681.471 suara. Sebagaimana dikutip dalam www.tribunnews.com, sebagai berikut:

Tabel 1.

Peringkat Partai Politik berdasarkan raihan suara Pileg 2014

Peringkat	Nama	Perolehan	
1	PDIP Perjuangan	23.681.471	18,95 %
2	Partai Golkar	18.432.312	14,75 %
3	Partai Gerindra	12.760.371	11,81 %
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,19 %
5	PKB	11.298.957	9,04 %
6	PAN	9.481.621	7,59 %
7	PKS	8.480.204	6,79 %
8	Partai Nasdem	8.402.812	6,72 %
9	PPP	8.157.488	6,53%
10	Partai Hanura	6.579.098	5,26%

Sumber data : www.tribunnews.com

Sementara itu, salah satu wilayah yakni di Kabupaten Malang PDIP Perjuangan mendulang suara 23,91 persen dari perolehan total, terbanyak dalam

pemilu legislatif di Kabupaten Malang. Dengan perolehan suara tersebut, PDI Perjuangan berhak mendistribusikan kader-kadernya sebagai anggota legislatif di Kabupaten Malang. Sebagaimana di dalam laporan rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu legislatif milik KPU Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.
Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Malang tahun 2014

Peringkat	Nama	Perolehan	
1	PDI Perjuangan	302.764	23,91 %
2	Partai Golkar	267.696	21,14 %
3	PKB	189.715	14,98 %
4	Partai Gerindra	135.853	10,73 %
5	Partai Demokrat	81.788	6,46 %
6	Partai Nasdem	77.485	6,12 %
7	PKS	57.374	4,53 %
8	Partai Hanura	52.414	4,14 %
9	PPP	44.908	3,55%
10	PAN	42.484	3,36%
11	PBB	8.238	0,65%
12	PKPI	5.484	0,43%
Total		1.266.203	

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Dewasa ini, partai politik juga dihadapkan pada persoalan menyangkut kaderisasi. Salah satu persoalan lama yang timbul adalah politisi-politisi yang sering berpindah-pindah partai atau disebut sebagai politisi “kutu loncat”. Fenomena tersebut menunjukkan masih lemahnya proses kaderisasi partai politik. Lemahnya kaderisasi merupakan persoalan yang berhubungan dengan pola rekrutmen Parpol itu sendiri. Kaderisasi merupakan proses daripada penanaman mental dan asas perjuangan (ideologi) partai kepada kader-kader yang dilatih

menjadi calon-calon pemimpin yang baik. Dalam fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik melakukan proses perekrutan hanya pada saat mendekati pemilihan saja. Umumnya modek rekrutmen yang dilakukan tidak berdasarkan *merit system* melainkan berdasarkan pada lamaran-lamaran *public figure*, tokoh-tokoh non-partai, dan lain lain. Dampak yang cukup besar dirasakan adalah munculnya kader-kader instan yang tidak kompeten dalam menjalankan kinerja sebagai politisi ketika menduduki jabatan-jabatan publik. hal tersebut disebabkan karena para politisi “kutu loncat” masih dinilai belum menerima proses kaderisasi yang menanamkan pemahaman khusus mengenai asas perjuangan Parpol yang mengusungnya.

Ditinjau dalam aspek yuridis, rekrutmen dan kaderisasi sejatinya telah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 11 ayat (1) poin a, “bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Pasal tersebut menekankan bahwa peran partai politik bukan hanya alat mencapai kekuasaan dan menjembatani suara masyarakat terhadap pemerintah saja, tetapi juga perlu mendidik dalam rangka meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik.

Tujuan dilakukan rekrutmen dan kaderisasi salah satunya adalah untuk mempermudah partai politik dalam menyusun kekuatan dalam mempengaruhi sistem pemerintahan dengan membina kinerja kader dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai kader maupun pejabat politik. Di samping itu, rekrutmen dan

kaderisasi juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas internal daripada partai politik itu sendiri. Dengan dilaksanakannya rekrutmen dan kaderisasi memungkinkan partai politik mengimplementasikan setiap program-program partai dengan sumber daya yang mumpuni.

Partai politik sebagai ruang berdinamika memungkinkan terjadinya suatu konflik dan persaingan dari sesama kader, bahkan dengan kader dari partai lainnya. Mekanisme yang dibuat Parpol dalam memilih kandidat pejabat publik yang umumnya mengedepankan penilaian modal individu kadang membuat kader-kader lama merasa tersisih dengan kedatangan orang baru yang terkadang tanpa melalui mekanisme kaderisasi namun dinilai kuat secara *marketing politics*. Tetapi, pada dasarnya dengan rekrutmen dan kaderisasi harapannya konflik dan persaingan tidak akan merusak nilai-nilai perjuangan partai yang bertugas dalam membangun sebuah tata kelola negara. Pola rekrutmen dan kaderisasi yang baik diperlukan dalam mendukung terciptanya kader yang berkualitas yang dapat mengisi pos pejabat politik atau birokrasi dengan profesional, serta menciptakan pola administrasi yang etis.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap lebih jauh terkait aspek-aspek yang ada di dalam rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan dengan melakukan pendekatan teori tentang etika administrasi yaitu *Good Administration Performance*. Peneliti ingin mengungkap lebih bahwa dalam konsep pendidikan kader partai tidak terbatas pada teori-teori yang baku. Selain meneliti langsung pada objek yang bersangkutan, peneliti juga mencari data terkait strategi yang dilakukan partai untuk menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi secara etis.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) dalam Pendekatan *Good Administration Performance***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkuman permasalahan yang ada didalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep pola rekrutmen dan kaderisasi yang diterapkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dalam Pendekatan *Good Administration and Performances*?
2. Bagaimana pandangan kader dalam menjalani pola rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan konsep pola rekrutmen dan kaderisasi yang diterapkan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Malang dalam pendekatan *Good Administration and Performances*.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pandangan kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang didukung pandangan-pandangan di sekitar dalam menjalani pola rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dapat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca penelitian ini, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik dalam mengelola sumber daya manusia dan tentang landasan etis partai politik.
 - b. Sebagai tambahan referensi dan wawasan bagi penelitian berikutnya yang akan mendalami dan mengembangkan penelitian berkaitan dengan tema ini.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi partai politik, khususnya DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Malang di bidang rekrutmen dan kaderisasi berkaitan dengan upaya tata kelola sumber daya manusia di dalam partai politik dan menegakkan etika partai politik.
 - b. Sumbangsih pemikiran bagi perkembangan pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik di daerah, khususnya Kabupaten Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam

Pendekatan *Good Administration and Performances*”. Peneliti membagi kerangka pemikirannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini secara garis besar menggambarkan hal-hal yang berkaitan dan mengarahkan kepada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh peneliti, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan analisis-analisis, perspektif, serta interpretasi teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi sebagai dasar dan landasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi konsep politik, proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik, dalam pendekatan konsep *good administration and performances*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang penyajian data dari hasil penelitian dan analisa serta pembahasan tentang pola rekrutmen dan

kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), prosedur rekrutmen dan kaderisasi, selain itu tentang teori etika tersebut. Serta pola rekrutmen dan kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Malang dalam pendekatan *good administration and performances*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, disertai dengan rekomendasi dari kesimpulan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik dalam Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik adalah suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang dinamis. Caiden yang dikutip dalam Thoha (2014 : 40) menandakan bahwa, disiplin administrasi publik ini pada hakikatnya merupakan suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*). Hal ini menegaskan definisi dari administrasi publik pada hakikatnya adalah suatu tata kelola pemerintahan yang menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang, di mana, jika jawabannya tidak sepadan dengan tuntutan, maka akan membawa ketidakpuasan masyarakat.

Di Indonesia, selama ini istilah administrasi publik selalu dibahasakan ke dalam sebutan administrasi negara. Administrasi negara menurut Thoha (2014 : 42) dikenal bersamaan dengan pendekatan yang digunakan dalam mengelola negara yang menekankan pada orientasi kekuasaan negara. Ini menegaskan bahwa orientasi kekuasaan yang terpusat kepada negara membuat segala upaya penyelenggaraan administrasi pemerintahan bercorak negara, artinya publik kemudian ditekankan pada pengejawantahan negara. Oleh karena itu, dalam asumsinya, Thoha (2014 : 42) lebih mengasumsikan corak sarwa negara lebih menonjol daripada corak sarwa masyarakat atau rakyat.

Sebagaimana dirumuskan bahwa administrasi publik merupakan suatu kajian sistematis yang memuat perencanaan realitas dari segala upaya dalam menata pemerintahan menjadi tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*good governance*). Administrasi publik meliputi proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

2. Definisi Politik

Politik ada karena adanya perselisihan pendapat. Secara luas, politik adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kanselir Bismarck mengatakan di hadapan Parlemen Jerman bahwa “Politik bukan sains ... tetapi sebuah seni”. Pendapat Bismarck tersebut diperjelas oleh Andrew Heywood dalam bukunya yang berjudul *Politik*. Ia mengemukakan bahwa:

“Seni yang dimaksud oleh Bismarck adalah seni pemerintahan, yaitu penyelenggaraan kontrol di dalam masyarakat melalui pembuatan dan penegakan keputusan bersama. Ini barangkali adalah definisi klasik dari politik, yang dikembangkan dari makna asli dari istilah tersebut di masa Yunani Kuno” (Heywood, 2014:5)

Kata politik berasal dari kata *polis*, yang berarti secara harfiah adalah negara-kota atau kota-praja. Masyarakat Yunani Kuno terbagi menjadi negara-negara kota yang independen, masing-masing memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Yang paling besar dan berpengaruh di antara negara-negara kota ini adalah Athena, seringkali digambarkan sebagai tempat lahirnya pemerintahan demokrasi. Dalam konteks ini, politik dapat dipahami menunjuk pada urusan dari *polis* tersebut, yaitu apa yang menyangkut *polis*. Bentuk modern dari definisi ini

adalah ‘apa yang menyangkut negara’. Pandangan tentang politik semacam ini jelas terlihat dalam penggunaan sehari-hari dari istilah tersebut: orang dikatakan berkecimpung dalam politik ketika memegang jabatan publik, atau memasuki dunia politik ketika berusaha untuk melakukannya. Ini juga merupakan salah satu definisi yang berusaha dipertahankan oleh ilmu politik akademis.

Sebuah konsepsi yang lebih luas tentang politik membawa politik itu sendiri keluar dari lingkup sempit pemerintahan menuju apa yang dipahami sebagai ‘kehidupan politik’ atau ‘urusan publik’. Dengan kata lain, perbedaan antara politis dan non-politis bersesuaian dengan pembagian antara lingkup kehidupan politik dan apa yang dianggap sebagai lingkup kehidupan privat atau pribadi. Pandangan ini sering dianggap berasal dari karya filsuf Yunani Aristoteles. Dalam *Politics*, Aristoteles menyatakan bahwa ‘manusia pada dasarnya adalah hewan yang berpolitik’, maksudnya, hanyalah di dalam sebuah masyarakat yang berpolitik umat manusia dapat menjalani kehidupan yang baik. Sudut pandang ini menjelaskan bahwa politik berarti sebuah aktivitas etis yang berkenaan dengan usaha menciptakan sebuah masyarakat adil, inilai yang oleh Aristoteles disebut sebagai ilmu pengetahuan pokok.

Secara konsep, politik lebih didefinisikan paling luas sekaligus paling radikal. Politik dipandang berlangsung di semua aktivitas sosial dan di setiap sudut dari ekstensi manusia. Leftwich yang dikutip dalam Heywood (2014:14), “politik adalah jantung dari semua aktivitas sosial kolektif, formal maupun informal, publik maupun privat, di semua kelompok, lembaga dan masyarakat manusia”. Dalam pengertian ini, politik berlangsung di setiap level interaksi

sosial. Dalam wujudnya, politik berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber daya dalam kehidupan sosial. Dalam pengertian yang lebih populer, politik lebih banyak dimengerti dengan merujuk kepada Lasswell (1936) dalam bukunya *Politics: Who Gets What, When, How?* Di mana politik pada dasarnya adalah kekuasaan yang meliputi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, apa pun caranya. Dalam perspektif ini, politik adalah tentang keragaman dan konflik, tetapi intinya adalah adanya kelangkaan, fakta sederhana bahwa, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sumber daya yang tersedia untuk memuaskannya selalu terbatas. Karenanya, politik dapat dipahami sebagai perjuangan untuk memperoleh sumber daya yang langka, dan kekuasaan dapat dipahami sebagai sarana melalui di mana perjuangan tersebut dilaksanakan.

Definisi politik dapat kemudian disimpulkan sebagai aktivitas di mana masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan-aturan umum yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, secara esensial adalah sebuah aktivitas sosial yang terkait, di satu sisi dengan keragaman dan konflik, di sisi lain dengan keinginan untuk bekerja sama. Politik lebih baik dipahami sebagai usaha pencarian pemecahan konflik daripada sebagai pencapaiannya, karena tidak semua konflik dapat dipecahkan.

3. Pemikiran Administrasi Publik dan Politik

Keterikatan administrasi publik dengan politik menurut Goodnow yang dikutip dalam Thoha (2014 : 77), bahwa ada dua fungsi pokok dari pemerintahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan politik dan fungsi yang berhubungan dengan

administrasi. Politik menurut Goodnow harus melakukan upaya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau melahirkan keinginan-keinginan negara. Sementara administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Pemahaman ini menekankan ada lokus keberadaan administrasi publik. Secara jelas Goodnow menempatkan administrasi publik berada pada birokrasi pemerintah.

Dengan demikian, peran ilmu administrasi publik dengan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dan sekaligus berusaha untuk menganalisis dan memberikan warna agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tetap bersumber pada kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. Pada akhirnya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah akan selalu berdampak kepada masyarakat. Tetapi, suatu kebijakan juga ditentukan oleh letak kematangan seorang pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah pejabat publik yang diangkat melalui mekanisme politik. Seorang pembuat kebijakan membutuhkan kematangan cara berpikir dan disiplin doktrin tentang pembangunan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam perjalanannya, seorang pejabat publik yang berasal dari partai politik harus memiliki kompetensi secara individual.

Kebutuhan akan perubahan dan adaptasi suatu aparatur dalam organisasi sangatlah mendesak, walaupun masalah yang dihadapi terlalu kompleks dan rumit. Reformasi administrasi telah banyak memberikan sebuah pengaruh terhadap proses berkembangnya paradigma administrasi di Indonesia. Reformasi administrasi menurut Zauhar (2012 : 4) merupakan bagian yang sangat penting

dalam pembangunan di negara-negara sedang berkembang, terlepas dari tingkat perkembangan atau kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya.

Istilah reformasi administrasi mengandung banyak makna, fungsi yang beragam, menimbulkan banyak harapan, tetapi juga menambah porsi konflik yang tak kunjung usai di kalangan praktisi, pemerhati, masyarakat dan kaum teoretisi. Menurut Caiden yang dikutip dalam Zauhar (2012 : 5) menyatakan definisi reformasi administrasi adalah:

“Istilah ini dipakai untuk menunjuk berbagai macam kegiatan seperti: kegiatan penyempurnaan administrasi, ... pemeriksaan administratif, ... pengobatan terhadap segala macam ketidak beresan administrasi, ... sarana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, dan gaya diri seorang pembaru administrasi”

Dewasa ini istilah reformasi administrasi digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang sebenarnya jauh melampaui makna yang dikandungnya. Sebagai implikasinya maka setiap reformasi terhadap aparatur administrasi baik pada aras lokal maupun aras nasional, dipandang sebagai perubahan terencana. Reformasi bermaksud untuk membawa langkah perubahan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Manajemen pemerintahan tidak membicarakan aspek yang terlalu sempit dalam bingkai birokrasi yang dianggap netral, tetapi dapat pula melakukan reformasi pada tingkat yang paling awal dalam proses penempatan dan pembinaan kepada seorang calon pejabat publik atau kepala daerah.

B. Partai Politik

1. Klasifikasi Partai Politik

Partai-partai politik terdapat di sebagian besar negara dan di sebagian besar sistem politik. Partai-partai dapat bersifat otoriter atau demokratis, partai politik mungkin meraih kekuasaan melalui pemilihan atau melalui revolusi, dan partai politik mungkin mengusung ideologi-ideologi aliran kiri, kanan atau tengah, atau, bahkan, mengingkari ide-ide politik sama sekali. Beragam klasifikasi telah digunakan untuk menggolongkan partai-partai politik. Heywood (2014 : 392) memaparkan yang paling penting daripada klasifikasi partai politik adalah sebagai berikut:

1. Partai-partai kader dan massa
2. Partai-partai representatif dan integratif
3. Partai-partai konstitusional dan revolusioner
4. Partai-partai sayap-kiri dan sayap-kanan

Pembedaan yang paling umum menurut Heywood adalah pembedaan antara partai kader dan partai massa. Istilah partai kader berasal dari makna sebuah partai dari orang-orang penting, didominasi oleh sebuah kelompok informal dari para pemimpin yang melihat titik kecil dalam membangun sebuah organisasi massa. Partai-partai kader tidak terelakkan berkembang di luar faksi-faksi atau klik-klik parlementer pada masa ketika hak pilih dibatasi. Akan tetapi, istilah kader dewasa ini lebih umum digunakan untuk menunjuk para anggota partai yang terlatih dan profesional yang diharapkan mampu memperlihatkan sebuah tingkat komitmen tinggi dan disiplin doktrin yang tinggi. Dalam

pengertian ini, Partai Komunis Uni Soviet (CPSU), Partai Nazi di Jerman, Partai Fasis di Italia adalah contoh daripada partai-partai kader, begitu pula Partai Komunis China (CCP) dan Partai Kongres Indoa pada periode modern. Ciri pembeda dari partai-partai kader adalah penyandaran pada sebuah elit aktif politik yang tunduk pada disiplin quasi-militer yang mampu memperlihatkan atau menawarkan kepemimpinan ideologis pada masyarakat. meskipun kriteria politik yang ketat ditetapkan bagi keanggotaan partai, karierisme dan kenyamanan hidup sering kali menjadi motif yang kuat untuk bergabung dengan partai-partai dalam spektrum kader, sebagaimana terlihat pada CPSU dan NAZI.

Partai massa, di sisi lain menekankan pada keanggotaan yang luas dan pengembangan basis pemilih yang luas. Meskipun perluasan hak pilih telah mendorong partai-partai liberal dan konservatif untuk meraih simpati massa, contoh paling awal dari partai-partai massa adalah partai-partai sosialis Eropa, misalnya Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) dan Partai Buruh Inggris, yang membangun organisasi-organisasi yang khusus dirancang untuk menggalang dukungan dari kelas pekerja. Ciri utama dari partai-partai semacam ini adalah penekanan besar terhadap rekrutmen dan organisasi daripada pemahaman ideologi dan politik. Meskipun partai-partai tersebut sering kali memiliki organisasi-organisasi yang secara formal demokratis, kecuali bagi sebagian kecil aktivis, keanggotaannya umumnya tidak mengharuskan adanya partisipasi tetapi hanya berupa kesepakatan umum tentang prinsip dan tujuan.

Kirchheimer (1966) dalam Heywood (2014 : 393) memberikan sebuah pendapat kepada partai modern dengan memberikan istilah ‘partai tangkap-

semua'. Maksud daripada Kirchheimer adalah partai-partai secara drastis mengurangi muatan ideologis dalam rangka meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih. Kirchheimer memberi gambaran umum pada partai Persatuan Demokrasi Kristen (CDU) di Jerman, tetapi contoh terbaik dari partai tangkap-semua terdapat di Amerika Serikat dalam bentuk Partai Republik dan Partai Demokrat. Adapun partai-partai sosialis deideologis modern seperti misalnya Partai Sosial Demokrat Jerman dan Partai Buruh di Inggris yang lebih cocok dengan istilah Kirchheimer. Partai-partai tersebut berbeda dari model partai massa klasik di mana penekanan ada pada kepemimpinan dan persatuan, dan mengurangi peran dari anggota-anggota partai individual dalam usaha membangun koalisi-koalisi dukungan yang luas daripada bersandar pada sebuah kelas sosial atau kelompok tertentu.

Pembedaan kedua, partai representatif dan integratif dikemukakan oleh Neumann (1956) di dalam Heywood (2014 : 394), adalah apa yang disebut partai-partai representasi dan partai-partai integrasi. Partai representatif memandang fungsi utama adalah untuk menjamin suara-suara dalam pemilihan, karenanya partai representatif berusaha untuk merefleksikan daripada membentuk opini publik. Dalam hal tersebut, partai representatif mengadopsi strategi tangkap-semua dan menempatkan pragmatisme di depan prinsip dan riset pasar di depan mobilisasi masyarakat. penyebaran partai-partai semacam ini dalam politik modern memberikan dorongan yang kuat pada argumen-argumen yang didasarkan pada model-model perilaku politik pilihan rasional, seperti misalnya dari Schumpeter dalam Downs (1957), yang menggambarkan para politisi sebagai

mahluk-mahluk pencari kekuasaan yang akan menggunakan kebijakan apa pun yang berpeluang untuk mendukung keberhasilan mereka.

Partai-partai integrasi, justru kontras dengan representatif. Partai integratif mengadopsi strategi-stretegi politik yang proaktif daripada reaktif, partai-partai ini ingin memobilisasi, mendidik dan menginspirasi masyarakat, daripada sekedar merespons tuntutan-tuntutan. Meskipun Neuman melihat partai mobilisasi yang khas sebagai sebuah partai kader yang disiplin secara ideologis, parta-partai massa mungkin juga memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan mobilisasi. Sebagai contoh, sebelum partai-partai sosialis dimundurkan oleh kegagalan dalam pemilihan, partai-partai tersebut berusaha membawa para pemilih pada sebuah keyakinan terhadap manfaat-manfaat dari kepemilikan publik, pemberantasan pengangguran, redistribusi, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Pendekatan ini juga diadopsi oleh partai konservatif Inggris di bawah Margaret Thatcher pada 1980-an. Meninggalkan kebencian tradisional partai terhadap prinsip ideologi dan abstrak, Thatcher menganut politik kepastian dalam menjalankan sebuah strategi mobilisasi yang dilandaskan pada dukungan yang kuat bagi pemangkasan pajak, mendorong dunia usaha, mendorong tanggung jawab individual, menjatuhkan kekuatan serikat buruh dan seterusnya.

Pembedaan ketiga, penggolongan partai konstitusional dan partai revolusioner. Partai konstitusional mengakui hak-hak dari partai-partai lain dan, karenanya berjalan di dalam sebuah kerangka aturan-aturan dan batasan-batasan. Terutama, partai konstitusional mengakui bahwa terdapat sebuah pembagian antara partai dan negara, antara partai yang berkuasa dan lembaga-lembaga negara

(birokrasi, kehakiman, kepolisian dan sebagainya) yang memiliki independensi formal dan netralitas politik. Yang paling penting, partai-partai konstitusional mengakui dan menghargai aturan-aturan kompetisi pemilihan. Partai konstitusional mengakui bahwa partai dapat menang dan dapat juga kalah. Partai-partai aliran utama di demokrasi liberal semuanya memiliki sebuah karakter konstitusional semacam ini.

Sedangkan partai-partai revolusioner, di sisi lain, merupakan partai-partai yang anti-sistem atau anti-konstitusional, baik yang beraliran kiri maupun beraliran kanan. Partai-partai semacam itu bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menyingkirkan struktur konstitusional yang ada dengan menggunakan taktik-taktik yang beragam mulai dari pemberontakan dan revolusi rakyat hingga quasi-legalisme yang dipraktikkan oleh partai Nazi dan Fasis. Partai-partai revolusioner secara formal dilarang karena digolongkan sebagai partai ekstremis atau anti-demokrasi, sebagaimana terjadi di Jerman pasca Perang Dunia II. Ketika partai-partai semacam itu memenangkan kekuasaan, hampir tidak terelakkan menjadi partai-partai berkuasa atau rezim, menekan dan menindas partai-partai pesaing dan membentuk sebuah hubungan permanen dengan mesin negara. Pada sistem-sistem satu partai, perbedaan dan pembagian antara partai dan negara begitu lemah, sehingga partai lebih dominan dalam berkuasa. Realitanya partai justru telah menggantikan pemerintahan, menciptakan sebuah perangkat partai-partai gabungan. Adalah sebuah kelaziman di Uni Soviet, misalnya, Sekretaris Jenderal dari CPSU bertindak sebagai pemimpin eksekutif atau kepala pemerintahan tanpa harus memegang jabatan formal dalam negara.

Pembedaan keempat, penggolongan partai berdasarkan orientasi ideologis, khususnya antara partai-partai yang dilabeli sayap-kiri dan partai-partai yang dilabeli sayap-kanan. Partai-partai sayap kiri (partai-partai progresif, sosialis, komunis) dicirikan oleh sebuah komitmen untuk melakukan perubahan, baik dalam bentuk reformasi sosial atau reformasi ekonomi secara menyeluruh. Partai-partai sayap kiri secara tradisional mengambil dukungan dari kalangan miskin dan kurang beruntung (masyarakat-masyarakat urban, kelas-kelas pekerja). Sedangkan partai-partai sayap kanan (terutama partai konservatif dan fasis) umumnya menegakkan tatanan sosial yang telah ada, dalam pengertian ini, adalah sebuah kekuatan bagi kontinuitas. Para pendukung partai-partai sayap kanan biasanya termasuk dunia usaha dan bisnis dan kelas-kelas menengah yang mapan secara materi. Akan tetapi, pengertian yang kaku dari pembagian antara partai sayap kanan dan sayap kiri ini terlalu sederhana dan sangat menyesatkan. Bukan hanya bahwa baik partai sayap kiri maupun sayap kanan sering kali terbagi menjadi aliran-aliran reformis/revolusioner dan konstitusional/insureksioner, tetapi bahwa semua partai, khususnya partai konstitusional, cenderung menjadi ‘gereja yang meluas’, dalam pengertian bahwa partai tersebut melampaui partai-partai sayap kiri atau kanan itu sendiri. Lebih lanjut, kompetisi pemilihan telah berdampak mengaburkan identitas-identitas ideologis, prinsip-prinsip umumnya disingkirkan dalam rangka untuk mengejar suara pemilih. Definisi tentang kiri dan kanan juga terus berubah sepanjang waktu, dan sering kali berbeda dari satu sistem politik ke sistem politik yang lain. Terakhir, asumsi dari Giddens (1994) mengatakan bahwa pergeseran menjauh dari polaritas-polaritas kelas lama dan kemunculan isu-isu

politik baru seperti misalnya tentang lingkungan, hak-hak binatang dan feminisme barangkali telah membuat ide-ide konvensional tentang kiri dan kanan menjadi kurang relevan.

2. Partai Politik dalam Demokrasi

Kehadiran partai politik di negara yang menganut sistem politik demokrasi seperti Indonesia merupakan suatu keharusan. Mutlak karena partai politik merupakan institusi politik demokrasi dengan mana bahwa organisasi politik ini dapat menjadi milik semua golongan yang ada dalam masyarakat. Partai politik menurut Neumann yang dikutip dalam Budiarmo (2006:17) adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Pengertian ini sejalan pandangan Giovanni Sartori yang dikutip dari jurnal milik Mainwaring (2007), *“Political Sequences and the Stabilization of Inter Party Competition: Electoral Volatility in Old and new Democracies”*, yang melihat partai politik sebagai sebuah sistem politik yang di dalamnya terdapat struktur kewenangan, proses perwakilan, sistem pemilihan, proses rekrutmen kepemimpinan, memiliki tujuan dan mengatasi konflik internal. Partai politik selalu dituntut memiliki kemampuan dalam menjalankan perwakilan, mempengaruhi pergantian kepemimpinan politik baik nasional maupun lokal secara teratur dan damai, menyediakan akses informasi bagi keanekaragaman kepentingan, membangun kompromi dan meminimalkan konflik, serta

kemampuan menyadarkan masyarakat akan arti penting politik termasuk hak dan tanggung jawabnya.

Kemampuan tersebut akan bergerak secara terpaksa, kontinu, dan dinamis setelah dipicu oleh sistem kompetisi. Hal ini diakui oleh Ware (2007 : 97) setelah menyimpulkan efek-efek dari kompetisi antarpantai khususnya, dalam model-model pemilihan yang telah mendorong partai-partai ke dalam jenis-jenis organisasi yang lebih khusus. Dalam model kompetisi pemilihan, misalnya, Ware menegaskan alur kompetisi pemilihan yang mengendalikan partai-partai untuk memodifikasi organisasi mereka sehingga membuat partai mereka sekompetitif mungkin merupakan faktor mendasar yang menentukan masa depan organisasi partai dalam sebuah demokrasi.

Kompetisi antarpantai membuat partai politik perlu merumuskan strategi, bentuk, saluran, dan tujuan komunikasi politiknya untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan masyarakat. Dalam kaitan tersebut, Downs yang dikutip oleh Firmanzah (2007 : 129) mengibaratkan partai politik sama dengan wiraswasta yang memburu laba, partai politik lalu berlomba-lomba menyesuaikan produk dengan selera pasar dan merumuskan taktik dan strategi pemasaran mereka yang dapat memberi keuntungan berupa dukungan politik. Hanya saja, ada kendala yaitu birokrasi merupakan hal yang tidak terelakkan dari azas organisasi, sehingga setiap organisasi yang telah mencapai tingkat kerumitan menuntut adanya sejumlah orang yang harus mengabdikan semua aktivitasnya kepada tugas partai.

3. Fungsi-Fungsi Partai Politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Budiardjo (2006 : 163-164), meliputi: (a) sarana komunikasi politik, (b) sarana sosialisasi politik (*political socialization*), (c) sarana rekrutmen politik (*political recruitmen*), dan (d) pengatur konflik (*conflict management*).

Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*political interests*) yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. berbadai kepentingan itu diseran sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide, visi, dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau menjadi materi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik disosialisasikan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dalam sosialisasi itu partai juga berperan sangat penting dalam pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap dan dilakukan oleh bermacam-macam agen, seperti keluarga,

saudara, teman bermain, sekolah, lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa.

Ketiga, sarana rekrutmen politik. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat. rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memiliki kader-kader yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk menyejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara.

Keempat, sarana pengatur konflik. Fungsi ini berupa sarana agregasi kepentingan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan partai politik. Di dalam buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Meny dan Knapp yang dikutip dalam Asshiddiqie (2009 : 4) mengatakan fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beradam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan. Jika jumlah partai politik memadai, berbagai kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Pendapat lain dikatakan oleh Heywood (2014 : 399), bahwa Partai politik didefinisikan oleh sebuah fungsi sentral (mengisi jabatan politik dan memegang kekuasaan pemerintah), dampak pada sistem politik lebih luas dan lebih kompleks. Jelas berbahaya jika mendefinisikan secara sederhana fungsi-fungsi

dari partai. Partai-partai konstitusional yang berjalan dalam sebuah konteks kompetisi pemilihan cenderung digambarkan sebagai benteng demokrasi dan adanya partai-partai semacam ini sering dipandang sebagai salah satu tanda sebuah sistem demokrasi yang sehat. Di sisi lain, partai-partai rezim yang menikmati sebuah monopoli dalam kekuasaan politik umumnya digambarkan sebagai perangkat-perangkat manipulasi dan kontrol politik. Lebih lanjut, kontroversi di seputar dampak luas daripada partai politik. Sebagai contoh, Thomas Jefferson dan para ‘bapak pendiri’ yang lain dari konstitusi AS dan di masa modern, para pendukung dari apa yang disebut ‘partai-partai anti-partai’ yang menggambarkan partai-partai dalam sudut pandang yang sangat negatif, memandang partai politik sebagai salah satu sumber perselisihan dan perpecahan politik. Sejumlah fungsi umum dari partai dapat diidentifikasi. Fungsi-fungsi yang utama menurut Heywood (2014 : 398-407) adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan
2. Pembentukan dan rekrutmen elite
3. Perumusan tujuan
4. Artikulasi dan agregasi kepentingan
5. Sosialisasi dan mobilisasi
6. Pengorganisasian pemerintahan

a. Perwakilan

Perwakilan dipandang sebagai fungsi utama dari partai-partai politik. Hal ini menunjuk pada kemampuan dari partai-partai untuk merespons dan mengartikulasikan pandangan dari para anggota maupun dari para pemilih. Dalam

bahasa teori sistem, partai-partai politik merupakan alat-alat input utama yang menjamin bahwa pemerintahan memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat luas. Jelasnya, ini adalah sebuah fungsi yang paling baik dilaksanakan, sebagian akan mengatakan hanya dapat dilaksanakan dalam sebuah sistem yang terbuka dan kompetitif yang mendorong partai-partai untuk merespons pilihan-pilihan masyarakat. Downs (1957) dikutip dalam Heywood (2014 : 400), seorang teoritikus pilihan rasional, menjelaskan proses ini dengan mengemukakan bahwa pasar politik parallel dengan pasar ekonomi, di mana para politisi secara esensial bertindak sebagai para pengusaha yang berusaha mencari suara, berarti bahwa partai-partai berperilaku sangat mirip dengan perusahaan-perusahaan. Kekuasaan karenanya bergantung pada para konsumen, yaitu para pemilih. 'Model ekonomi' ini, akan tetapi, dapat dikritik dengan dasar bahwa partai-partai berusaha membentuk dan menggalang opini publik dan juga merespons opini publik. Penekanan dalam hal ini adalah gambaran tentang para pemilih sebagai para konsumen yang berpengetahuan, rasional dan berorientasi isu masih dipertanyakan dan bahwa rentang pilihan dari konsumen (pemilih) sering kali sangat terbatas.

b. Pembentukan dan rekrutmen elite

Partai-partai dari segala jenisnya berperan dalam menyediakan kepada negara para pemimpin partai politiknya. Perkecualian dari ini adalah partai-partai yang secara efektif merupakan ciptaan dari politisi yang sangat kuat dan digunakan sebagai kendaraan politik untuk memobilisasi dukungan, seperti misalnya Partai Forza Italia dari Silvio Berlusconi, yang dibentuk pada 1993

tetapi kemudian diubah nama menjadi Partai Rakyat Merdeka pada 2009, dan Partai Rusia Bersatu dari Vladimir Putin yang dibentuk pada 2001. Yang lebih umum adalah para politisi mencapai jabatan atau kekuasaan dengan bermodalkan kedudukan di partai, maksudnya adalah para kontestan pemilihan presiden biasanya adalah para pemimpin partai, sementara dalam sistem-sistem parlementer pemimpin dari partai terbesar di dalam majelis normalnya akan menjadi Perdana Menteri. Kabinet dan jabatan-jabatan kementerian lain biasanya diisi oleh figur-figur senior dari partai, meskipun perkecualian terdapat pada sistem-sistem presidensial seperti misalnya di Amerika Serikat, yang memungkinkan penunjukan para menteri non-partai.

Pada kebanyakan kasus, partai-partai karenanya menjadi kawah candradimuka bagi para politisi yang membekali diri dengan keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dan memberi sebagian bentuk struktur karier, meskipun sebagian dari itu bergantung pada keberuntungan dari partai tersebut. Di sisi lain, batasan-batasan yang diberikan partai-partai pada jabatan-jabatan pemerintahan dapat dikritik karena menjamin bahwa para pemimpin politik ditarik dari sekelompok kecil orang-orang berbakat, yang lebih cenderung menunjuk pada kedudukan figur-figur senior dari segelintir partai-partai besar. Di Amerika Serikat, pembatasan ini telah dilemahkan oleh meluasnya penggunaan pemilihan-pemilihan primer, yang menurunkan daya kendali sebuah partai atas proses pemilihan dan pencalonan para kandidat.

c. Perumusan tujuan

Partai-partai politik secara tradisional merupakan salah satu sarana di mana masyarakat menyusun tujuan bersama dan pada sebagian kasus menjamin bahwa tujuan tersebut dilaksanakan. Partai-partai memainkan peran tersebut karena dalam meraih kekuasaan, partai politik merumuskan program-program pemerintahan (melalui konferensi, konvensi, manifesto-manifesto pemilihan dan sebagainya) untuk menarik dukungan masyarakat. bukan hanya ini berarti bahwa partai-partai merupakan sumber utama inisiasi kebijakan, partai juga mendorong untuk merumuskan rangkaian opsi-opsi kebijakan yang koheren dan memberi para pemilih sebuah pilihan di antara tujuan-tujuan yang realistis dan dapat dicapai.

Fungsi ini paling jelas diselenggarakan oleh partai-partai dalam sistem-sistem parlementer yang mampu untuk mengklaim sebuah mandat untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, jika terpilih untuk memegang kekuasaan. Akan tetapi, dapat juga terjadi pada sistem-sistem presidensial dengan partai-partai non-programik, sebagaimana dalam kasus 'Kontrak dengan Amerika' oleh Partai Republik dalam pemilihan-pemilihan kongres Amerika Serikat pada 1994. Akan tetapi, kecenderungan ke arah partai-partai tangkap-semua deideologis, dan fakta bahwa kampanye-kampanye pemilihan semakin menekankan personalitas dan citra di atas kebijakan-kebijakan dan isu-isu, secara umum telah menurunkan pengaruh yang dimiliki partai-partai pada perumusan kebijakan. Program-program partai politik lebih lanjut, hampir pasti dimodifikasi oleh tekanan dari dinas sipil dan kelompok-kelompok kepentingan dan juga oleh keadaan-keadaan domestik dan internasional. Implementasi kebijakan, di sisi lain,

biasanya dilaksanakan oleh birokrasi daripada partai, kecuali dalam sistem-sistem satu partai seperti yang ada di negara-negara komunis ortodoks di mana partai yang berkuasa mengawasi perangkat negara pada semua tatanan.

d. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Dalam proses membangun tujuan bersama, partai-partai juga membentuk untuk menyuarakan dan mengumpulkan berbagai kepentingan yang terdapat di masyarakat. Partai-partai, bahkan sering berkembang sebagai wahana-wahana di mana kelompok-kelompok bisnis, pekerja, keagamaan, etnis atau kelompok-kelompok lain memajukan atau membela berbagai kepentingannya. Partai Buruh Inggris, misalnya, dibentuk oleh gerakan Serikat Buruh dengan tujuan untuk mencapai keterwakilan politik dari kelas pekerja. Partai-partai lain, secara efektif, merekrut kepentingan-kepentingan dan kelompok-kelompok dalam rangka untuk memperkuat basis pemilihnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh partai-partai Amerika Serikat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terhadap kelompok-kelompok imigran.

Fakta bahwa partai-partai nasional selalu menyuarakan tuntutan-tuntutan dari berbagai macam kelompok mendorong partai untuk memadukan kepentingan-kepentingan ini dengan menyatukan mereka ke dalam sebuah kesatuan yang koheren, menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing satu terhadap yang lain. Partai-partai konstitusional jelas didorong untuk melakukan ini oleh tekanan-tekanan dari kompetisi pemilihan, tetapi partai-partai monopolistic menyuarakan dan memadukan kepentingan-kepentingan melalui hubungan erat dengan negara dan ekonomi, khususnya dalam sistem-sistem

perencanaan terpusat. Akan tetapi, di dalam sistem-sistem partai kompetitif sekalipun tidak semua kepentingan dapat tersuarakan di mana kalangan atau kaum miskin adalah yang paling rentan mengalami penyingkiran.

e. Sosialisasi dan Mobilisasi

Melalui debat dan diskusi internal, dan juga kompetisi kampanye dan pemilihan, partai-partai menjadi agen-agen penting dalam pendidikan dan sosialisasi politik. Isu-isu yang dipilih untuk menjadi fokus partai dalam membantu menyusun agenda politik, nilai dan sikap yang mereka suarakan menjadi bagian dari kebudayaan politik yang lebih besar. Dalam kasus partai-partai monopolistic, penyebaran sebuah ideologi resmi (Marxisme, Leninisme, Sosialisme Nasional, atau sekadar ide-ide dari seorang pemimpin karismatik) secara sadar diakui sebagai salah satu fungsi utama, jika bukan yang paling utama.

Partai-partai aliran-utama dalam sistem-sistem kompetitif memainkan peran yang tidak kecil dalam mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk bermain dengan aturan-aturan permainan demokratis kemudian menggalang dukungan bagi rezim itu sendiri. Sebagai contoh, munculnya partai-partai sosialis di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 merupakan salah satu sarana penting dalam mengintegrasikan kelas pekerja ke dalam masyarakat industri. Akan tetapi, kemampuan dari partai-partai untuk melakukan mobilisasi dan sosialisasi telah dilakukan oleh bukti terjadinya pemblotan partisan dan meningkatnya kekecewaan terhadap partai-partai prosistem konvensional di banyak negara. Problem yang dihadapi oleh partai-partai adalah bahwa, pada batas tertentu, partai sendiri disosialisasikan (sebagian akan mengatakan dikorupsi) oleh pengalaman

pemerintah, menjadikan partai terlihat kurang efektif dalam melibatkan para simpatisan partai dan dalam menarik ikatan-ikatan emosional

f. Organisasi Pemerintahan

Sering diargumenkan bahwa masyarakat-masyarakat modern yang kompleks tidak akan dapat diatur atau diperintah tanpa adanya partai-partai politik. Pertama, partai-partai membantu dalam pembentukan pemerintahan, dalam sistem-sistem parlementer, hingga batas di mana memungkinkan untuk berbicara tentang pemerintahan partai. Partai-partai juga memberi kepada pemerintah sebuah derajat stabilitas dan kepaduan, khususnya jika anggota-anggota pemerintahan ditarik dari sebuah partai tunggal dan, karenanya, disatukan oleh simpati-simpati dan ikatan-ikatan bersama. Bahkan pemerintahan-pemerintahan yang dibentuk dari sebuah koalisi partai lebih besar kemungkinannya untuk mendorong kesatuan dan kesepakatan daripada pemerintahan yang tersusun dari individu-individu yang terpisah yang masing-masing memiliki prioritas masing-masing.

Partai-partai memfasilitasi kerja sama antara dua cabang utama pemerintahan, yaitu majelis dan eksekutif. Dalam sistem parlementer, ini secara efektif dijamin oleh fakta bahwa pemerintahan biasanya dibentuk dari partai atau partai-partai yang memiliki control mayoritas di majelis. Akan tetapi, bahkan dalam sistem-sistem presidensial eksekutif utama dapat memiliki sebagian pengaruh, jika bukan kendali, melalui sebuah tuntutan untuk kesatuan partai. Terakhir, partai-partai menyediakan, paling tidak dalam sistem-sistem kompetitif, sebuah sumber penting bagi oposisi dan kritik, baik di dalam maupun di luar

pemerintahan. Dan juga dengan memperluas debat politik dan dengan mendidik para pemilih, hal ini membantu menjamin bahwa kebijakan pemerintahan disusun secara lebih cermat dan teliti dan, karenanya lebih besar kemungkinannya untuk dapat berjalan.

C. Rekrutmen Politik

1. Konsep Rekrutmen Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan. Salah satu fungsi partai politik yang terkait adalah rekrutmen partai politik.

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang dikatakan Budiardjo (2006:164) menyebutkan: "... proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai..."

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Surbakti (118), yang dimaksud rekrutmen politik adalah:

"Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem

politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin”

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat dijustifikasikan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di mata masyarakat.

2. Pola Rekrutmen

Pola merupakan corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level praktis kerap kali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya.

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff (2007:247) adalah proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas *patronase*. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka.

Proses perekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan suatu dasar *patronase* (lindungan) dalam proses perekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup.

Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff yang dikutip dalam Tangkilisan (2003 : 188) disebutkan menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.

Rekrutmen politik menurut Gallagher (2001 : 121) merupakan sebuah “kebun rahasia politik” yang menyimpan banyak misteri dan belum banyak yang terungkap. Bisa dibilang seperti itu, karena fenomena rekrutmen politik nantinya dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika rekrutmen politik partai. Rekrutmen

politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Menurut Krouwel (2006 : 250), Sebuah partai disebut sebagai partai kartel, *catch-all*, kader, massa atau *bussines firm* dapat dilihat dari bagaimana rekrutmen atau regenerasi partai politik dilakukan. Meskipun demikian, secara bersamaan rekrutmen politik tidak hanya menunjukkan identitas tipe kepartaian dari sebuah partai politik. Lebih dari itu, pergeseran-pergeseran sebuah partai politik dari tipe kepartaian ke tipe kepartaian lainnya dari sebuah partai politik.

Dalam hal rekrutmen politik, tentunya semua partisipan menjalani sebuah proses terlebih dahulu. Rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok dilibatkan dalam partai politik. Dalam studi tentang rekrutmen politik, istilah rekrutmen politik sering dipertukarkan dalam makna yang sama dengan seleksi kandidat dan rekrutmen legislatif dan eksekutif. rekrutmen politik juga dapat diartikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial, sementara itu rekrutmen legislatif berbicara tentang bagaimana kandidat yang dinominasikan partai terpilih menjadi pejabat publik.

Pippa (2006 : 89) dalam bukunya *Political Recruitmen*, mengasumsikan terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan partai dan norma-norma sosial maupun informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan

dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara itu, tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.

Perlakuan politik terhadap keseluruhan tahap-tahap Rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting dalam Rekrutmen politik menurut Reuven (2001 : 297), yaitu, Kandidat yang dinominasikan, penyeleksi, posisi kandidat diseleksi dan proses pemilihan kandidat.

Dalam tulisan di atas, terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Dalam model inklusif, menurut Pamungkas (2011 : 93) dalam bukunya *Teori dan Praktek Partai Politik Indonesia*, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara itu, pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat.

Dalam rekrutmen politik, penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam kondisi ekstrim, selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.

D. Konsep Kaderisasi

1. Pengertian Kaderisasi

Kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang untuk mengoptimalkan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. Namun, kaderisasi tidak boleh dipersempit maknanya hanya sekedar proses pendidikan kader. Kaderisasi bukan sekedar proses peningkatan kualitas kader atau sekedar ruang kelas pembelajaran, di mana setelah mengikuti kelas yang dimaksud, seseorang dinyatakan layak menjadi seorang kader. Kaderisasi secara mudah dapat dipahami sebagai proses melahirkan atau membentuk seorang kader. Hal ini bermakna bahwa kaderisasi adalah proses yang paling bertanggungjawab atas kualitas kader, sekaligus kualitas masa depan sebuah organisasi. Oleh karena itu, kaderisasi bermakna sebagai suatu proses sengaja dan terencana, untuk menemukan (melahirkan atau membentuk), mencerahkan (mendidik) dan pada gilirannya menugaskan (menempatkan) kader.

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh dilupakan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian. Format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan sangat penting guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dan etika dengan segala dimensinya. Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang dikembangkan. Karena wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya

kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

Dengan adanya kaderisasi, diharapkan organisasi akan bertahan dalam waktu yang cukup lama, tidak bersifat *ad-hoc* dalam mengemban visi dan melaksanakan misinya. Pepatah Belanda mengatakan *on mis baar*, yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti tidak ada di dunia ini suatu organisasi apapun yang tidak tergantikan. Pada saatnya seorang pemimpin secara alamiah atau sebab lain pasti akan turun dan digantikan oleh yang lain. Apalagi bagi pemimpin organisasi modern, yang anggotanya terdiri dari manusia-manusia yang mempunyai pemikiran rasional, mempunyai wawasan ke depan, serta semakin tidak populernya teori timbulnya pemimpin karena dilahirkan. Pemimpin tumbuh dan berkembang karena melalui proses pembinaan dan dimatangkan oleh lingkungan. Sistem pengkaderan di dalam suatu partai akan sangat tergantung dari besar kecilnya organisasi, lingkup atau bidang kegiatan yang menjadi misi pokok, sistem nilai yang dianut, serta eksistensi organisasi, apakah semestara atau jangka panjang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaderisasi memiliki peran yang sangat penting. Adapun peran penting kaderisasi adalah sebagai berikut:

- a) Pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik. Proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan sesuatu (nilai) dari satu orang ke orang lain. Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau yang sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi (seperti konsepsi, AD/ART, dan aturan-aturan lainnya) maupun nilai yang tidak tertulis atau budaya-

budaya baik yang terdapat dalam organisasi (misalnya budaya diskusi) maupun kondisi-kondisi terbaru yang menjadi kebutuhan dan keharusan untuk ditransfer.

- b) Penjamin keberlangsungan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti setiap keberjalanan waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang. Dengan demikian keberlangsungan organisasi dapat dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakkan, jika sumber daya manusia tersebut hilang maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi baru, yang termasuk di dalamnya adanya pembaruan semangat.
- c) Sarana belajar bagi anggota. Tempat di mana anggota mendapat pendidikan yang tidak didapat di bangku pendidikan formal. Pendidikan itu sendiri berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam proses mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Pendidikan di sini mencakup dua hal yaitu pembentukan dan pengembangan. Pembentukan karena dalam kaderisasi terdapat output-output yang ingin dicapai, sehingga setiap individu yang terlibat di dalam dibentuk karakternya sesuai dengan output. Pengembangan karena setiap individu yang terlibat di dalam tidak berangkat dari nol tetapi sudah memiliki karakter dan skill masing-masing yang terbentuk sejak kecil, kaderisasi memfasilitasi adanya proses pengembangan itu. Pendidikan yang dimaksudkan di sini terbagi dua yaitu

dengan pengajaran (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada karakter) dan pelatihan (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu *skill*). Dengan menggunakan kata pendidikan, kaderisasi mengandung konsekuensi adanya perubahan sikap dan tata laku serta proses mendewasakan. Hal ini sangat terkait erat dengan proses yang akan dijalankan di tataran lapangan, bagaimana menciptakan kaderisasi yang intelek untuk mendekati kesempurnaan perubahan sikap dan tata laku serta pendewasaan.

Terkait dengan fungsinya, kaderisasi memiliki fungsi antara lain:

- a) Melakukan rekrutmen anggota baru. Penanaman awal nilai organisasi agar anggota baru dapat memahami dan bergerak menuju tujuan organisasi.
- b) Menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota. Membina anggota dalam setiap pergerakannya. Menjaga anggota dalam nilai-nilai organisasi dan memastikan anggota tersebut masih sepaham dan setujuan. Mengembangkan skill dan *knowledge* anggota agar semakin kontributif.
- c) Menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif. Kaderisasi akan gagal ketika potensi anggota mati dan anggota tidak diberdayakan.
- d) Mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi. Kaderisasi bisa menjadi evaluator organisasi terhadap anggota. Sejauh mana nilai-nilai itu diterima anggota, bagaimana dampaknya, dan sebagainya.

2. Subyek dan Obyek Kaderisasi

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan.

Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum.

Pandangan umum mengenai kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Kedua, sarana kaderisasi (obyek). Untuk yang pertama, subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Sifat sebagai subyek dan obyek dari proses kaderisasi ini sejatinya harus memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader organisasi yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis.

Sebagai obyek dari proses kaderisasi, sejatinya seorang kader memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melanjutkan visi dan misi organisasi ke depan. Karena jatuh bangunnya organisasi terletak pada sejauh mana komitmen dan keterlibatan mereka secara intens dalam dinamika organisasi, dan tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan organisasi yang telah dirintis dan dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu organisasi.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam hal kaderisasi adalah potensi dasar kader sebagai bentuk upaya mencari bibit-bibit unggul dalam kaderisasi. Di sisi lain, subyek kaderisasi juga harus mampu menawarkan visi dan misi ke depan yang jelas dan memikat, serta menawarkan dinamika organisasi yang menantang bagi para kader yang potensial, sehingga dengan senang hati akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, maka organisasi atau sebuah pergerakan harus terlebih dahulu mematangkan visi misi, dan termasuk sikap terhadap persoalan mendesak dan aktual kemasyarakatan, serta pada saat yang sama tersedianya para pengkader yang handal, untuk menggarap bibit-bibit potensial.

Kader-kader potensial, setelah memahami dan meyakini pandangan dan sistem yang telah diinternalisasikan, maka jiwanya akan terpacu untuk bekerja, berkarya dan berkreasi seoptimal mungkin. Maka, di sini, organisasi dituntut untuk dapat mengantisipasi dan menyalurkannya secara positif. Dan memang sepatutnya organisasi-pergerakan mampu melakukannya, karena bukankah yang namanya organisasi-pergerakan berarti terobsesi progresif bergerak maju dengan satu organisasi yang efisien dan efektif, bukan sebaliknya.

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu dipikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tetapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

3. **Kaderisasi Formal dan Informal**

Proses Kaderisasi adalah kegiatan yang berisi upaya-upaya yang mendukung bagi terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dari proses kaderisasi ini melahirkan seorang kader. Dalam salah satu kamus istilah kader ini diartikan sebagai bagian dari anggota yang terikat dengan disiplin dan bekerja secara maksimal. Akan tetapi, di sini seorang kader diartikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang sebuah amanah kepemimpinan atau sebuah jabatan baik itu di organisasi pemerintahan maupun di organisasi lain.

Ada beberapa faktor mengapa kaderisasi ini sangat diperlukan, Menurut Utoyo (1994 : 50) dalam bukunya *Sistem Kaderisasi Kepemimpinan Nasional dalam Rangka Mewujudkan Katahanan Nasional di Masa Mendatang*, antara lain:

1. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki kepemimpinannya diganti, baik secara wajar maupun tidak wajar.
2. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin.
3. Kematian.

Dalam pelaksanaannya proses kaderisasi ada dua macam yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Kaderisasi informal

Kaderisasi informal merupakan sebuah proses atau usaha-usaha untuk mempersiapkan seorang calon pemimpin atau seorang kader yang dilaksanakan tidak secara berencana, teratur tertib, sistematis, terarah dan disengaja serta tidak menggunakan kurikulum tertentu. Akan tetapi, kaderisasi informal merupakan sebuah proses pendidikan sehari-hari yang dimulai dari sejak dini, baik itu proses belajar di sekolah, pendidikan yang diberikan keluarga dan lingkungan masyarakat setempat. Proses ini menekankan pembentukan kepribadian dan penanaman akhlak dan sikap yang baik dalam jangka waktu yang lama. Kepribadian positif perlu dipupuk sejak dini dan seumur hidup.

Dari proses kaderisasi informal ini dapat diketahui kelebihan seseorang calon pemimpin yang memiliki kepribadian positif. Hal ini bisa dilihat dari prestasinya, loyalitas dan dedikasinya dalam sebuah kelompok atau organisasi yang diikutinya, serta akhlak dan agamanya atau loyalitasnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Kaderisasi Formal

Kaderisasi formal merupakan proses kaderisasi atau upaya mempersiapkan seseorang menjadi calon pemimpin yang dilaksanakan secara disengaja, terarah, teratur dan tertib, sistematis dan mengikuti kurikulum tertentu dalam jangka waktu tertentu yang berisi bahan-bahan teoretis dan praktik tentang kepemimpinan dan berbagai aspek pendukungnya. Beberapa usaha kaderisasi formal yang bersifat intern dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan menduduki jabatan pemimpin pembantu.
- b. Latihan kepemimpinan di dalam atau di luar organisasi.
- c. Memberikan tugas belajar.
- d. Penugasan sebagai pucuk pimpinan suatu unit

Sedangkan kaderisasi formal yang bersifat ekstern dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyeleksi sejumlah generasi muda lulusan lembaga pendidikan jenis dan jenjang tertentu untuk diangkat memimpin suatu unit yang sesuai atau ditugaskan magang sebelumnya.
- b. Menyeleksi sejumlah generasi muda lulusan lembaga pendidikan jenis dan jenjang tertentu, kemudian ditugaskan belajar pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam dan di luar negeri sebelum ditempatkan pada posisi tertentu.
- c. Memesan sejumlah generasi muda dari lembaga pendidikan formal dengan program khusus sesuai dengan bidang yang dikelola organisasi pemesan dengan syarat tertentu.

- d. Menerima sejumlah generasi muda dari lembaga pendidikan untuk melakukan kerja praktik di lingkungan organisasi.
- e. Memberikan beasiswa belajar bagi orang yang tidak mampu kemudian setelah lulus langsung ditempatkan pada jalur yang memberi peluang untuk melatih dan mempersiapkan diri menjadi pimpinan secara bertahap.

E. Good Administration Performance

1. Konsep Reformasi Administrasi

Secara harfiah, *Good Administration and Performances* (GAP) adalah pandangan mengenai kinerja administrasi yang baik. GAP tidak muncul secara tiba-tiba, secara teoritis, penulis menganalisa dari pandangan berbagai macam teoritikus administrasi, salah satunya Gerald Caiden, ilmuwan administrasi tahun 1969. GAP (*Good Administration Performances*) digunakan penulis untuk meneruskan pandangan dari Caiden dalam bukunya yang berjudul *Administrative Reform* yang banyak membicarakan tentang reformasi dalam bidang administrasi serta konsep administrasi yang sehat (*The Concept of Administrative Health*). Reformasi administrasi tidak hanya proses politik, tetapi secara langsung berkaitan dengan sifat pemerintahan tersebut. Dengan harapan GAP dapat memperluas cakupan daripada gagasan reformasi administrasi.

Reformasi administrasi menurut pandangan Caiden (1969 : 181) tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama di semua bagian negara di dunia, terdapat proses-proses yang mengkaitkan upaya reformasi administrasi dengan kondisi pemerintahan atau politik, pernyataan Caiden yaitu:

“In one-party totalitarian states, administrative reforms must conform with centrally approved policies and directions. In dictatorships, they must have the concurrence of the dictator, however paranoiac or stupid he may be. Once reforms are accepted, there is little open resistance to their implementation, but passive resistance may be hidden. The alternative is to bypass the center altogether and hope that no one there will find out until it is too late, or that, if they do, they will sympathize. In multiparty democracies, much administration is outside the political sphere in practice, and reforms do not need political concurrence unless the political the political actors wish to make them political issues. The extent to which the political processes impede administrative reform depends less on the form of the polity and more on their controversial nature and whether the reformers can avoid the political arena.”

Maksud pernyataan Caiden adalah, dalam satu partai negara totaliter, reformasi administrasi harus sesuai dengan kebijakan dan arah yang disetujui oleh rezim. Dalam kediktatoran, reformasi dilakukan melalui persetujuan diktator. Sedangkan dalam demokrasi multipartai, administrasi dalam prakteknya berada di luar ranah politik, dan reformasi tidak perlu persetujuan politik, kecuali agenda politik para aktor politik yang ingin menciptakan isu-isu politik. Sejauh mana proses politik menghambat reformasi administrasi kurang bergantung pada bentuk pemerintahan dan lebih pada sifat kontroversial para aktor politik dan juga bergantung pada upaya kaum reformis dalam menghindari arena politik.

Lebih jelasnya, Caiden (1969 : 181) berpendapat bahwa politik mendapat porsi yang sedikit dalam mempengaruhi proses reformasi administrasi, terutama di negara yang menerapkan demokrasi multipartai. Caiden memandang bahwa reformasi akan berjalan jika kepentingan politik dalam pemerintahan dapat diseragamkan atau bahkan tidak ada. Tetapi hal tersebut tidak mutlak, karena dapat pula dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

- a. Pemerintah dapat dikuasai oleh satu partai politik atau dikendalikan oleh partai-partai politik yang sama. Karena gagasan reformasi dapat pula mengacu dari keinginan merubah sistem dari suatu kepentingan tertentu.
- b. Legislatif dikendalikan oleh partai-partai politik atau pihak yang sama atau identik. Sedangkan koalisi akan cenderung menyediakan pihak yang anti terhadap reformasi.

Resistensi terhadap reformasi administrasi oleh para pemimpin politik dan pengaturan politik hanya refleksi dari sikap politik yang mendasari. Menurut Caiden (1969 : 181):

“Resistance to administrative reforms by political leaders and political arrangements is only a reflection of underlying political attitudes. Who really wants a perfectly administered taxation system or police force? There are good political reasons why maladministration exist, why it is allowed to persist, and why apparently obvious remedies are not applied.”

Caiden bertanya-tanya bahwa siapakah sebenarnya yang menciptakan maladministrasi untuk ada, serta mengapa diperbolehkan bertahan, bahkan tampak tidak terlihat suatu solusi yang jelas untuk diterapkan. Bahkan, Caiden melontarkan pertanyaan yang menjadi sekaligus pernyataan tentang siapa yang benar-benar menginginkan sistem perpajakan diatur dan keberadaan polisi. Reformasi administrasi salah satunya dikatakan oleh Caiden (1969 : 181): “ yang berbentuk kebijakan seperti di era ketika Taylorisme yang berupaya memperkenalkan konsep *deskilling* dan *managerial control*, kemudian diterapkan secara membabi buta dan tidak mewakili kepentingan publik, melainkan kepentingan birokrat dan pemilik modal, sehingga membangkitkan gerakan buruh

yang terorganisir. Seperti pemberlakuan *fingerprinting* yang menimbulkan pertentangan banyak warga yang taat hukum, disebabkan kebijakan tersebut dirasa mengurangi waktu luang pekerja di mana para pekerja dapat memanfaatkan waktu tidak produktifnya untuk mengerjakan hal-hal produktif yang lain. Kebijakan tersebut menimbulkan perlawanan yang kemudian dimobilisasi melalui lembaga/organisasi representasi publik, seperti dari LSM, Legislatif (*ombudsman*), serikat pekerja, hingga partai politik, tentunya memobilisasi massa buruh.

Reformasi administrasi yang didasari oleh nilai-nilai politik dapat diperkenalkan melalui kebijakan para aktor politik yang menempati kursi-kursi eksekutif, itu pun masih harus disesuaikan dengan konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi. Ideologi politik dapat melakukan infiltrasi ke dalam banyak regulasi, kebijakan, maupun program administrasi, tetapi kembali lagi pada fenomena di mana para aktor politik menjadi golongan yang terpisah dari birokrasi yang lebih tunduk terhadap konstitusi daripada politik, pun para aktor politik mempunyai pekerjaan tersendiri dalam meningkatkan citranya. Para aktor politik yang menjabat pada pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum kemudian akan menjadi para pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan. Pekerjaan rumah yang menunggu adalah sejauh mana para aktor politik ini mempunyai integritas dalam menjalankan perannya dalam era reformasi administrasi, karena walaupun aktor politik tidak serta merta dapat mengendalikan birokrasi, tapi secara kedudukan eksekutif memiliki hak dalam membuat suatu kebijakan.

Penulis berpendapat bahwa pandangan Caiden dalam mengejawantahkan reformasi administrasi dalam kacamata politik dalam melihat bagaimana reformasi administrasi akan berjalan sesuai dengan rencana, yakni dengan melihat kondisi politik yang terjadi. Secara faktual, dengan perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dewasa ini dikendalikan oleh politik, maka politik mengambil peran cukup signifikan dalam upaya reformasi administrasi, asalkan ada rencana untuk membawa perubahan dalam manuver politiknya. Adanya suatu porsi untuk politik di tataran pemerintahan tentu membuka peluang bagi kepentingan politik dalam mencampuri tata kelola pemerintahan, di mana reformasi administrasi juga merupakan agenda yang dapat berjalan atau berbenturan dengan politik. Tentunya konstitusi telah mengharuskan politik untuk tetap tunduk pada dasar hukum tertinggi negara. Sehingga politik hanya akan melakukan perubahan pada lini-lini tertentu, terutama pada reformasi administrasi.

2. Good Administration and Performances

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, *Good Administration and Performances* (GAP) adalah suatu prinsip administrasi yang baik untuk operasi administrasi yang efisien dengan kebutuhan mempromosikan etika dan integritas untuk mencapai kesejahteraan umum, hal itu dijelaskan oleh Matei (2014 : 685) dalam jurnal *Good Administration and Performance of Local Public Administration*, yakni: "...the specialty literature also noted the conflict generated by the will to have a performing and efficient administration with the need to promote ethics and integrity for the purpose of achieving the common

welfare”. GAP dapat pula merupakan bagian daripada reformasi administrasi yang berupaya mendeskripsikan bagaimana memberi sudut pandang terhadap maladministrasi yang terjadi. Pendekatan yang digunakan di dalam GAP adalah etika administrasi. Kinerja administrasi yang baik adalah suatu kondisi di mana sumber daya manusia (SDM) yang berada di dalam ruang kerja administrasi memiliki sikap (*attitude*) yang baik. Peninjauan tersebut berkaitan dengan suatu pandang etika administrasi yang menempatkan sikap (*attitude*) yang baik ke dalam suatu kinerja administrasi. Di dalam *Good Administration Performances*, terdapat 3 indikator, yakni:

- a. Azas Etik (*Principle of Ethics*)
- b. Kode Etik (*Code of Ethics*)
- c. Etika Kerja (*Work Ethics*)

Pertama, azas etik atau *principle of ethics* adalah suatu pemahaman tentang mempromosikan kekuatan prosedur administrasi, yaitu prosedur administrasi harus ditujukan untuk melawan birokrasi yang korupsi dan tidak mendorong untuk terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu dalam kegiatan tersebut menunjukkan suatu doktrin dan yurisprudensi, yaitu melindungi kepentingan publik. Cara konsep ini diatur, memungkinkan menggabungkan antara dua pendekatan, yaitu sisi peradilan dan sisi administratif, tanpa ada konflik antara manajemen dan memperhatikan hak atas administrasi yang baik.

Kedua, kode etik atau *code of ethics* adalah norma kehidupan sehari-hari, dalam menerapkan kode etik dituntut untuk mencerminkan dalam bentuk pola pikir, sikap, perilaku dan pola tindakan. Kode etik dapat berupa kesetiaan kepada

dasar suatu negara, organisasi, atau lingkungan kerja. Kode etik akan memberikan sebuah identitas substansial kepada seseorang atau suatu kelompok orang sesuai dengan kode etik masing-masing. Selain itu kode etik juga merupakan suatu aspek hukum yang memberi batasan-batasan tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menjaga integritas dan nama baik suatu nilai yang dianggap baik, seperti norma organisasi, norma lingkungan, atau norma agama.

Ketiga, etika kerja atau *work ethics* dapat pula disebut dengan etos kerja. Adalah adat atau kebiasaan seseorang yang mendorong seseorang untuk secara pribadi bertanggungjawab pada pekerjaan dan tanggung jawabnya. Umumnya *work ethics* berkenaan dengan karakter seseorang yang dibangun melalui suatu penerapan standar-standar tertentu. Seperti SOP (*Standard Operational Procedure*) yang diterapkan di dalam lingkungan pekerjaan. Sepintas seperti konsep yang diperkenalkan oleh Taylor yang menurut Braverman merupakan upaya *deskilling* yang mengawal kemahiran kerja, tapi menurunkan seni kerja. Penerapan SOP sejatinya merupakan upaya membentuk *work ethics* dari sisi eksternal dari organisasi kepada seseorang, sedangkan secara internal sebenarnya *work ethics* berasal dari diri masing-masing orang. Secara tradisional, *work ethics* telah dipahami sebagai nilai berdasarkan kerja keras dan ketekunan. Di dalam kehidupan kapitalis, misalnya, yang percaya bahwa perlunya bekerja keras dan kemampuan konsekuensial meningkatkan karakter seseorang. Sedangkan di dalam dunia sosialis menunjukkan bahwa konsep kerja keras adalah menipu kelas pekerja untuk kesetiaan terhadap elit, dan bekerja keras pada sudut pandangnya

belum tentu suatu hal yang terhormat, tetapi hanya cara untuk menciptakan kekayaan yang lebih besar bagi mereka di puncak piramida ekonomi.

Faktual, persepsi alternatif menunjukkan bahwa *work ethics* semakin bermakna luas, dan mudah dipasarkan ke dalam kehidupan publik, perspektif tersebut melahirkan frase “kerja cerdas” (*work smart*). *Work ethics* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi dan konsisten, tanpa dorongan tekanan dari luar. Jadi sebenarnya *work ethics* juga dapat bermakna ganda, dapat berupa sebuah bakat yang alami ada pada diri seseorang, atau kemampuan seseorang yang terpengaruh oleh adanya suatu lingkungan yang diatur oleh manajer-manajer.

3. Good Administration and Performances dalam Partai Politik

Etika dan integritas adalah hal yang penting di dalam eksistensi sebuah partai politik. Hal ini dikarenakan misi partai politik sama halnya seperti lembaga-lembaga publik yang berusaha melaksanakan pembangunan kesejahteraan umum. Penulis berpendapat bahwa partai politik perlu mengadopsi prinsip-prinsip etika daripada *Good Administration and Performances* agar tercipta keselarasan tata kelola organisasi partai politik dengan kualitas SDM yang dimiliki.

Semua partai politik sejatinya memiliki dasar-dasar etika dengan menerapkan kode etik kader partai dengan menciptakan peraturan partai secara tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi tanpa pendalaman bagaimana tata kelola administrasi dan peningkatan kinerja dengan fokus etika, maka pekerjaan yang akan dilakukan sulit menciptakan suatu lingkungan yang sehat secara administratif. Hal administrative yang dimaksud bukan tentang pekerjaan surat

menyurat semata, melainkan segala aspek administrasi seperti prinsip-prinsip transparansi, ketercapaian kepentingan publik.

Sejatinya prinsip etika secara tersirat telah hidup dalam kehidupan partai politik di Indonesia. Berdasarkan pada Pancasila sila ke 4 yang berbunyi, *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”* yang bermakna bahwa publik memiliki perwakilan-perwakilan dalam memimpin dan menyalurkan aspirasi publik, sederhananya, partai politik yang merupakan keniscayaan dari kemajemukan publik adalah subjek perwakilan yang paling etis. Partai politik memiliki ideologi sebagai asas organisasi yang memposisikan etika-etika tertentu sebagai prinsip utama dalam bekerja. Oleh karena itu, *Good Administration and Performances* relevan untuk dijadikan suatu peninjauan kembali terhadap diterapkannya etika administrasi di dalam kegiatan partai politik dewasa ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam suatu kegiatan penelitian agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta harapan sang peneliti, maka untuk mendukung apa yang diangankan peneliti tersebut harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan menggunakan metode penelitian, peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan. Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan pengertian penelitian menurut Singarimbun dan Effendi (1988 : 8), deartikan sebagai berikut:

“Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Hasil akhirnya pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya.”

Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahas yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dengan metode dekriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Paradigma adalah suatu cara

pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada peneliti apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologi yang panjang. (Mulyana, 2006 : 9).

Peneliti menggunakan paradigma post positivisme yang berlawanan dengan positivisme di mana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif. Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks *value*, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan. Sifatnya natural dan lebih manusiawi. Post positivisme merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran positivisme. Dapat dikatakan bahwa post positivisme adalah reaksi terhadap positivisme. Menurut pandangan post positivisme, kebenaran tidak hanya satu, tetapi kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja.

Menurut Muhadjir (2000 : 79), “Karakteristik utama paradigma post positivisme adalah pencarian makna di balik data”. Peneliti melihat menggunakan paradigma post positivisme untuk mengetahui pandangan alamiah dari kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang dalam merasakan pola rekrutmen dan kaderisasi di lingkungan DPC PDI Kabupaten Malang secara alamiah dan natural.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Menurut Sevilla dkk (1993 : 71) metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka

menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu masalah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2000 : 62) adalah masalah yang timbul dalam penelitian yang sekaligus membatasi studi dalam penelitian dan berkaitan dengan proses inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan informasi atau data yang diperoleh di lapangan sehingga pembahasan tidak melebar tetapi lebih efektif dan efisien. Fokus penelitian berupa rumusan yang terdiri dari dua faktor atau lebih yang sekaligus berkaitan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep pola rekrutmen dan kaderisasi di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Malang dalam pendekatan *good administration and performances*
 - a. Dasar pola rekrutmen dan kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
 - b. Konsep pendidikan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Membangun daya dukung terhadap internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, peneliti memberikan data mengenai konsep pendidikan kader yang diberikan oleh pimpinan pusat (DPP) kepada struktur di Propinsi serta Daerah, data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Buku Sekolah Partai, Dasar-dasar Pendirian dan Persiapannya, DPP PDI Perjuangan (tahun 2012)

Literatur tersebut digunakan sebagai bahan analisis pola rekrutmen dan kaderisasi telah didukung oleh dasar-dasar yang jelas, terutama rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

c. Rekrutmen dan kaderisasi administratif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Malang

Calon kader yang akan menjadi anggota PDI perjuangan, harus memenuhi syarat-syarat administratif agar diterima sebagai anggota partai. Prosedur pengurusan pendaftaran harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjadi anggota PDI Perjuangan.

d. Rekrutmen dan kaderisasi akademis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Malang

Mekanisme rekrutmen akademis PDI Perjuangan adalah dengan cara mengikuti prosedur pendidikan kader sesuai dengan bidang dan tingkatan pendidikan. Pemetaan kader dalam proses rekrutmen akademis disesuaikan dengan potensi kepengurusan masing-masing. Peneliti juga dituntut untuk menyertakan pola serta ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kaderisasi PDI Perjuangan sebagai fokus dalam penelitian.

e. Konsep *good administration and performances* dalam meninjau pola rekrutmen dan kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Substansi atau makna dari rekrutmen dan kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Malang telah memenuhi kriteria dalam pembangunan

kapasitas organisasi dalam pendidikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang sudah direkrut maupun yang belum direkrut.

2. Pandangan tentang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang pada pola rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Prosedur rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dilandasi pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masa bakti 2015-2020. Selain itu PDI Perjuangan juga memiliki produk kebijakan tentang pola rekrutmen dan kaderisasi yang tertuang di dalam buku *Sekolah Partai, Dasar-dasar Pendirian dan Persiapannya* yang dibuat oleh HM Idham Samawi (2012) selaku Ketua Bidang Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen DPP PDI Perjuangan tahun 2012.

a. Pandangan kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang terhadap pola rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Peneliti menggali tentang asumsi-asumsi dari tokoh-tokoh kunci di dalam PDI Perjuangan Kabupaten Malang, baik dari DPC maupun PAC (Pengurus Anak Cabang). Hal ini dikarenakan pandangan bersifat oto kritik juga diperlukan, serta PAC dalam hal ini adalah pihak yang juga merasakan kebijakan rekrutmen dan kaderisasi dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

b. Pandangan subjek non-partai terhadap pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik, terutama PDI Perjuangan.

Peneliti menggali tentang asumsi-asumsi dari beberapa subjek non-partai yang mengerti tentang rekrutmen dan kaderisasi partai politik sebagai aspek pendukung dari informan utama.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Malang, Karena Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang mempunyai basis massa yang cukup tinggi bagi PDI Perjuangan Kabupaten Malang, baik secara kuantitas jumlah kader maupun pejabat politik atau publik yang menjadi anggota dari PDI Perjuangan Kabupaten Malang, tetapi masih terdapat proses administrasi dalam rekrutmen dan kaderisasi yang belum tergarap dengan baik.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana sesungguhnya penelitian menangkap keadaan sebenarnya berkaitan dengan obyek yang diteliti. Disini yang menjadi obyek penelitian adalah kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Malang. Alasan dari pemilihan situs penelitian ini karena kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang merupakan kantor yang secara khusus menangani urusan rumah tangga PDI Perjuangan Kabupaten Malang di bidang manajemen organisasi pada tingkat di bawahnya, yakni PAC (Pengurus Anak Cabang) dan Ranting.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data menunjukkan dari mana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Sedangkan menurut Arikuto (1998 : 114), yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.

Dalam penilitan ini, sumber data yang utama adalah informan, yaitu orang yang bisa memberikan informasi yang diperlukan tersebut. Berkaitan dengan fokusnya, dalam penelitian ini sumber datanya adalah anggota DPC PDI Perjuangan, serta PAC PDI Perjuangan PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Jenis data yang menunjang penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, sebagai data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan media massa, catatan pejabat resmi, karya tulis ilmiah, dokumen pribadi, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses menggali data di lapangan, sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Yaitu merupakan komunikasi langsung antara peneliti sebagai interviewer dengan nara sumber atau orang-orang yang berkaitan erat dengan obyek penelitian sebagai interviewer. Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba, yang dikutip oleh Moleong (2000 : 135) antara lain :

“Mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti.”

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, serta anggota PAC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan penggalian data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan definisi sejenis, yang diberikan Arikunto (1998 : 236), bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan. Transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Horizon (2007 : 151) dalam bukunya *Metodologi Penelitian Politik*, merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui metode membaca, membandingkan dan menganalisa data yang ingin disampaikan peneliti

kepada pembaca. Menurut Supranto dalam Ruslan (2003 : 31), mengemukakan: “Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.” Dengan hal ini, upaya penelitian yang dilakukan dapat menjadi baik karena tidak hanya berdasarkan pemikiran sendiri selaku peneliti melainkan pemikiran-pemikiran dan pendapat para ahli atau penulis lainnya. Sehingga bisa dibandingkan serta referensi yang dapat memberikan arah kepada peneliti.

Pengumpulan data yang dimaksud adalah dengan cara mengkonversi dari beberapa sumber literatur untuk kemudian dijadikan sebagai bahan penguat tulisan. Peneliti melakukan kajian pustaka terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), buku Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, buku-buku teoritik dan juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian mengenai proses Kaderisasi Partai Politik

F. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Menurut Sugiyono (2010 : 50), sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini, dalam menguraikan teknik penentuan informan kemudian diperjelas dengan siapa subjek

penelitian, informan maupun informan pendukung dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.

Maka subjek penelitian ini merupakan kader PDI Perjuangan yang berada di Kabupaten Malang, di mana objek penelitian adalah kader partai yang berada di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, kader yang berada di kepengurusan PAC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, serta anggota yang berada di luar kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

2. Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang, karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informasi atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus atau satu kesatuan unit, antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.

Informan memiliki nilai-nilai dan motifnya sendiri. Bukan tidak mungkin terdapat pertentangan nilai, ataupun pertentangan maksud dan tujuan antara informan dengan peneliti. Menjelaskan tujuan penelitian dan

menyampaikan laporan penelitian secara berkala kepada informan, merupakan beberapa cara untuk memperoleh kepercayaan informan sekaligus mengamankan proses penelitian yang sedang dilakukan. Sehingga sah apabila identitas informan disamarkan, terutama bila meneliti hal-hal yang sifatnya sensitif dalam suatu masyarakat.

Teknik penentuan informan menurut Sugiyono (2012 : 52) merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu, *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.”

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah *purposive sampling* dikenal juga dengan sampling pertimbangan. Menurut Riduwan (2010 : 20) mengatakan bahwa:

“*Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Hanya mereka yang ahli yang patut memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang diperlukan. Oleh karena itu, sampling ini cocok untuk studi kasus yang mana aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis.”

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Di mana informan penelitian ini merupakan orang-orang yang berada di lingkungan PDI Perjuangan Kabupaten Malang, yaitu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dan PAC PDI Perjuangan Kabupaten

Malang, serta Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Karena peneliti melihat bahwa pihak-pihak tersebut mewakili peneliti dalam melihat pola rekrutmen dan kaderisasi di lingkungan organisasi politik seperti partai politik. Sehingga memudahkan peneliti memenuhi kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian. Karena peneliti menggunakan teknik pengumpulan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan peneliti sebagai berikut:

Tabel 3.
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Drs. Hari Sasongko	Wakil Ketua Bidang Kehormatan
2.	Herman Hidayat	Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kepanjen, Kabupaten Malang
3.	Supriadi	Anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Malang

Sumber : Peneliti, 2016

3. Informan Pendukung

Dalam penelitian ini, peneliti juga memiliki informan pendukung atau informan tambahan. Informan pendukung menurut Hendarso dalam Suyanto (2005 : 171), adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dari informan pendukung ini, peneliti ingin menggali data sekunder yang berkaitan dengan pola rekrutmen dan kaderisasi yang berada di lingkungan partai politik, terutama PDI Perjuangan. Adapun informan pendukung yang peneliti pilih berdasarkan pada kecakapan dalam pengetahuan secara teoritis dan praksis, yakni pengalaman mengamati proses politik di Indonesia, yang dapat memberikan informasi sekunder

kepada peneliti. Maka diambil informan pendukung yang dapat mendukung peneliti dalam memberikan informasi sekunder, informan pendukung yang penulis pilih adalah Marhaendra Pramudya Mahardika, informan pendukung merupakan Manajer Program Indopolling Network Jakarta (Lembaga Survey Pemilu) & Koordinator Area Indopolling Network Jawa Timur, informan pendukung berdomisili di Kabupaten Malang.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Arikunto (1998 : 151), yang dimaksud instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Dimana dalam penelitian kualitatif peneliti selain sebagai perencana, analisis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian, sekaligus sebagai pengumpul data utama.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Sebagaimana panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara agar dalam wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur dan lancar.

3. Alat Tulis (catatan)

Yaitu untuk mencatat hasil-hasil penelitian, baik dari hasil wawancara maupun observasi.

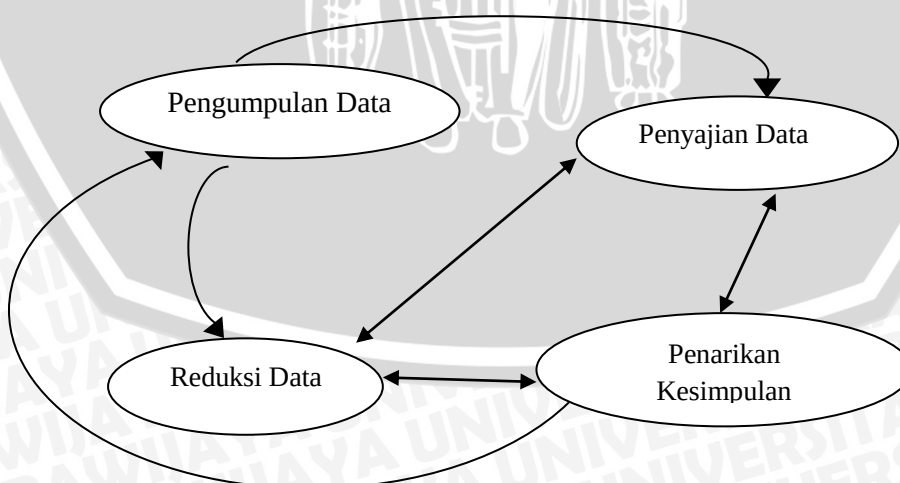
4. Alat Perekam

Yaitu sebagai alat perekam wawancara antara peneliti dengan narasumber wawancara. Agar peneliti tidak meninggalkan sumber informasi penting dari narasumber

H. Analisis Data

Sebagai langkah selanjutnya, data yang telah dikumpulkan, yang masih mentah dan berdiri sendiri-sendiri kemudian dianalisis untuk melakukan klasifikasi data dan untuk menghubungkan sendiri data yang diperoleh dan kemudian diambil kesimpulan terhadap hasil data tersebut. Menurut Patton dalam Moleong (2000 : 103), yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Gambar 1. Komponen-Komponen Analisa Data: Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2011:247)

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011 : 246) mengenai analisis data dalam penelitian disini bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi meliputi :

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diuraikan oleh peneliti sendiri. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukannya dalam waktu 2 bulan yang terdiri dari beberapa sesi wawancara dengan berbagai narasumber yaitu: Wakil Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Perwakilan PAC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Perwakilan Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu oleh peneliti kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Data yang diperoleh peneliti dari lapangan tidak semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data. Peneliti hanya mengambil data yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyusunan informasi yang tersusun, dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dari hasil reduksi data. Data yang dimaksudkan sesuai dengan fokus

penelitian. Data tersebut didapatkan dari wawancara dengan sumber data informan dan data yang bersifat dokumen.

4. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dari data yang telah disajikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran untuk mengembangkan potensi yang ada di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif yang bergerak pada empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga model analisis interaktif ini merupakan model yang akomodatif bagi penelitian ini dan skripsi yang telah dibuat lebih terarah dan lebih baik dalam proses penulisannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Objek Penelitian

1. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

a. Partai dan Parlemen di Era Kemerdekaan Hingga Orba

Pada awal kemerdekaan Indonesia kehadiran parpol terkait dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 mengenai Pembentukan KNIP yang diikuti oleh Manifesto Politik Pemerintah 3 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementarian dan sekaligus mendorong pembentukan partai politik. Tidak kurang dari 10 partai politik yang terbentuk antara kurun waktu November 1945 dan Januari 1946 yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), PBI (Partai Buruh Indonesia), Partai Rakyat Jelata, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), PSI (Partai Sosialis Indonesia), PARAS (Partai Rakyat Sosialis), PKRI (Partai Katolik RI), (PERMAI) Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, dan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai fusi dari Partai Rakyat Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia. Jumlah partai terus bertambah dengan keluarnya NU (Nahdlatul 'Ulama) dari Masyumi tahun 1952 dan munculnya partai-parati lain, termasuk IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang didirikan oleh Nasution pada tahun 1954, hingga mencapai puncak pada Pemilu 1955.

Partai-partai di atas, seperti juga periode sebelumnya mendasarkan diri pada ragam ideologi yang berbeda. Perbedaan yang sangat penting dengan banyak partai politik sebelumnya adalah orientasi atau arah perjuangan masing-masingnya tidak lagi bersifat keluar, yakni perjuangan mewujudkan kemerdekaan atau melawan imperialisme dan kolonialisme, tetapi lebih ke dalam, berupa perjuangan untuk meraih kekuasaan politik negara. Implikasi yang timbul sebagai akibat dari banyaknya partai, adalah banyaknya ragam ideologi dan terjadinya perubahan orientasi atau arah perjuangan partai-partai. Salah satu yang terpenting di antaranya adalah terjadinya instabilitas pemerintahan yang ditunjukkan dengan sangat jelas dari jatuh bangunnya kabinet dalam waktu yang sangat singkat. Tidak kurang dari 25 kabinet yang terbentuk selama periode sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan usia antara 1 sampai 23 bulan.

Partai politik sendiri menyadari peran negatifnya bagi stabilitas sistem politik dan pemerintahan, tetapi terlambat. Pada 12 Desember 1964 lewat pertemuan di Bogor mampu menghasilkan “Deklarasi Bogor” yang mengungkapkan kesadaran partai politik untuk memupuk “persatuan nasional yang progresif-revolusioner berporoskan Nasakom.” Deklarasi juga menegaskan bahwa masing-masing partai politik tidak diperbolehkan menginterpretasikan ajaran atau keyakinan golongan lain dan agar setiap persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Tetapi tampaknya, Deklarasi Bogor tidak pernah bisa efektif dalam membendung sengketa berkepanjangan lintas parpol. Inilah salah satu alasan yang kemudian digunakan oleh pemerintahan Orba (Orde Baru) untuk melakukan langkah pembengarusan secara total partai politik seperti

tercermin dari tulisan Ali Murtopo, salah satu pembantu utama Presiden Soeharto di era Orba. Masa keemasan partai-partai mengalami periode surut setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini merupakan jalan keluar dari kemelut di Konstituante yang gagal mencapai kata sepakat mengenai Dasar Negara. Konstituante adalah hasil pemilu 1955 yang oleh banyak kalangan disebutkan sebagai pemilu paling demokratis. Hasil Pemilu 1955 melahirkan konfigurasi ideologis antara pendukung Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai dasar negara. Dari 544 anggota Konstituante yang berasal dari 34 Parpol, pendukung Pancasila adalah 274, Islam 230, dan pendukung gagasan ideologi sosial-ekonomi berjumlah 10. Di samping sebagai respons atas kegagalan Konstituante, Dekrit ini sendiri mencerminkan kekecewaan yang luas mengenai perilaku partai politik selama periode Demokrasi Liberal (1945 –1957). Kekecewaan ini terungkap dengan baik dalam tulisan Bung Karno dan Bung Hatta pada tahun-tahun ini.

Selepas Dekrit, Bung Karno mulai mengambil langkah-langkah penting ke arah penataan partai politik. Pada tahun 1959 dikeluarkan Penpres (Penetapan Presiden) No. 7 yang mengatur mengenai syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Hal ini diikuti oleh keluarnya Penpres No. 13 yang mengatur pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. PSI dan Masyumi karena keterlibatan sejumlah tokoh utamanya dalam pemberontakan PRRI/Permesta dibubarkan. Melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 128 Tahun 1961, Sementara diberi pengakuan terhadap 8 parpol, masing-masing PNI, NU, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), Partai Murba, PSII (Partai Sjarikat Islam

Indonesia), IPKI dan PKI. Selanjutnya melalui Kepres No. 440 Tahun 61 diakui Parkindo dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Sedangkan melalui Kepres No. 129 Tahun 1961 partai PSSI Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo tidak diakui.

Pada 14 April 1961, pemerintah mengeluarkan pengumuman yang hanya mengakui adanya 10 partai politik, masing-masing PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, Murba, dan IPKI. Di antara partai-partai, hanya PKI yang dapat efektif menjalankan fungsinya sebagai parpol selama periode ini karena digunakan Bung Karno sebagai kekuatan penyeimbang AD (Angkatan Darat) yang sudah menjadi kekuatan politik yang utama. Perubahan kepartaian dan diperkenalkannya golongan fungsional diikuti oleh terjadinya perubahan konstelasi politik. Partai politik mengalami masa surut yang serius, sementara parlemen mengalami disfungsi. Perubahan parlemen terpenting terjadi ketika Bung Karno membubarkan parlemen pada 5 Maret 1960 karena adanya penolakan parlemen atas rencana anggaran yang diajukan pemerintah. Hal ini diikuti oleh rencana pendirian DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang sesuai dengan konstruksi Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dimana sebagian anggotanya adalah golongan fungsional. DPR-GR akhirnya dibentuk pada Juli 1960 terlepas dari adanya penentangan sejumlah partai politik dan tokoh yang membentuk “liga demokrasi”. Liga ini terdiri dari partai Katolik, Masyumi, PSI dan IPKI yang mendapatkan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD, Bung Hatta, dan sejumlah tokoh NU dan PNI. DPR-GR beranggotakan 263 orang dimana 132 anggota berasal dari golongan fungsional, diantaranya 7 wakil

AD (Angkatan Darat), 7 wakil AU (Angkatan Udara) dan AL (Angkatan Laut), 5 polisi dan selebihnya dari organisasi seperti Sobsi (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), Sarpubri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia), Pemuda rakyat, dan sebagainya.

Sekalipun langkah menyederhanaan partai dan pengurangan peran partai politik yang diwujudkan dalam bentuk masuknya golongan fungsional di lembaga perwakilan telah dilakukan Bung Karno, ternyata belum cukup ringkas untuk dapat mengelola kemajemukan ideologi dan politik Indonesia. Alfian, salah seorang ilmuwan politik terkemuka pada tahun 1980-an menegaskan bahwa salah satu sebab kegagalan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) adalah kegagalan Bung Karno dalam mewujudkan penyederhanaan partai politik. Memasuki era pemerintahan Orba kehidupan kepartaian dan parlemen mengalami masa yang paling sulit. Berangkat dari pengalaman konflik berkepanjangan masa lalu, diikuti oleh adanya kebutuhan pemerintahan Orba untuk memonopoli dukungan politik masyarakat, langkah-langkah politik penting dilakukan. Pengaturan kepartaian periode ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik dan sekaligus dukungan yang kuat bagi pemerintah guna pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan Orba memulai penataan kepartaian dengan rehabilitasi Murba dan didirikannya Parmusi sebagai wadah peleburan ormas-ormas Islam sambil menolak tuntutan Masyumi. Pada saat yang bersamaan membentuk Golkar (Golongan Karya) sebagai mesin politik rezim. Penggunaan nama Golkar sendiri penting karena pemerintah berusaha untuk menghindari penggunaan kata “parpol

(partai politik)” guna membenarkan diri sendiri bahwa kekuatan ini tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas instabilitas politik di masa lalu. Landasan legal bagi penataan kepartaian juga disiapkan, yakni melalui Tap MPRS XII/MPRS/66 tentang Kepartaian. Dalam Tap ini disebutkan agar pemerintah bersama DPR-GR segera membentuk UU mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Inti utama dari penataan kepartaian terletak pada, mengutip Ali Murtopo, “perombakan sikap dan pola kerja menuju orientasi pada program”. Dengan kata lain, deideologisasi merupakan inti utama dari penataan kepartaian. Langkah awal pemerintahan Orba adalah berupa pelarangan penggunaan ideologi oleh parpol, kecuali dalam bentuk azas ciri yang mencapai puncaknya dengan penerapan asas tunggal Pancasila yang ditafsirkan menurut kepentingan kekuasaan pemerintahan Orba, dalam UU No. 3 Tahun 1982 disebutkan, partai politik dan Golongan Karya berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas, dan diindoktrinasi ke dalam masyarakat melalui program penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang bersifat masif dan menghukum. Implikasinya sangat serius, terutama bagi PNI yang sarat ideologis karena membenturkan Marhaenisme dan Pancasila sebagai dua hal yang bertentangan yang melahirkan banyak persoalan politik dan psiko-politik di dalam PNI.

Inti kedua penataan kepartaian selama pemerintahan Orba adalah penyederhanaan kepartaian dari 10 menjadi 3, yakni Golkar, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Dua partai terakhir merupakan hasil fusi yang dipaksakan setelah melalui proses selama

kurang lebih 3 tahun, baik di balik layar maupun di parlemen. PDI berfusi pada 10 Januari 1973 sementara PPP pada 5 Januari 1973 setelah adanya ancaman pembubaran oleh Presiden Soeharto sebelum 11 Maret 1973.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa fusi memang mampu mengurangi konflik dan pertentangan politik di tingkat pemerintahan dan sistem politik. Tetapi pada prinsipnya hanya merupakan pengalihan dari konflik politik nasional di masa lalu menjadi konflik dalam tubuh parpol. Jika pola konflik PPP dan PDI selama periode Orba diperhatikan, pada prinsipnya merupakan miniatur dari konflik politik nasional di masa lalu. Intinya terlihat bahwa konflik politik nasional yang identik dengan persaingan di luar partai yang diwujudkan dengan persaingan banyak partai, kemudian konflik itu diredam dengan jalan memindahkan konflik kedalam lingkungan partai itu sendiri yang dibentuk oleh pemerintahan Orba.

Inti ketiga dari penataan kepartaian adalah pengisolasian atau pemutusan hubungan antara partai dan para pendukungnya. Hal ini dilakukan melalui konsep massa mengambang (*floating mass*) dimana kepengurusan partai politik, yang dalam prakteknya hanya berlaku bagi PPP dan PDI, dilarang untuk berada di bawah Kabupaten. Dengan format seperti ini yang terjadinya bukanlah massa mengambang, tapi justru partai politik (PDI dan PPP) mengambang. Isolasi juga dilakukan terhadap pegawai negeri lewat pembentukan Kokar Mendagri (Korps Karyawan Kementrian Dalam Negeri) dan diperkenalkannya konsep monoloyalitas yang intinya melarang PNS terlibat dalam partai politik, tapi sepenuhnya memberikan dukungan pada Golkar. Perubahan-perubahan ini

membuat partai politik, terutama yang berbasiskan masyarakat bawah dan birokrasi, PNI misalnya, mengalami kebangkrutan secara total. Karena terputusnya akses dan komunikasi kedua basis utama partai politik. Keterpurukan parpol semakin dalam karena UU No. 3 Tahun 1975 yang mengatur secara sangat ketat kehidupan partai politik dan memberikan kewenangan yang sangat besar pada Presiden. Salah satu contoh dari UU No. 3 Tahun 1975 adalah pada Pasal 7 (a) yang berisi Partai politik diwajibkan melaksanakan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila, serta Pasal 12 tentang berbagai larangan. Sementara Presiden diberi hak untuk membekukan pengurus partai politik/Golkar, hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 14. Dengan ini landasan legal bagi tindakan-tindakan legal tersedia dengan sangat kuat. Penataan secara legal di atas masih diikuti oleh langkah-langkah politik yang intinya mengkerdikan partai politik dari waktu ke waktu. Intervensi, adu domba, represi, manipulasi, dan bahkan kekerasan dialami oleh aktivis partai selama ini yang dilakukan baik oleh jajaran militer maupun birokrasi sipil, terutama selama pemilu dan pada saat pelaksanaan agenda-agenda partai seperti Munas (Musyawarah Nasional), Kongres, Konferda (Konfrensi Daerah), dan sebagainya. Hasil akhirnya adalah partai politik kehilangan semua fungsi kecuali sebutannya sebagai partai politik. PPP dan PDI, dalam prakteknya selama Orba tidak lebih dari semacam anak cabang atau ranting dari pemerintah yang jauh dari fungsinya sebagai agregator dan artikulator kepentingan masyarakat. Dalam kaitannya dengan parlemen, perubahan-perubahan besar juga terjadi. Sejak awal pengendalian atas parlemen dilakukan Orba melalui pergantian anggota DPR-GR dan MPRS (Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara) oleh orang-orang yang mendukung kekuatan pemerintahan Orba. Rancangan komposisi keanggotaan parlemen dibuat untuk menjamin kekuatan mayoritas tetap berada di bawah kendali penguasa, sekalipun pemilu secara teratur dilaksanakan. Sebagai contoh, $\frac{1}{3}$ plus satu anggota MPR diangkat secara langsung oleh Presiden. Dengan ini, pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang penting tidak akan pernah terjadi tanpa Presiden. Lewat rancangan kelembagaan DPR/MPR telah mengantongi lebih dari $\frac{1}{3}$ suara. Hal ini semakin diperburuk oleh berbagai kecurangan, intimidasi, dan sebagainya selama pemilu yang menyebabkan PDI dan PPP tidak mungkin mendapatkan suara yang signifikan.

b. Proses Menuju Fusi Lima Partai

PDI yang nantinya menjadi PDI Perjuangan dapat diibaratkan sebagai “anak haram” yang kelahirannya tidak dikehendaki, tapi tak terhindarkan. Keharusan bagi pemerintahan Orba untuk membangun citra diri sebagai rezim demokratis mengharuskan untuk menerima ide tentang partai politik. Akibatnya, kehadiran PDI bukannya dalam kerangka untuk merealisasi komitmen bangsa untuk menjadi sebuah sistem politik yang demokratis, tapi justru untuk memenuhi secara simbolik status Indonesia sebagai negara demokratis, karena mempunyai parpol dan parlemen di mata internasional.

PDI merupakan fusi dari 5 parpol, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang sangat berbeda. PNI adalah partai yang dibentuk di

Kediri pada 29 Januari 1946 yang merupakan fusi dari Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), PNI Pati, PNI Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, PNI Palembang, PNI Sulawesi, Partai Republik Indonesia (PRI) Madiun, serta beberapa partai lokal kecil lainnya. Fusi dilakukan ketika diselenggarakannya Kongres Serindo I di Kediri, 29 Januari sampai 1 Februari 1946. Partai ini berasaskan *Self Help* (bekerja menurut kemampuan sendiri baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya), Non-Kooperatif, dan Sosio Demokrasi atau Marhaenisme yang merupakan suatu azas atau ideologi dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Karno yang ditujukan untuk menghapuskan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Penggunaan azas ini mencerminkan keinginan para pendirinya untuk mengasosiasikan diri dengan Bung Karno sebagai pendiri PNI di masa lalu. Massa pendukung PNI terutama adalah kaum abangan, seperti disebut J. Elisio Rocamora dalam bukunya yang berjudul *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1945-1966*, di mana PNI memiliki sistem *patron-client* dan memiliki massa petani non radikalisme. Sumber dukungan pedesaan ini terutama bertumpu pada elit desa (para pamong dan lurah) dan juga birokrasi pemerintahan. Partai ini adalah partai massa, bukan partai kader atau partai program, karenanya massa aksi menjadi salah satu alat politik penting. Tujuan PNI adalah mewujudkan masyarakat sosialis, yakni suatu masyarakat yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. PNI adalah partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 1955, yakni sebanyak 8.434.653 suara untuk Pemilu Anggota DPR, dan sebanyak 9.070.218 untuk Pemilu Anggota Dewan Konstituante. Karenanya, aturan tak tertulis yang disepakati dalam proses

fusi memberikan hak utama kepada tokoh PNI untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI.

Parkindo adalah partai kedua terbesar dalam PDI menurut hasil Pemilu 1955. Partai ini didirikan pada 18 November 1945 sebagai respons atas Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Partai ini merupakan fusi dari sejumlah partai Kristen lokal seperti Partai Kristen Indonesia (Parki) di Sumut, Partai Kristen Nasional di Jakarta, Persatuan Masehi Indonesia (PMI), Partai Politik Masehi (PPM) di Pematang Siantar. Partai ini mendasarkan legitimasi dan identitasnya pada agama, yakni Kristen yang merupakan kelompok minoritas permanen dalam konstelasi politik nasional. Paham kekristenan dijadikan sebagai azas partai. Basis dukungan partai ini menyebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Timor, Minahasa, Toraja, dan sebagainya. Sebagai partai pemenang pemilu kedua terbesar yang bergabung dalam PDI, partai ini diberi hak atas posisi Sekjen dalam struktur PDI. Partai Katolik dibentuk pada 12 Desember 1945 dengan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) dan merupakan kelanjutan dari Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada masa belanda, PPKD karena kebutuhan siasat politik bergabung dengan *Indische Katholieke Partij*. Ketuhanan Yang Mahasa Esa, Pancasila, dan azas kekatolikan ditempatkan sebagai azas partai. Sementara “kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyat” ditempatkan sebagai tujuan partai. Dukungan sosial partai ini adalah umat Katolik yang menyebar di sejumlah daerah. Partai ini adalah pemenang ketiga terbesar Pemilu 1955 yang berfusi dalam tubuh PDI. Karenanya konsensus dalam proses fusi memberikan hak atas jabatan Bendahara bagi parpol ini.

Murba didirikan oleh Tan Malaka pada 3 Oktober 1948 sebagai gabungan dari partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Murba sebagai sebuah istilah mengacu pada “golongan rakyat yang terbesar ... yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri”. Istilah ini kurang lebih sama dengan istilah proletar, akan tetapi seperti ditegaskan dalam dokumen Kementerian Penerangan, hal tersebut memiliki sejarah hidup, corak dan musuh yang berbeda dengan proletar. Murba sebagai ideologi berbeda dengan Marhaenisme Bung Karno karena adanya pengakuan Bung Karno atas kepemilikan alat-alat produksi oleh kaum marhaen, sekalipun dalam skala yang sangat kecil dan subsisten. Azas Murba adalah anti fasisme, sebuah paham yang dikembangkan oleh Jepang dan Italia sebelum perang Dunia II, anti imperialisme dan anti kapitalisme. Tujuan partai ini adalah masyarakat sosialis. Dari sudut basis sosial, pendukung Murba sulit diidentifikasi. Murba hanya mendapatkan sedikit dukungan di Jawa Barat dalam Pemilu 1955 dan tidak mendapatkan satu pun kursi. Sedangkan IPKI dibentuk oleh tokoh-tokoh yang umumnya berasal dari lingkungan TNI. Awalnya partai ini merupakan “kumpulan pemilih” yang berinisiatif untuk menghimpun tenaga-tenaga pejuang kemerdekaan, terutama dari lingkungan TNI AD untuk memelopori perjuangan rakyat setelah revolusi fisik. IPKI berdiri pada 20 Mei 1954, satu setengah tahun sebelum Pemilu 1955 dan dimotori oleh Nasution yang pada waktu itu berada dalam status hukuman oleh Bung Karno sebagai akibat dari “Peristiwa Oktober 52”, sebuah peristiwa di mana TNI mencoba untuk memaksa Bung Karno dengan mengarahkan meriam ke istana negara untuk membubarkan parlemen yang dinilai Nasution dan kawan-

kawan mencampuri urusan TNI. Tujuan partai ini adalah mengakhiri dan melenyapkan seluruh penderitaan rakyat, lahir dan batin. Juga memberikan hikmah rohaniah dan jasmaniah kepada seluruh rakyat dengan menjamin keselamatan, ketentraman dan kemakmuran. Dalam dokumen partai disebutkan bahwa IPKI menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan pemimpinnya, dan menempatkan diri sebagai “penyambung lidah golongan berkuasa” dan sekaligus “pengabdikan rakyat yang jujur dan setia”.

Fusi lima partai politik berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang PDI Perjuangan. Beberapa fenomena penting sebelum fusi dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Proses ke arah fusi merupakan inisiatif Presiden yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian konsultasi antara Presiden dengan tokoh-tokoh partai politik. Konsultasi pertama dilakukan secara kolektif dengan tokoh-tokoh dari 9 parpol pada 7 Januari 1970. Dalam kesempatan ini, Presiden melontarkan gagasan pengelompokan partai politik ke dalam dua kelompok, masing-masing menekankan pada aspek materiil dan spirituil. Dengannya, akan terbentuk dua kelompok, materiil-spirituil dan spirituil-materiil. Dalam pertemuan ini juga terungkap bahwa ide tersebut berkaitan dengan keinginan Presiden untuk menciptakan stabilitas yang disebutkan sebagai tanggung-jawab bersama, terutama untuk meredam konflik menjelang pemilu 1971.

Pertemuan lebih khusus dengan lima partai politik yang dianggap sebagai wakil dari “kelompok materiil-spirituil –dilakukan Presiden pada 27 Februari 1970, di mana, di samping mengulangi pokok-pokok pikiran pertemuan pertama,

juga menegaskan perlunya ada penyederhanaan cara kerja dan berfikir dengan mengambil bentuk up-konfederasi parpol, yakni iden tentang tidak ada kepengurusan baru kecuali dalam bentuk dewan ketua-ketua umum parpol yang dibantu oleh sebuah badan pekerja sebagai *brain trust*. Dalam perkembangannya, gagasan Presiden melahirkan polarisasi dalam parpol. Ada yang mendukung karena dinilai sebagai tuntutan obyektif ataupun sebagai pilihan taktis, tapi ada pula pihak yang menolak. Bahkan, di antara yang menerima ada yang siap dengan usulan kongkrit.

Sesaat selepas konsultasi dengan Presiden, berkembang isu yang sangat kencang bahwa Presiden akan membubarkan beberapa partai politik sebelum 11 Maret 1970 jika pihak dari partai-partai politik gagal merealisasikan ide Presiden. Sebagai respons atas rumor ini, tokoh-tokoh lima parpol, antara lain, Hardi dan Gde Djaksa (PNI), Akhmad Sukarmadidjaja (IPKI), VB Da Costa, Lo Ginting dan Harry Tjan (Partai Katolik), Maruto Nitimihardjo dan Sukarni (Murba), dan M. Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo) melakukan pertemuan pada 7 Maret 1970 untuk membicarakan soal-soal sekitar pengelompokan partai-partai. Pada pertemuan kedua 9 Maret 1970, di tempat yang sama, yakni ruang kerja wakil ketua MPR, Siregar, Jl. Teuku Umar No. 5 Jakarta, dimatangkan draft Pernyataan Bersama yang telah disiapkan Hardi dan draft-draft perbaikan dan tambahan yang disiapkan Murba dan IPKI. Untuk itu pertemuan 9 Maret 1970 menyepakati pembentukan Panitia Perumus yang terdiri dari Mh. Isnaeni (PNI), M. Supangat (IPKI), Murbantoko (Murba), Lo Ginting (Partai Katolik), dan Sabam Sirait (Parkindo) yang mampu menyelesaikan rumusannya saat itu juga.

Selanjutnya, tokoh-tokoh lima partai politik mengeluarkan sebuah Pernyataan bersama, yang dilaporkan pada Presiden pada 12 Maret 1970 di mana dalam pertemuan ini Presiden menampik adanya rencana pembubaran partai politik yang mana isu tersebut sebelumnya telah beredar. Pernyataan Bersama memuat dua hal, yakni:

1. Kesiediaan untuk melakukan kerjasama untuk kepentingan nasional.
2. Hal-hal yang menyangkut dasar, sifat, pengorganisasian, program kerja, prosedur dan nama kerjasama, akan ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pada tanggal 24 Maret pertemuan lima tokoh partai politik kembali digelar di ruang kerja Siregar. Hadir antara lain, Hardi dan Usep Ranuwidjaja (PNI), M. Siregar, JCT Simorangkir dan Sabam Sirait (Parkindo), VB Da Costa, Lo Ginting dan Duriat (Partai Katolik), Maruto Nitimihardjo (Murba) serta Akhmad Sukarmadidjaja dan Mustafa Supangat (IPKI). Pertemuan ini berusaha memformulasi secara lebih kongkrit butir kedua pernyataan bersama. Soal nama kelompok muncul banyak gagasan, misalnya “Kelompok Demokrasi Kesejahteraan”, “Kelompok Kesejahteraan Kerakyatan” (usulan partai Katolik), “Kelompok Gotong Royong” (usulan Murba), “Kelompok Pembangunan” (usulan IPKI), “Kelompok Nasionalis (usulan PNI). “Kelompok Demokrasi dan Pembangunan (usulan Parkindo)”. Sedangkan mengenai bentuk dan sifat kerjasama muncul ide mulai dari konfederasi, aliansi, koalisi, liga, ataupun badan kerjasama. Setelah melalui perdebatan, akhirnya disepakati nama kelompok adalah Demokrasi Pembangunan dalam rangka perwujudan Badan Kerjasama

yang isinya konfederasi. Dengan demikian nama resmi yang diberikan adalah Badan Kerja Sama Demokrasi Pembangunan atau banyak dikenal sebagai Kelompok Demokrasi Pembangunan. Pertemuan juga menetapkan dua kontak person kelompok, masing-masing Hardi dan Siregar.

Selama pertemuan tokoh lima partai politik, kecemasan akan terjadinya polarisasi politik nasional ke dalam dua kubu muncul sangat kuat. Terjadi silang pendapat bagaimana mengeliminir hal tersebut, termasuk gagasan menyertakan salah satu partai politik Islam dalam pengelompokan yang ada. Tetapi akhirnya ditemukan jalan keluar, yakni dengan menempatkan “prinsip keterbukaan bagi semua kekuatan sosial politik (sospol) dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan nasional” sebagai prinsip dasar pengelompokan. Di samping itu, energi banyak dihabiskan untuk mendiskusikan bentuk pengelompokan, yang dimulai dari bentuk kerjasama ringan yang ditawarkan oleh Hardi, sampai pada gagasan *stembus accoord* (penggabungan suara partai yang tidak lolos *parliamentary threshold*) dalam pemilu 1971 yang diusulkan Siregar. Menjelang pelantikan anggota DPR, 28 Oktober 1971, Presiden kembali mengundang tokoh-tokoh partai politik, termasuk Golkar. Pertemuan berlangsung dua kali, 6 dan 8 Oktober 1971. Agenda pembicaraan menyangkut DPR (pelantikan pembagian fraksi, masalah voting, dan sebagainya). Agenda kedua adalah pengelompokan partai politik dalam rangka penyederhanaan kepartaian di mana Presiden menghendaki hanya akan ada tiga bendera untuk pemilu 1976. Di antara dua tanggal di atas, yakni 7 Oktober, dilakukan pertemuan tokoh lima parpol di rumah Hasjim Ning (IPKI) di mana Parkindo dan Partai Katolik menyetujui masuknya salah satu

partai Islam ke dalam pengelompokan guna menghindari polarisasi nasional. Sementara menyangkut gagasan fraksi, disepakati untuk membentuk yang dinamakan fraksi bersama, yang kemudian disampaikan pada pertemuan 8 Oktober 1971 kepada Presiden.

Pada tanggal 25 Oktober 1971, sekali lagi, pertemuan antara Presiden, perwakilan parpol, Golkar, dan ABRI di DPR terjadi. Fokus pembicaraan diarahkan pada pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi dan juru bicara masing-masing. Mengenai pimpinan DPR, partai politik mengusulkan agar diberikan pada partai politik dengan suara terbanyak, dan secara langsung Soeharto menunjuk Idham Khalid. Sementara mengenai Wakil Ketua DPR, Presiden mengusulkan adanya empat orang mewakili masing-masing fraksi, dan menunjuk nama-nama Irjen (Pol) Domo Pratomo sebagai Wakil Ketua asal Fraksi ABRI, Isnaeni (Kelompok KDP), Sumiskun (Golkar), J. Naro (Kelompok Persatuan Pembangunan). Terjadi penundaan pembicaraan soal ini. Presiden juga menetapkan juru bicara masing-masing fraksi guna memperlancar pemilihan pimpinan, dan dari KDP (Kelompok Demokrasi Pembangunan) ditunjuk tiga orang, Harjantho, Da Costa, dan Tahamata.

Pada tanggal 27 Oktober 1971 atas prakarsa partai yang punya anggota di DPR (IPKI dan Murba tidak mendapat kursi), dilakukan pertemuan di rumah Sunawar Soekowati, di Jl. Sriwijaya 46, Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan sebuah dokumen “Pernyataan Bersama” yang ditujukan kepada Ketua Sementara DPR tentang tiga hal:

1. Terbentuknya Fraksi Kelompok Demokrasi Pembangunan di DPR dengan nama Fraksi Demokrasi Pembangunan
2. Mengusulkan Mh. Isnaeni sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi KDP.
3. Menunjuk Drs. Hardjantho, Da Costa, SH serta Tahamata sebagai juru bicara Fraksi KDP dalam mengurus segala persoalan dengan Ketua Sementara DPR.

Pertemuan juga menghasilkan keputusan-keputusan dalam bentuk instruksi kepada organ lima parpol di daerah-daerah untuk melakukan langkah yang sama. Juga dibentuk Panitia Lima guna menyusun draft struktur organisasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan KDP. Pada tanggal 28 Oktober 1971, masing-masing ketua lima parpol menandatangani Pernyataan Pengukuhan, yakni mengukuhkan Pernyataan Bersama 9 Maret 1970 dan menyatakan kesediaan untuk membentuk fraksi bersama di DPR.

Di samping itu pertemuan menyisakan tiga masalah yang dituangkan dalam bentuk memorandum untuk dibicarakan kembali, masing-masing masalah dwi partai, status keanggotaan perorangan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai anggota KDP dan masalah HAM. Diperlukan waktu cukup lama untuk dapat mewujudkan kesepakatan di atas, yakni dengan disepakatinya Ketentuan-Ketentuan Pokok Kelompok Demokrasi Pembangunan, 8 Maret 1972. Ini merupakan hasil dari serangkaian pertemuan, masing-masing pertemuan Panitia Lima tanggal 3 dan 10 November 1971, serta 16 Desember 1971, pertemuan pimpinan parpol 15 dan 26 November 1971, serta 3 dan 14 Januari 1972, dan 8 Februari 1972.

Pada 17 Maret 1972 berhasil dibentuk sebuah organ kepemimpinan tingkat pusat dari KDP yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP). Pimpinan diberikan kepada Isnaeni sementara wakilnya adalah Sukarmadidjaja. Anggota-anggota unsur pimpinan terdiri dari Sukarmadidjaja, Hasjim Ning dan AP Tanri (IPKI), Ben Mang Reng Say, FC Palaunsoeka dan R.G Duriat (Partai Katolik), JCT Simorangkir, ZJ Manusama dan A. Wenas (Parkindo), dan Isnaeni, Sunawar Sukowati dan Hardjantho Sumodisastro. Sementara untuk kesekjenan dijabat oleh Wignyosumarsono dan Sabam Sirait sebagai Sekretaris dan Wakil, dengan lima orang anggota yang nantinya secara bergiliran menjadi sekretaris dan wakil sekretaris, masing-masing WA Chalik (IPKI), Wignjosumarsono (Partai Katolik), Sabam Sirait (Parkindo), John Pakan (Murba), dan A. Madjid (PNI). Terdapat 4 biro, masing-masing Biro Politik, Biro Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Biro Kesra, dan Biro Umum.

c. Fusi dan Perkembangan Awal PDI

Sesi ini memberikan gambaran mengenai momentum, peristiwa, figur dan hasil-hasil penting sesaat sebelum dan selepas fusi 10 Januari 1973. Dengan demikian, sesi ini mendiskusikan proses fusi dan perkembangan awal selepas fusi hingga Kongres Surabaya. Kisah perjalanan konflik berkepanjangan yang dialami oleh PDI sebagai langkah berkembangnya partai.

Terbentuknya fraksi bersama tidak secara otomatis membawa lima partai politik ke arah fusi. Terlampau banyak perbedaan dalam partai yang sulit diselesaikan. Terdapat perbedaan luar biasa dalam cara untuk fusi. PNI misalnya, mengusulkan mekanisme pemilu sebagai cara untuk mengurangi jumlah partai

politik, posisi ini terus bertahan hingga pertemuan 8 Januari 1973 dengan Pangkopkamtib, Jenderal Sumitro. Tetapi, partai politik kecil menolak gagasan ini karena eksistensinya akan berakhir. Karenanya, proses ke arah fusi menjadi sangat tidak jelas. Bahkan Parkindo dan Partai Katolik, atas prakarsa Kasimo dan Da Costa, merencanakan melakukan kerjasama bahkan hingga tingkat sebagai partai yang diberi nama Partai Kristen Demokrat. Sebagai langkah awal untuk melakukan fusi yang lebih luas dengan partai lain, tetapi gagasan ini tidak pernah terealisasi.

Karena lambannya proses fusi, pemerintahan Orba melakukan berbagai rekayasa untuk mempercepat kebijakan “hanya tiga bendera” dalam pemilu berikutnya. Dan rekayasa ini dimulai dengan penggarapan daerah-daerah oleh pemerintah untuk melakukan fusi di lokal masing-masing. Di bawah tekanan fusi daerah-daerah yang disponsori pemerintah, pimpinan KDP mengeluarkan SK No. 42/KD/1972, 24 Oktober 1972 yang menegaskan bahwa kemungkinan ke arah fusi sementara dirintis.

Dalam perkembangannya, fusi tidak bisa dielakkan. Karenanya pimpinan partai politik mulai melakukan serangkaian pertemuan. Dalam berbagai pertemuan, tiga kemungkinan nama muncul, masing-masing:

1. Partai Demokrasi Pancasila
2. Partai Demokrasi Pembangunan.
3. Partai Demokrasi Indonesia.

Akhirnya nama terakhir yang disepakati dengan kesadaran bahwa “demokrasi Indonesia” merupakan suatu kesatuan pengertian.

Setelah melewati proses melelahkan, akhirnya pada 10 Januari 1973, tepat pada pukul 24.00, Deklarasi Fusi ditandatangani oleh wakil masing-masing parpol, yakni Mh. Isnaeni dan A. Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Ben Mang Reng Say dan FX. Wignjosumarsono (Partai Katolik), A. Sukarmadidjaja dan M. Sadrie (IPKI) dan S. Murbantoko dan J. Pakan (Murba). Hasil fusi disiarkan secara luas lewat konferensi pers tanggal 11 Januari yang dipimpin Ben Mang Reng Say dan didampingi oleh Isnaeni, Wenas, Sukarmadidjaja, dan Murbantoko.

Pada tanggal 13 Januari 1973 dibentuk Majelis Pimpinan Pusat (MPP) di mana masing-masing unsur diwakili 5 orang dan sekaligus dibentuk DPP yang terdiri dari 11 orang dengan komposisi unsur 3:2:2:2:2 dimana posisi Ketua Umum diberikan pada PNI dan Sekjen Koordinator pada Parkindo sesuai dengan urutan perolehan suara Pemilu 1955.

Tabel 4. Susunan DPP PDI Tahun 1973

No.	Susunan DPP PDI	
1	Ketua Umum	Mh. Isnaeni
2	Ketua	A. Sukarmadidjaja
3	Ketua	Ben Mang Rey Say
4	Ketua	A. Wenas
5	Ketua	Sugiarto Murbantoko
6	Ketua	Sunawar Sukowati
7	Sekjen Koord	Sabam Sirait
8	Sekjen	W.A. Chalik
9	Sekjen	FS. Wignjosumarso
10	Sekjen	John Pakan
11	Sekjen	Abdul Madjid

Sumber : www.pdiperjuangan.id

DPP dilengkapi oleh lima departemen dengan satu ketua dan satu wakil, masing-masing Departemen Politik (Usep Ranuwidjaja dan John Pakan,

Departemen Ekubang/Kesra (Sukarmadidjaja dan Sabam Sirait), Departemen Penerangan (Wenas dan Samosir), Departemen Pendidikan Kader/Pembinaan Massa (A. Madjid), dan Departemen Organisasi (Wignjosumarsono dan Tagor Harahap).

Setelah pengurus terbentuk, pada 17 Januari 1973 DPP menghadap Presiden guna melaporkannya, yang disambut gembira. Langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi ke daerah-daerah dan untuk itu dibentuklah 8 tim, dengan wilayah kerja yang sudah ditetapkan. Tim dengan cepat mampu menyelesaikan tugasnya di 26 propinsi dengan terbentuknya DPD-DPD, yang terakhir disahkan tanggal 11 Juli 1973, yakni DPD Maluku.

Pada tingkat DPC terjadi cukup banyak hambatan. Pada tahun 1973 sebanyak 154 cabang berhasil dibentuk. Pada tahun 1974 hanya 77. Tahun 1975, 20 cabang dan tahun 1976 hanya 6 cabang. Dan berdasarkan hasil rapat 28 November tahun 1975, dikeluarkan Instruksi No. 383/IN/D/DPP/XI/1975 untuk “segera membentuk Komisaris dan Komisaris Pembantu di setiap Kecamatan dan desa”.

Dalam diktum ketiga deklarasi ditegaskan pembentukan tim guna menyusun AD (Anggaran Dasar), struktur dan prosedur organisasi. Tim akhirnya dikenal dengan Tim 10 yang ditugaskan menyusun Piagam Perjuangan Partai, AD/ART serta Program Perjuangan Partai. Tim diketuai Sunawar yang kemudian digantikan oleh Sudjarwo karena Sunawar diangkat sebagai Dubes di Vietnam. Nama-nama Tim adalah Sadjarwo (PNI-Ketua), Simorangkir (Wakil-Parkindo), Pakan (Sekretaris-Murba). Anggota-anggota adalah Chalik, Supangat,

Wignjosumarsono, Samosir, TAM Simatupang, JB. Andries, dan MA Gowi. Hasil kerja Tim 10 akhirnya disampaikan kepada MPP yang kemudian melakukan serangkaian rapat (di rumah Hasjim Ning). Dalam Rapat MPP 5 Maret 1973 disepakati dua hal penting:

1. Menyelesaikan Piagam Perjuangan, AD, ART dan Program Perjuangan yang selanjutnya diserahkan pada DPP.
2. Setelah disahkan berdirinya DPD PDI Tingkat I dan DPD Tingkat II seluruh tanah air akan diselenggarakan suatu pertemuan yang luas dan bersifat nasional sebagai forum prosedural untuk lebih memperlancar proses pemfusi.

Antara tanggal 8 s/d 10 Juni 1973, dalam sebuah rapat maraton di Cibogo, DPP dengan mengundang Tim 10 berhasil menyelesaikan AD/ART, sementara Piagam Perjuangan dan Program Perjuangan baru bisa dikukuhkan dalam rapat MPP 19-20 September 1973.

Penyelesaian yang dicapai pada tingkat formal dan dokumen tidak dengan sendirinya membawa PDI ke arah fusi yang bersifat tuntas. Persaingan di antara tokoh lintas parpol dan tokoh satu partai politik, egoisme unsur, campur tangan pemerintah, dan sebagainya tetap mewarnai perjalanan partai politik ini. Hal ini disebabkan karena konflik bukan saja terus bertahan tapi justru semakin intensif. Secara umum sumber-sumber konflik ada beberapa hal.

Pertama, perbedaan-perbedaan latar-belakang, besaran, basis sosial, dan orientasi ideologis antar lima partai politik. Kedua, perbedaan motif dan sekaligus metode untuk fusi. Ketiga, rivalitas dan saling curiga yang kuat di antara partai

politik. Keempat, rivalitas antar elit lintas partai dan antar elit dalam satu partai. Kelima, terjadi penyempitan struktur dari lima partai politik menjadi satu yang memacu meningkatnya dinamika persaingan untuk menduduki jabatan yang semakin terbatas. Keenam, kelima hal di atas sangat diperburuk oleh ambisi rezim untuk menundukkan partai politik dan bahkan mengkerdikan partai politik. Hal ini diikuti oleh kuatnya keinginan rezim untuk mengeliminasi peran politik tokoh-tokoh yang dianggap garis keras dan jauh dari patuh pada pemerintahan Orba. Akibatnya, tekanan, manipulasi, intervensi, dan masih banyak lainnya demikian intens berlangsung.

Ada tiga siklus perkembangan PDI antara tahun 1973–1986 sebelum pembusukan total tokoh-tokoh lama dan munculnya generasi baru. Pertama, periode antara 10 Januari 1973 sampai 13 April 1976 saat berakhirnya Kongres I. Ini dapat disebut sebagai periode pemantapan fusi atau periode unifikasi, terutama karena sekalipun PDI secara legal formal sudah menjadi satu parpol, tapi dalam kenyataannya mekanisme unsur adalah mekanisme pokok yang berkembang. Upaya pemantapan dilakukan melalui Munas, 20 - 24 September 1973 yang mengambil nama Konsultasi dan Penataran Nasional (KONFERNAS), hal ini sebagai forum prosedural untuk menciptakan pra-kondisi yang sebaik-baiknya menjelang Kongres I PDI. Sebelum, bahkan tanda-tandanya sudah muncul sebelum fusi, dan selepas Konfernas, perpecahan dan konflik internal mulai menggerogoti PDI. Konflik melibatkan baik lintas unsur, tokoh lintas unsur, maupun tokoh dalam unsur atau kombinasi tokoh lintas unsur. Konflik membawa pemerintah terlibat dalam penyelesaian. Sebuah formula jaminan kepentingan

akhirnya bisa dicapai di mana figur-figur utama yang berkonflik, Isnaeni dan Sunawar, diparkir di halaman luar kepengurusan partai dan muncullah figur baru, Sanusi Hardjadinata yang oleh pemerintah dilihat sebagai jalan keluar.

Tokoh PNI (yang sudah pernah menyatakan keluar dari PDI) dari lingkungan birokrasi dan PT ini, setelah berunding dengan pemerintah dan mengajukan sejumlah syarat, termasuk menyertakan Usep Ranawidjaja dalam DPP akhirnya memimpin PDI. Sanusi yang mendapatkan dukungan luas dari daerah-daerah ini dibebani dengan apa yang dikenal sebagai “misi damai dan serasi” yang dalam kenyataannya gagal diwujudkan karena sengketa yang terus berlanjut. Kemunculan Sanusi membuat harapan bagi terwujudnya Kongres I, Kongres pemantapan Fusi mulai terbuka lagi setelah lama tenggelam dalam konflik. Beberapa kesepakatan ke arah kongres I akhirnya dicapai.

Tetapi baru pada tanggal 30 Desember 1975 rencana kongres kembali diagendakan dalam rapat DPP dan akhirnya setelah rangkaian persiapan, Kongres I dapat diselenggarakan 11 – 13 April 1976. Dalam proses kongres, dua figur kunci, Isnaeni dan Sunawar, akhirnya sepakat untuk tidak masuk ke dalam DPP dan dengan demikian Kongres I berhasil menetapkan kepengurusan baru sbb:

Tabel 5. Data DPP PDI Hasil Kongres I Tahun 1976

Ketua Umum: 1. M. Sanusi Hardjadinata	Sekjen: 1. Sabam Sirait	Bendahara Umum: 1. Sani Fenat
Ketua: 1. Usep Ranawidjaja 2. A. Wenas 3. Wignjosumarsono 4. A. Sukarmadidjaja 5. Muhidin Nasution 6. Abdul Madjid 7. JHD. Tahamata 8. FC Pelaunsuka 9. Andi Parengrengi Tanri 10. John B. Andries 11. IGN Gde Djakse 12. RG Duriat 13. Botosukardjo 14. Rasjid Sultan Radja Mas	Wasekjen: 1. Sulomo 2. B.D. Blegur 3. MB Samosir 4. Adi Tagor Harahap 5. J. Pakan 6. Andjar Siswojo 7. VB Da Costa	Bendahara: 1. MT Siregar 2. Ny Walandouw 3. Mustafa Supangat 4. Zakaria Ra'ib

Sumber : www.pdiperjuangan.id

Kedua, periode antara 1976 s/d 1981 (Kongres II). Periode ini dapat disebut sebagai periode krisis internal karena sedemikian seringnya konflik yang berakhir dengan krisis kepemimpinan melanda PDI.

Ketiga, periode antara 1981 s/d 1986 (Kongres III). Periode ini dapat disebutkan sebagai periode re-unifikasi karena tugas pokok PDI adalah menyatukan kembali unsur dan personil yang bercerai-berai. Tapi juga bisa disebut sebagai periode pemantapan ideologi karena Kongres II secara dini telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi partai.

Ternyata bukan hal mudah bagi Sanusi menjalankan roda organisasi. Konflik terus bertambah dan spektrumnya bahkan semakin meluas. PDI akhirnya terbelah ke dalam 2 kelompok besar dan dikendalikan oleh 2 DPP yang saling

berseteru. Posisi dan sikap politik Sanusi ternyata jauh dari yang diharapkan penguasa. Ia sangat sulit dikendalikan, tidak seperti yang dibayangkan. Karenanya, adalah kepentingan kekuasaan rezim Orba untuk melunakkannya. Intervensi pemerintah dalam memicu konflik internal akhirnya menjadi pilihan cara yang diambil. Isnaeni dan Sunawar kembali mendapatkan ruang politik dalam PDI dan ini membawa PDI ke arah dua DPP.

Lahir DPP ganda memberikan alasan masuk bagi pemerintah. Dengan alasan menjelang SU MPR, pemerintah akhirnya melibatkan Bakin untuk menyelesaikan masalah DPP kembar. Dalam pertemuan antara tokoh-tokoh bertikai dengan Bakin tanggal 14 dan 16 Januari 1978 disepakati skenario penyelesaian yang dikenal sebagai Penyelesaian politis 16 Januari, dimana DPP harus disusun kembali dengan melibatkan unsur kedua DPP yang bersaing. Kedua kubu akhirnya harus mengikhlaskan sejumlah pendukungnya terlempar dari kepengurusan. Konflik pun mereda untuk beberapa saat.

Tetapi usia perdamaian hanya singkat. Konflik kembali muncul ke permukaan ketika Hardjantho dan kawan-kawan yang didukung penuh oleh penguasa melakukan Munas di Pandaan, Jatim (27 - 28 Pebruari 1979) yang akhirnya terus membawa PDI ke arah konflik tanpa akhir. Menjelang Kongres II arena konflik semakin meluas. Pemicunya adalah kehendak pemerintah untuk memunculkan figur yang dibayangkan sebagai pendukung rezim, dan mengakhiri karier politik Sanusi lewat cara demokratis, yakni kongres partai. Ijin kongres yang diajukan kubu Sanusi tidak digubris rezim dan sebaliknya Sudomo menyusun kepanitiaan kongres yang secara prinsip menggambarkan komposisi

dari DPP berikutnya. Sanusi akhirnya harus berhadap-hadapan dengan pemerintah, terutama Pangkopkamtib.

Dalam kemelut yang terus berlanjut, Sanusi mengambil langkah yang kontroversial, yakni mengundurkan diri sesaat sebelum Kongres II 1981. Padahal Sanusi sudah mendapat tawaran aneka kemungkinan jabatan, mulai dari Dubes luar biasa sampai dengan presiden komisaris. Dalam surat-surat dengan Sudomo, Sanusi mengungkapkan moral dan politiknya yang tidak bisa menerima apa yang dilakukan pemerintah.

Mundurnya Sanusi membuka ruang politik yang luas bagi Kongres II untuk diselenggarakan sesuai dengan selera penguasa. Tetapi hal ini pun tidak mudah karena pada tingkat DPP, perlawanan terhadap intervensi rezim muncul dari empat tokoh kunci yang kemudian dikenal sebagai “Kelompok Empat”, tetapi akhirnya disingkirkan dari dewan. Kelompok Empat awalnya muncul dari “Kelompok Konstitusi” diantaranya Madjid-Aberson, yang mendapatkan dukungan dari Usep, Walandauw, dan Z. Ra’ib. Perlawanan Kelompok Empat akhirnya harus mengambil arena di luar partai. Dan dengan ini hambatan ke arah Kongres II tersudahi. Setelah melewati berbagai negosiasi dan “dagang sapi”, Kongres II akhirnya diselenggarakan pada 13 – 17 Januari 1981 yang menghasilkan DPP baru sebagai berikut:

Tabel 6. Data DPP PDI Hasil Kongres II Tahun 1981

Ketua Umum: 1. Sunawar Sukowati	Sekjen: 1. Sabam Sirait	Bendahara Umum: 1. MB. Samosir
Ketua: 1. Hardjantho Sumodisastro 2. A. Wenas 3. F.S. Wignjosumarsono 4. A. Sukarmadidjaja 5. M. Nasution 6. Mh. Isnaeni	Wakil Sekjen: 1. Jusuf Merukh 2. V.B. Da Costa 3. AP. Tanri 4. J. Pakan	Bendahara: 1. Notosukardjo 2. JHD. Tahamata 3. M. Supangat 4. Indra Bhakti

Sumber : www.pdiperjuangan.id

Periode ketiga adalah periode reunifikasi atau pemantapan ideologis. Berakhirnya Kongres sedikit melahirkan ketenangan sekalipun sisa persoalan sebelumnya masih belum terselesaikan. DPP baru belajar dari pengalaman bahwa kehendak penguasa tampaknya harus dinomorsatukan jika ketenangan internal partai politik ingin dicapai. Hal ini tercermin dari keputusan partai untuk mencanangkan empat komitmen yang seluruhnya menyenangkan rezim Soeharto, yakni: Komitmen terhadap pemerintahan Orba, Pengakuan atas Dwifungsi ABRI, Penyatuan diri dengan kepemimpinan nasional di bawah Soeharto, serta Partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Hal-hal di atas dianggap bagian paling strategis untuk mensukseskan “Empat Mantap PDI” yang merupakan program strategis yang sudah mulai dibicarakan selepas SU MPR, 1983, yakni usaha-usaha konsolidasi di bidang ideologi, wawasan, dan organisasi. Tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pemerintahan Orba tidak semata-mata menginginkan PDI yang patuh pada rezim, tapi lebih lagi PDI yang kerdil yang tak akan pernah menjadi pesaing apalagi ancaman bagi kelangsungan hidup kekuasaan rezim. Hal

ini akhirnya kembali membawa PDI ke dalam konflik serius yang mencapai puncaknya pada Kongres III yang akhirnya dialihkan kepada pemerintah. Hanya saja, konflik selama periode ini memiliki target yang lebih jelas, yakni sebagai cara untuk membusukkan secara total para politisi lama PDI yang dalam pengalaman rezim Orba ternyata tidak bisa dikendalikan. Untuk itu secara diam-diam sebuah lapisan generasi baru yang diyakini lebih “Orba” dalam berpikir dan bertindak yang berbasis pada Litbang PDI dipelihara sebagai kekuatan baru yang nantinya menjadi sumber rekrutmen utama untuk kepengurusan DPP pasca Kongres III. Konflik periode ini mencapai titik-titik puncak ketika gagasan Munas versus Kongres muncul. Pasca Desember 1984, setelah Sunawar dan Hardjantho didamaikan Mendagri, muncul tuntutan (dari KBGP PDI DKI Jaya) agar Kongres Luar Biasa digelar dan ini disambut dengan antusias oleh kubu Hardjantho, sebaliknya ditentang kubu Sunawar yang menghendaki Munas. Akhirnya kubu Kongres yang “memenangkan pertarungan” setelah pertemuan antara Mendagri dengan kubu yang bertikai, 5 Desember 1985, menyepakati penyelenggaraan Kongres yang akhirnya diselenggarakan pada 15 – 18 April 1986. Setelah melalui proses yang sangat alot, Kongres gagal melahirkan kepengurusan DPP baru dan akhirnya dipasrahkan kepada Mendagri untuk menyusun DPP baru. Mendagri, setelah berbagai konsultasi, akhirnya memunculkan generasi baru yang sudah disiapkan sebagai pengurus DPP dengan menyudahi secara total keterlibatan figur-figur lama. DPP hasil bentukan pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Data DPP PDI Bentukan Mendagri Tahun 1986

Ketua Umum	Drs. Soerjadi
Ketua	1. BN. Marbun 2. Sukowaluyo 3. Noor Achari 4. Yahya Nasution 5. Duddy Singadilaga
Wakil Ketua	1. Andjar Siswoyo 2. Marcel Beding 3. Parulian Silalahi 4. Fatimah Ahkmad 5. Jupri 6. Royani Haminullah
Sekjen	Nico Daryanto
Wakil Sekjen	1. Titi Yuliasih 2. Dimmy Haryanto 3. Anwar Datuk
Bendahara	Lencang
Wakil Bendahara	1. St. J. Benuhardjo 2. Stef Patrick Nafuni 3. Markus Wauran

Sumber : www.pdiperjuangan.id

Tahun-tahun awal masa kerja DPP baru berjalan normal dan mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah berakhirnya konflik. Tetapi watak kader PDI sebagai “pemberontak” terhadap rezim tidak bisa dibunuh hanya dengan menguburkan tokoh-tokoh senior. Generasi baru ini ternyata juga memendam mimpi untuk dapat independen dan sekaligus tumbuh menjadi partai besar. Dan ini dilihat sebagai ancaman bagi kelangsungan kekuasaan dan dominasi Golkar dan militer. Karenanya, sekali lagi, generasi muda yang dibayangkan sebagai lebih bisa berpikir dan bertindak dalam logika “Orba” mesti ada yang kembali dikorbankan. Konflik akhirnya muncul kembali. Puncaknya adalah Kongres Medan yang penuh dengan kekerasan dan mengakhiri karier politik Soerjadi untuk sementara, tapi kemudian dihidupkan kembali oleh pemerintahan Orba

dalam rangka menjegal Megawati Soekarnoputri, figur baru yang tumbuh secara diam-diam dan mendapatkan dukungan luas di kalangan arus bawah partai.

d. Kemunculan Megawati Sukarnoputri

Rezim Orba menginginkan karier Soerjadi di PDI segera berakhir. Sejumlah “dosa politik” terhadap Orba mengharuskan Soerjadi dikubur, sama dengan para senior partai sebelumnya. Oleh karena itu, Kongres Medan dipersiapkan dalam upaya menjatuhkan Soerjadi. Tetapi, Soerjadi memutuskan untuk melawan rencana tersebut. Akibatnya, aklamasi bagi kembali berkuasanya Soerjadi dilakukan di dalam tubuh partai. Hal ini melahirkan penentangan luas, apalagi kehendak pemerintah memang bergerak ke arah menjatuhkan Soerjadi. Kontroversi yang terus berlangsung akhirnya ditemukan jalan keluarnya lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Di luar skenario dan ekspektasi penguasa, perjalanan KLB Surabaya memunculkan figur baru yang lebih mengancam kelangsungan Orba, yakni Megawati Sukarnoputri. Karenanya, segala kemungkinan cara akhirnya ditempuh penguasa untuk menghalangi kemunculan figur ini. Tetapi dukungan arus bawah, publik dan media, serta konsistensi sikap membawa kemenangan *de facto* bagi Megawati Sukarnoputri untuk memimpin DPP PDI. Tetapi, keputusan KLB sudah tentu ditolak penguasa. Kekuatan-kekutan rezim yang berada dalam partai politik terus dimobilisasi untuk menggagalkan hal tersebut. Tapi hasilnya sangat mengecewakan bagi pihak rezim. Akhirnya, lewat proses Munas di Jakarta pemerintah dengan terpaksa harus mengakui legalitas formal Megawati Sukarnoputri sebagai pimpinan baru.

Kekalahan pemerintah Orba tidak kemudian menyurutkan niatan untuk mengkerdulkan PDI dalam kancah perpolitikan Indonesia. Segala jalan tetap ditempuh untuk menyudahi peran petinggi-petinggi baru yang dianggap berbahaya bagi pemerintah, apalagi tanda-tanda bahwa PDI akan menjadi kekuatan sangat berpengaruh mulai jelas tampak di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. Mencari figur untuk mengimbangi manuver Megawati dalam pengaruh di arus bawah bukan pekerjaan mudah. Sejumlah tokoh senior partai seperti Budi Hardjono sudah diplot. Tapi hasilnya tetap mengecewakan. Dalam kepanikan inilah figur Soerjadi kembali dilirik.

Soerjadi memiliki keunggulan. Ia sempat membangun jaringan struktur partai yang cukup solid hingga ke daerah-daerah. Kekuatan inilah yang akhirnya dipakai. Dan Soerjadi sepakat pada ide tersebut. Dalam konteks inilah, sebuah persekongkolan dibangun. Muncul tuntutan dari daerah-daerah untuk menyelenggarakan KLB untuk mengakhiri kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. Dan ini harus segera dilaksanakan, sebab Pemilu segera akan digelar. Untuk itu semua jaringan institusi teritorial tentara dan birokrasi daerah diperintahkan untuk sepenuhnya berada di balik gagasan KLB. Teror, intimidasi, iming-iming dan masih banyak lagi langkah dipersiapkan di daerah-daerah. Sementara di tingkat DPP lebih dari sebagian anggota DPP digarap. Hasilnya adalah KLB. Tapi ini justru melahirkan penentangan lebih luas. Arus bawah, media, pengamat dan berbagai komponen lainnya melakukan perlawanan serentak. Hasil akhirnya adalah DPP kembar (Dualisme DPP).

Di tingkat Jakarta dan daerah-daerah, perlawanan kolektif yang melibatkan elemen lebih luas, termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), terhadap hasil KLB muncul secara konsisten. Di tengah-tengah keputusan, cara kekerasan dijadikan pilihan oleh penguasa. Hasilnya adalah Peristiwa 27 Juli 1996 yang memakan korban jiwa dan harta benda yang besar. Peristiwa ini melahirkan kehebohan politik maha besar, bahkan hingga ke dunia internasional. Megawati Sukarnoputri dan PDI dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Godaan untuk melakukan perlawanan masif terbuka, apalagi dukungan rakyat demikian kongkrit. Tetapi akhirnya Megawati sebagai pimpinan partai memutuskan untuk menggunakan instrumen legal untuk menyudahi kasus ini. Munculah TPDI yang secara konsisten menguasai dan sekaligus mendikte opini publik.

Di luar perhitungan penguasa, peristiwa 27 Juli justru berbalik menjadi titik awal kebangkitan perlawanan masif terhadap Orba. Dan ini dibuktikan dengan jelas dari meluasnya aksi perlawanan terhadap Orba dan hilang totalnya suara PDI Soerjadi dalam Pemilu 1997. Hal ini tidak terlepas dari keluarnya “Perintah Harian Ketua Umum”, yang sekalipun sangat terselubung, karena hanya menegaskan akan absen dalam menggunakan hak pilihnya, merupakan seruan bagi boikot politik yang terbukti sangat efektif. Puncak dari rangkaian perlawanan rakyat adalah Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan panjang rezim Orba.

e. Munculnya PDI Perjuangan

Kebangkrutan total dalam Pemilu dan turunnya Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia, tidak secara otomatis membawa perubahan sikap

pada penerusnya, Presiden B. J. Habibie atas status legal PDI. Kehendak untuk tetap memastikan PDI tidak muncul sebagai partai besar dan kehendak untuk mengeliminasi Megawati Sukarnoputri tetap menjadi obsesi. Karenanya, Kongres PDI di Palu tetap mendapatkan dukungan penuh penguasa. Tetapi rakyat punya cara sendiri untuk mengadili kubu Soerjadi dan sekaligus memberikan dukungan bagi Megawati. Pada gilirannya, Pemilu 1999 menjadi arena pembuktian. PDI Soerjadi bangkrut total, sementara PDI Megawati mendapatkan dukungan luar biasa: hampir 35% di tingkat nasional. Untuk mensiasati posisi politik rezim yang belum juga berubah, akhirnya dalam KLB di Bali diputuskan perubahan nama dari PDI ke PDI Perjuangan. Hal ini semata-mata guna dapat memenuhi syarat legal untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Kemenangan bagi PDI Perjuangan akhirnya diraih. Bahkan di sejumlah daerah bersifat sangat telak, seperti di Bali, Solo, Kota Surabaya, dan Tanah Karo. Tetapi kemenangan yang ada dirayakan dengan cara yang berbeda-beda. Di tingkat masyarakat, ia disyukuri dengan harapan baru bahwa periode politik kerakyatan akan dimulai. Tetapi di sebagian elit yang berada di dewan-dewan dirayakan sebagai peluang ekonomi. Aneka perilaku negatif akhirnya tidak terhindarkan. Tetapi ini bukan sebuah kejutan. Sebelum pemilu para petinggi PDI Perjuangan, khususnya Megawati Sukarnoputri memiliki kecemasan. Bukan kecemasan akan kekalahan, tapi kemenangan.

Kultur dan psikologi politik PDI Perjuangan sebagai kekuatan yang selalu tertindas dan dipinggirkan, sangat berbeda dengan kultur dan psikologis politik dari kekuatan yang memenangkan pertarungan. Gap antara kedua hal ini

tercermin dari kegagalan sikap warga partai, terutama yang mendapat peluang di parlemen. Persoalan-persoalan serius yang melibatkan etalase utama partai, yakni parlemen, struktural partai, dan eksekutif, menjadi keprihatinan baru. Konflik yang bersumber dari intervensi penguasa memang berakhir. Demikian pula yang sarat dengan nuansa ideologis. Tetapi motif-motif baru muncul. Konflik antara “orang baru” dan “orang lama” merebak. Antara yang “ingin melihat perubahan secara drastis dan cepat” dan yang melihat tahapan-tahapan perubahan mengeras. Konflik antara kekuatan-kekuatan uang dan kekerasan juga merebak. Kesemua ini merupakan tantangan partai ke depan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kesemuanya telah menenggelamkan citra partai. Disadari benar, karena politik Indonesia kini dan masa depan adalah pertama-tama dan terutama adalah “politik citra”.

2. Visi PDI Perjuangan

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat Pasal 6 Anggaran Dasar Partai, visi PDI Perjuangan adalah:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);

- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualism dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Misi PDI Perjuangan

Misi partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu:

Pasal 7, partai mempunyai tujuan umum:

- a. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8, Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. membangun semangat, mengkonsolidasikan kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9, Partai mempunyai fungsi:

- a. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktural partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. membentuk kader partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10, Partai mempunyai tugas:

- a. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai;

- e. memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara;
- f. mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideology Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bangun untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

4. Organisasi Sayap PDI Perjuangan

Organisasi sayap adalah bagian dari komunitas juang PDI Perjuangan, berdasarkan Anggaran Dasar Partai pasal 54 ayat (1) yang berbunyi: “Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya.” Tujuan dari adanya komunitas juang termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi: “Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai.”

Organisasi sayap yang dimiliki oleh PDI Perjuangan antara lain adalah:

1. Banteng Muda Indonesia (BMI) segmen pemuda dan pemudi berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 034/TAP/DPP/XII/2006 tentang Banteng Muda Indonesia sebagai Sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2. Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) dan tokoh agama Islam, berdasarkan Surat Masuk Nomor: 1294/IN/DPP/IV/2007. Dideklarasikan pada 29 Maret 2007.
3. Taruna Merah Putih (TMP) segmen pemuda dan pemudi berdasarkan Suarat Keputusan Nomor: 056/TAP/DPP/IV/2008.
4. Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Perjuangan segmen Mahasiswa dan Pelajar.

5. Profil Singkat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang sudah ada sejak partai politik ini bernama PDI. Alamat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang adalah Jalan Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Sesuai dengan SK DPP PDI Perjuangan Nomor 27.23-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015 Tanggal 17 Mei 2015 Tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, terdapat 19 pengurus DPC, Sedangkan untuk PAC, dan untuk. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang masa bakti 2015-2020 adalah Eddy Rumpoko, beliau saat ini menjabat sebagai Wali Kota Batu masa bakti 2012-2017.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang memiliki 33 Pengurus Anak Cabang (PAC), terdapat 11 orang pengurus di tiap PAC yang tersebar pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Malang, sehingga jumlahnya sebanyak 363 orang yang berada di pengurusan PAC, diantaranya yaitu PAC Kecamatan Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari. Terdapat pula 398 Pengurus Ranting yang tersebar pada Kelurahan/Desa di Kabupaten Malang, dengan 9 orang pengurus di tiap Pengurus Ranting, sehingga jumlahnya sebanyak 3.582 orang. Sehingga total seluruh anggota PDI Perjuangan Kabupaten Malang berjumlah 3.964 orang.

6. Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Berdasarkan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 27.23-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015 tentang Penyempurnaan Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang masa bakti 2015-2020, terdapat 19 pengurus DPC, yaitu dapat dilihat dari tabel 8 di bawah ini sebagai berikut.

**Tabel 8. Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan
Kabupaten Malang Masa Bakti 2015-2020**

No	Nama	Jabatan
1	Eddy Rumpoko	Ketua
2	Drs. Hari Sasongko	Wakil Ketua Bidang Kehormatan
3	H. Sujud Pribadi, SE, S.Sos	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi
4	Drs. Sugeng Pujiyanto	Wakil Ketua Bidang Organisasi
5	Ir. Budi Kriswiyanto	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6	Rofiq Zainudin, MM	Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik
7	Yoyok Pandan Hariyoto	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
8	Bambang Siswanto	Wakil Ketua Bidang Maritim
9	Esti Wahyuningsih, S.Sos	Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10	H. Gunawan HS, SH	Wakil Ketua Bidang Ekonomi
11	Darmadi, S.Sos	Wakil Ketua Bidang Nelayan, Buruh dan Petani
12	Sih Purwaning Astutik, SH	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak
13	Fathur Rohman, S.Ag	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
14	Suma'i	Wakil Ketua Bidang Komunitas Senibudaya
15	Maskud	Sekretaris
16	Muarap	Wakil Sekretaris Bidang Internal
17	Reny Purwaningtiyas	Wakil Sekretaris Bidang Program
18	Dr. Tantri Bararoh, SE, M.Si, M.Ak	Bendahara
19	Warisan	Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi dan Kekayaan Partai

Sumber : SK DPP PDI Perjuangan Nomor 27.23-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015 tentang Penyempurnaan Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang masa bakti 2015-2020

7. Ruang Lingkup Kerja Bidang

a. Ruang Lingkup Kerja Bidang Organisasi

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 17 ayat (3), Bidang organisasi bertugas:

- (1) menata dan memantapkan mekanisme organisasi;
- (2) menyusun kebijakan umum rekrutmen anggota, pendataan, dan klasifikasi data anggota, pemetaan anggota, pemeliharaan data anggota dan komunikasi dengan anggota; dan
- (3) menyusun kebijakan umum tentang pengembangan organisasi sayap partai dan membangun afiliasi dengan organisasi-organisasi sektoral, serta melakukan pembinaan dan penguatan terhadap komunitas-komunitas juang Partai.

Sedangkan di kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, bidang organisasi mengemban tugas secara operasional dari DPP di tingkat Kabupaten/Kota, seperti:

- (1) mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis model-model organisasi partai modern, dinamika dan perkembangannya;
- (2) menyusun dan mengkaji sistem rekrutmen anggota baru dengan target-target periodik di semua tingkatan;
- (3) menyusun sistem *database* anggota partai yang meliputi jumlah, kualitas, potensi kader dan anggota partai serta kecenderungan perkembangan keanggotaan partai;

- (4) mengumpulkan data dan informasi tentang kader partai lengkap dengan rekam jejaknya;
- (5) mengusulkan skala prioritas program partai sesuai dengan hasil analisa *database* anggota partai;
- (6) menyusun konsep manajemen dan sistem organisasi partai menuju partai modern;
- (7) melakukan kajian atas manajemen dan dinamika organisasi partai secara berkesinambungan; dan
- (8) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bidang organisasi dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai (DPP) pada tingkatannya.

b. Ruang Lingkup Kerja Bidang Kaderisasi dan Ideologi

Berdasarkan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 17 ayat (2) berbunyi, Bidang Ideologi dan Kaderisasi bertugas menjaga garis ideologi partai dan mengembangkan pemahaman anggota partai tentang ideologi partai melalui sistem kaderisasi secara berjenjang dan terpadu, serta melaksanakan koordinasi pendidikan kader, melakukan monitoring, evaluasi, penugasan, dan regenerasi kader.

Di dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang sesuai dengan SK DPP Nomor 27.23-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015 tentang Penyempurnaan Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang masa bakti 2015-2020, bidang pengelolaan anggota dan kader partai bernama bidang kaderisasi dan ideologi, bidang kaderisasi dan ideologi

bertugas sama halnya dengan yang diamanatkan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan. Seperti:

- (1) melakukan pemetaan terhadap ideologi-ideologi besar di dunia, perkembangan dan pengaruh aktualnya;
- (2) melakukan analisa ideologi terhadap kebijakan politik partai berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- (3) mengkaji dan merumuskan kontekstualisasi ideologi partai dan ideologi-ideologi lainnya terhadap situasi politik internasional, nasional dan lokal;
- (4) mengkaji konsep-konsep kaderisasi pada partai-partai lain;
- (5) melakukan evaluasi atas pelaksanaan kaderisasi partai; dan
- (6) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bidang kaderisasi dan ideologi berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai (DPP) pada tingkatannya.

B. Penyajian Data dan Pembahasan Fokus Penelitian

1. Konsep Pola Rekrutmen dan Kaderisasi PDI Perjuangan.

a. Dasar Pola Rekrutmen PDI Perjuangan

AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) organisasi merupakan dasar hukum yang melandasi setiap kebijakan dan program yang dikeluarkan dan diimplementasikan oleh organisasi. Setiap kegiatan pasti memiliki landasan dasar atau payung hukum yang mendasari diberlakukannya suatu kegiatan berkenaan dengan kebijakan maupun program, karena setiap pelaksanaan kegiatan partai harus memiliki acuan maupun panduan yang jelas.

Begitupun dengan prosedur pelaksanaan rekrutmen kader di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ada dasar hukum yang melandasi diimplementasikannya program ini. Dasar program yang ini merupakan dasar yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. DPP PDI Perjuangan mengeluarkan kebijakan yang berupa landasan hukum seperti Undang-Undang yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan sendiri. Adapun dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan yang melandasi sistem rekrutmen partai:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2015 – 2020.
2. Peraturan Partai PDI Perjuangan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan pasal 6 (e) menyatakan bahwa PDI Perjuangan merupakan wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan

menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mengamanatkan bahwa PDI Perjuangan di seluruh tingkat untuk melaksanakan rekrutmen anggota di dalam rangka melaksanakan pembentukan kader bangsa tersebut.

PDI Perjuangan merupakan partai kader, di mana partai berfungsi sebagai sarana pengkaderan untuk mencetak kader profesional dan dapat melaksanakan disiplin ideologi partai. Sekaligus pula sebagai partai massa, di mana PDI Perjuangan juga melakukan penguatan basis konstituen sebagai konsekuensi adanya pemilu.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hari Sasongko, yakni.

“DPC PDI Perjuangan secara linier menjalankan peran partai kader sekaligus partai massa. Disebut partai kader karena PDI Perjuangan memang sebuah partai ideologis yang berusaha untuk merekrut dan mendidik SDM dari masyarakat agar menjadi manusia yang ideologis. Tetapi PDI Perjuangan juga harus menjadi partai massa yang berusaha untuk merekrut konstituen sebanyak-banyaknya untuk menduduki kekuasaan negara, ini memang sudah keniscayaan karena pemilu pasti menuntut setiap partai berlomba-lomba untuk mengumpulkan konstituen” (wawancara, 3 Juli 2016).

PDI Perjuangan di dalam pasal 8 Anggaran Dasar (AD) menjelaskan bahwa partai mempunyai tujuan khusus, yakni membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial, membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi, serta memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan

absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.

Dari penjelasan AD di atas dapat diketahui bahwa untuk menjalankan semua hal tersebut diperlukan SDM yang banyak serta berkompeten. Dalam memenuhi kebutuhan SDM partai, sudah tentu harus dilakukan sebuah rekrutmen anggota untuk mengisi pos-pos lembaga politik dan publik sebagai infrastuktur daripada tujuan partai. Di samping itu, melaksanakan rekrutmen juga merupakan pengejawantahan dari *mindset* atau cita-cita *machtsvorming* yang digagas oleh Bung Karno.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hari Sasongko, yakni:

“Secara harfiah, *machts* berarti kekuatan, tenaga atau kuasa, sedangkan *vorming* berarti pembentukan. Artinya, *machtsvorming* bisa diartikan sebagai pembentukan kuasa atau kekuatan. Di mana merekrut kader sebanyak-banyaknya adalah bagian dari pada *mindset* itu. Dengan merekrut sebanyak-banyaknya SDM, maka akan mudah menerapkan gagasan dan cita-cita yang diusung oleh partai tanpa harus banyak kompromi dan transaksi politik” (wawancara 3 Juli 2016)

b. Dasar Pola Kaderisasi PDI Perjuangan

Kaderisasi PDI Perjuangan didasari oleh pasal 10 AD tentang Tugas Partai, di mana PDI Perjuangan bertugas mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan jabatan publik. Hal ini menandakan bahwa PDI Perjuangan harus melakukan proses kaderisasi untuk bisa menempatkan kader ke dalam jabatan politik atau jabatan publik. Sedangkan untuk menyandang predikat sebagai kader, anggota partai harus menempuh proses kaderisasi di tingkat-tingkat tertentu. Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 27

AD tentang Kaderisasi Partai, di mana terdapat tiga tingkatan dalam proses kaderisasi, yakni:

- 1) Kaderisasi Tingkat Pratama;
- 2) Kaderisasi Tingkat Madya; dan
- 3) Kaderisasi Tingkat Utama;

Kaderisasi Tingkat Pratama (KTP) adalah proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan melaporkannya kepada DPD PDI Perjuangan. Kaderisasi Tingkat Madya (KTM) dilaksanakan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan melaporkannya kepada DPP PDI Perjuangan. sedangkan Kaderisasi Tingkat Utama (KTU) dilaksanakan oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI Perjuangan.

Sedangkan di dalam sisi materi, PDI Perjuangan menetapkan dasar-dasar materi khusus dan bersifat pokok atau utama, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 83 tentang Materi Kaderisasi, materi yang dimaksud adalah:

- 1) Indonesia Menggugat Tahun 1930;
- 2) Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
- 3) Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
- 4) Membangun Dunia kembali 1960;
- 5) Nawaksara tahun 1966; dan
- 6) Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III tahun 2010 di Bali dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.

Untuk materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari:

- 1) Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;

- 2) Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
- 3) Amanat Presiden Soekarno Tahun 1960;
- 4) Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
- 5) Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.

Dalam buku Panduan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan (Bandung, 12-14 Desember 2011), dimuat TOR (*Term of Reference*) Komisi V Pola Dasar Kaderisasi Partai, yang menyebutkan, antara lain: Pertama, adanya kebutuhan partai bagi hadirnya suatu sistem kaderisasi yang permanen, setidaknya didasarkan pada sejumlah gugatan, kritik oto kritik, dan harapan, yang berkembang luas, baik di kalangan kader akar rumput, ataupun dalam diskusi-diskusi informal, serta dalam forum-forum pertemuan formal. Kedua, adanya suatu harapan yang kuat, agar di masa depan, kader partai tidak lahir begitu saja dari kelas-kelas pelatihan, kelas-kelas kursus, atau sejenisnya. Diharapkan agar tidak lagi terjadi seseorang dianggap sebagai kader partai hanya karena pernah mengikuti kursus kader partai dan mengantongi sertifikat. Ketiga, adanya suatu harapan agar ke depan, jenjang kekaderan tertata dengan jelas, di mana partai memiliki unit khusus yang bekerja untuk keperluan perjenjangan kader, dan mempunyai otoritas untuk memberikan suatu rekomendasi mengenai kualifikasi kader, terutama ketika pimpinan partai hendak menugaskan yang bersangkutan untuk suatu tugas tertentu. Dalam hal ini, sangat kuat harapan agar ke depan partai mengadopsi suatu sistem permanen yang lebih ideologis, di mana hanya kader-kader dengan kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik ke dalam maupun ke luar, yang dapat menduduki jabatan-jabatan, baik di partai maupun di

pemerintahan atau dapat mengemban tugas-tugas tertentu dari partai. Keempat, adanya harapan dan tekad yang sangat kuat, agar partai tidak lagi sekedar menjadi tiket untuk meraih kekuasaan.

Penyusunan pola dasar kaderisasi partai, mensyaratkan beberapa aspek: Pertama, perlunya segera melakukan pembakuan ajaran dan teori perjuangan partai, yang akan menjadi senjata standar seluruh kader partai, di semua level dan di semua aspek. Pembakuan akan menghindari pertentangan penafsiran ajaran, dan ketiadaan rujukan baku, terutama dalam memberikan penilaian-penilaian yang bersifat ideologis. Kedua, perlunya segera mendirikan Sekolah Partai. Hal ini untuk mengakhiri model pendidikan *ad hoc*, yang berubah-ubah. Partai harus memiliki Sekolah Partai, yang akan menjadi salah satu organ utama dari langkah kaderisasi partai. Badiklat (Badan Diklat) yang hendak didirikan, hendaknya menjadi cikal bakal, atau rintisan ke arah Sekolah Partai. Untuk menghindari konflik kepentingan dan permainan kepentingan jangka pendek, maka pengelola Sekolah Partai adalah kader yang tidak diijinkan untuk masuk ke arena politik praktis atau bukan kader yang sedang ingin meraih jabatan politik di pemerintahan, atau jabatan lain. Di pihak lain, pengelola juga bukan kader yang sedang mengemban tugas dalam jabatan publik. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih fokus dalam bekerja. Ketiga, akselerasi pengorganisasian cabang pelopor. Untuk keperluan tersebut perlu segera disusun berbagai instrumen pendukungnya, dan diadakan “unit khusus” yang mengelola.

2. Konsep Sekolah Partai PDI Perjuangan

a. Dasar Pendidikan Sekolah Partai

Kepentingan sekolah partai diamanatkan di dalam pasal 86 AD PDI Perjuangan tentang Tugas dan Fungsi Pendidikan Politik. Di mana PDI Perjuangan melaksanakan fungsi pendidikan politik untuk menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota partai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka kepentingan politik partai, selain kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 tentang Kaderisasi Partai, DPP PDI Perjuangan mendirikan sekolah partai dan sekolah kader partai. Dalam pasal 88 AD PDI Perjuangan, Sekolah partai bertujuan untuk melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan. Sedangkan sekolah kader partai memiliki tiga tujuan, yakni:

- 1) membentuk kader partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan;
- 2) mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin partai, bangsa, dan negara; dan
- 3) menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

b. Model Pendidikan

Dalam mempersiapkan seluruh kader agar dapat menjalankan tugas sejarahnya. Partai dalam hal ini harus segera menyediakan suatu keadaan dan menyelenggarakan suatu proses pendidikan yang memungkinkan seluruh kader partai mentransformasikan diri dan meningkatkan kemampuannya, agar dapat sejalan dengan garis politik partai, dan pada gilirannya akan dapat menjalankan tugas-tugas pentingnya yang diberikan oleh partai.

Pendidikan adalah proses transformasi kader partai. Pendidikan yang dimaksud bukan berbentuk pendidikan konvensional. Bukan pula pendidikan yang telah terkontaminasi pragmatisme, yang menempatkan proses pendidikan sebagai pintu untuk meraih kepentingan jangka pendek. Bukan pula pendidikan yang dengan mudah memberi cap kepada peserta pendidikan sebagai kader partai, hanya karena telah mengikuti suatu kegiatan pendidikan. Bukan pula pendidikan yang sekedar membatalkan kewajiban, karena kegiatan tersebut telah diprogramkan oleh partai.

Mendirikan sebuah Sekolah Partai sebagai rencana transisi kaderisasi. PDI Perjuangan dalam hal ini memiliki kepentingan langsung dengan suatu sistem pendidikan yang akan dikembangkan dalam format sekolah, sebagai basis bagi sistem kaderisasi yang berkualitas dan ideologis. Akan tetapi kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa format sekolah yang dipilih? Pertanyaan yang logis, terutama dalam konteks di mana sekolah telah identik praktek dagang bangku, dengan manipulasi, plagiatisme, dan berbagai bentuk praktek yang menyimpang dari maksud awal sekolah (pendidikan). Apakah partai tidak akan

terjerumus ke dalam penyimpangan, atau sekadar mengulang kesalahan yang sama? Tentu saja pertanyaan ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Format sekolah dalam membangun pendidikan partai yang diharapkan melahirkan kader ideologis, memiliki tiga alasan utama, yakni:

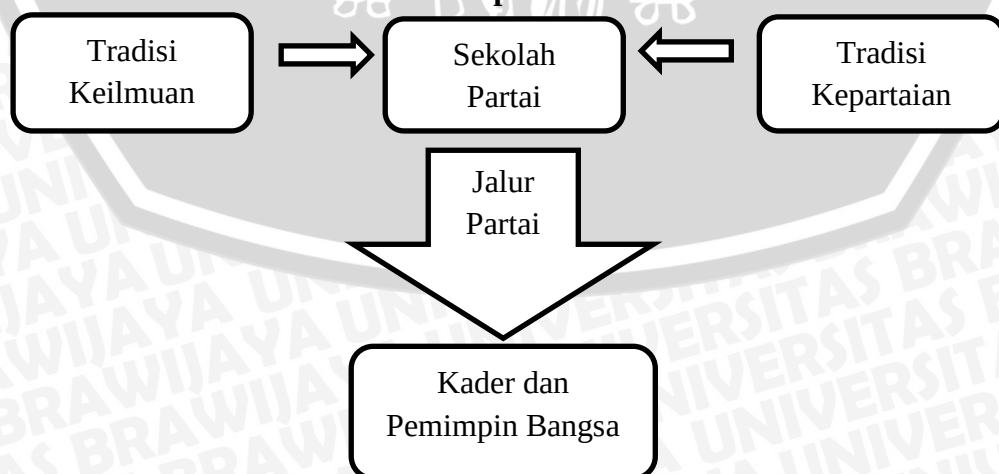
Pertama, berlawanan dengan kritik terhadap dunia persekolahan, partai justru membutuhkan suatu sistem pendidikan yang tertata, sistematis, berjenjang dan terukur. Selama ini, di kalangan partai, suatu sistem pendidikan hanya dipahami sebagai kursus-kursus singkat, dan bukan sebagai suatu sistem persekolahan yang mapan, berjenjang, baku dan terkelola. Oleh sebab itu, di dalam mengelola itu PDI Perjuangan bertekad membangun suatu sistem pendidikan yang progresif, melalui format persekolahan dengan tata kelola yang memenuhi prinsip-prinsip keilmuan dan kepartaian. Dalam makna sederhana, berarti bahwa lulusan dari sekolah partai dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan kepartaian.

Kedua, selama ini partai dikenal atau tercitrakan sebagai pihak yang anti ilmu pengetahuan, doktriner dan mengabaikan ilmu dalam pengembangan masyarakat melalui jalur partai. Singkat kata, partai politik dipandang tidak memiliki tradisi keilmuan. Bahkan untuk PDI Perjuangan dilabelisasi sebagai partai yang identik dengan preman atau partai dengan kualitas SDM yang rendah. Dengan Sekolah Partai PDI Perjuangan akan merubah masa depan partai menjadi partai berbasis ilmu pengetahuan, bekerja dengan basis ilmu, dan mengembangkan tradisi keilmuan dalam membumikan ideologi partai. Memang dalam hal ini tidak terdapat parameter keberhasilan secara personal antar kader,

tapi setidaknya ada suatu sistem yang diciptakan untuk mengupayakan pengembangan kapasitas partai tersebut sebagai lembaga dengan tradisi kepartaian dan keilmuan.

Ketiga, PDI Perjuangan adalah partai wong cilik. Sebutan ini, bukan saja merupakan cerminan dari pemihakan partai, melainkan juga secara riil, partai mendapatkan dukungan dari masyarakat yang berada di lapisan bawah struktur sosial. Dalam pawai-pawai partai, atau dalam berbagai acara partai yang melibatkan massa dalam jumlah besar, akan tampak bagaimana profil dari pendukung PDI Perjuangan. Ada kesan bahwa PDI Perjuangan memiliki pendukung yang khas, dan dipandang tidak memiliki jaringan yang luas, terutama di kalangan menengah dan kalangan terpelajar. Melalui Sekolah Partai, PDI Perjuangan kemudian diharapkan dapat memperluas jaringan, terutama di kalangan kaum terpelajar, baik dalam kerangka saling berbagi ilmu, berinteraksi dan saling memproduksi pengetahuan. Dengan menerapkan hal tersebut, tentu akan memperkuat langkah partai dalam mencapai tujuan.

Gambar 2. Sekolah Partai sebagai Pertemuan antara Tradisi Keilmuan dan Tradisi Kepartaian



Sumber : Sekolah Partai (2012)

Sekolah partai adalah model pendidikan yang menjadi bagian dari praksis pengorganisasian. Sekolah partai hendak dimaknai sebagai suatu institusi pendidikan partai yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan partai yang sejalan dengan ideologi partai, bersifat terencana, sistematis, terus-menerus, berjenjang dan baku, kepada kader partai dan tau mereka yang langsung atau tidak langsung akan menjadi kader partai atau pihak yang akan memberikan dukungan kepada partai, dengan suatu tata kelola pendidikan kader, yang mempertemukan tradisi kepartaian dan tradisi keilmuan.

c. Sasaran

Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai. Sehingga subjek yang akan menjalani pendidikan juga merupakan individu-individu dengan kualifikasi tertentu, yakni telah menjadi Kader Utama. Sesuai dengan pasal 82 ART (Anggaran Rumah Tangga) PDI Perjuangan tentang Sekolah Partai, maka sasaran yang dituju adalah:

- 1) Anggota Partai;
- 2) Kader Partai;
- 3) Calon Menteri;
- 4) Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 5) Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
- 6) Calon pejabat politik dan calon pejabat publik.

Partai politik tentu harus memiliki keberanian untuk melakukan oto kritik, dan secara sistematis dan sungguh-sungguh belajar dari kesalahan-kesalahan, serta bersedia menerima kritik dari semua pihak, demi perbaikan yang lebih

fundamental. Setidaknya ada tiga tantangan yang harus dihadapi oleh partai politik, di mana masalah rekrutmen politik merupakan salah satu diantaranya.

Berikut merupakan pengejawantahan gagasan HM Idham Samawi dalam Sekolah Partai (2012:686):

- 1) Tantangan untuk sejauh mungkin turun ke rakyat, sampai ke level paling bawah dari struktur sosial, hadir secara nyata dan menjadi bagian dari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Partai harus mampu ke luar dari jebakan siklus lima tahunan, di mana partai hanya hadir ketika membutuhkan suara rakyat untuk mengisi TPS. Partai harus berani melawan politik citra, politik kepura-puraan, dan sejenisnya, dan kembali kepada jati diri partai, sebagai senjata rakyat untuk mengubah nasib dan memajukan derajat kehidupan sesuai dengan tuntutan budi nurani manusia.
- 2) Tantangan untuk mengembangkan pendidikan politik ke dalam dan juga luar, untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas kader partai dan pada gilirannya juga akan meningkatkan kualitas rekrutmen politik, khususnya dalam rangka mengisi jabatan-jabatan politik, baik di lingkungan partai ataupun jabatan publik.
- 3) Tantangan untuk menjadi partai politik sebagai salah satu sumber pengetahuan. Oleh karena partai, terutama yang memiliki struktur sampai ke tingkat dusun, sesungguhnya memiliki jumlah pengurus yang sangat besar, yang sangat mungkin mencapai jumlah lebih dari tiga atau empat juta orang. Sudah seharusnya jumlah yang demikian mampu melahirkan pengetahuan yang dapat menjadi rujukan atau pengetahuan yang menjawab kebutuhan rakyat.

Ketiga tantangan tersebut pada dasarnya akan menuju kepada satu titik yang paling penting, yakni kualitas kader. Dengan kondisi yang ada, sulit untuk dapat dibayangkan bahwa suatu ketika partai mampu melahirkan guru terbaik, penyuluh pertanian yang baik, dokter terbaik, ahli teknik terbaik, dan seterusnya. Apa yang di depan disebutkan sebagai kemerosotan politik, bukan saja menurunkan kualitas politik, melainkan juga menyempitkan makna politik, di mana politik seakan-akan hanya urusan jabatan publik, dan tidak tersangkut dengan realitas kehidupan rakyat yang luas. Oleh sebab itu dari partai harus

mempunyai keberanian untuk membuat suatu lompatan kualitatif, agar dapat menjawab ketiga tantangan tersebut sekaligus. Dalam konteks inilah gagasan pendirian sekolah partai diletakkan. Suatu langkah, di mana PDI Perjuangan sedang berjalan.

Dalam konteks kepartaian, apa yang menjadi tujuan dari sekolah partai, sebagaimana dijelaskan oleh Idham Samawi dalam Sekolah Partai (2012:688) antara lain:

- 1) membangun fondasi yang kokoh bagi sistem kaderisasi partai yang modern, antara lain dengan sistem promosi kader yang memiliki dasar-dasar obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik ke dalam maupun ke luar;
- 2) memastikan bahwa partai benar-benar dapat menjadi rahim bagi lahirnya kader-kader bangsa yang berkemampuan tinggi, berbudi luhur dan berkarakter; dan
- 3) menjadikan partai menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan, baik ilmu kepartaian, kemasyarakatan, ilmu kenegaraan, ilmu pendidikan, maupun di kemudian hari, dalam ilmu-ilmu keteknikan, serta pengetahuan lain menjawab tantangan rakyat, bangsa dan negara.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Herman Hidayat, yakni:

“Tapi, lebih dari itu semua, partai politik melalui sekolah partai hendaknya menjadi bagian dari upaya membangun kecerdasan dan karakter bangsa, bukan sebaliknya. Dan para kader utama yang telah mengikuti sekolah partai harusnya bisa mengupayakan untuk mendistribusikan pengetahuannya untuk menyelenggarakan sistem kaderisasi yang sudah diajarkan dalam sekolah partai” (wawancara, 12 Juli 2016)

d. Tata Kelola Sekolah Partai

Penyelenggaraan sekolah partai dengan sendirinya memiliki keterkaitan dengan proses konsolidasi struktur partai. Tidak mungkin hanya sekolah partai hanya dilakukan di pusat dengan melibatkan seluruh dari jumlah kader. Kader yang mengikuti sekolah partai yang diselenggarakan oleh pusat (DPP), haruslah melalui proses seleksi di tingkat daerah (daerah, cabang, anak cabang, dan

seterusnya). Dan yang telah mengikuti kegiatan belajar di sekolah partai pusat, dengan sendirinya memiliki kewajiban untuk memperkuat struktur partai di tingkat daerah, dan meningkatkan prakarsa penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan struktur partai setempat. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan adalah dua sistem, yakni sentral dan desentral. Proses yang tersentralisasi adalah proses pendidikan yang akan dijadikan wahana melahirkan kader-kader dengan kualifikasi tertentu. Kader-kader ini yang kemudian akan mengembangkan kembali pendidikan di level berikutnya atau level dibawahnya (desentralisasi). Format pendidikan di daerah, tidak selalu sama dengan format sebagaimana di pusat. Format pendidikan di daerah atau di komunitas, dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan sumberdaya pendukung yang ada. Dengan model kombinasi dua sistem ini, diharapkan sistem pendidikan kader akan mampu menjawab kebutuhan kader, partai, rakyat, bangsa dan negara.

3. Pola Rekrutmen dan Kaderisasi oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang

a. Rekrutmen Administratif Anggota dan Kader di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Keanggotaan PDI Perjuangan di Kabupaten Malang berasal dari anggota PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Selain anggota lama yang berasal dari anggota PDI, PDI Perjuangan juga melakukan rekrutmen terhadap masyarakat untuk menjadi anggota baru. Keanggotaan PDI Perjuangan Kabupaten

Malang sampai tahun 2016, berdasarkan data KTA DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang adalah berjumlah 3.964 anggota di Kabupaten Malang.

Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan tentunya memiliki landasan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Wakil Ketua Bidang Kehormatan masa bakti 2015-2020 yaitu Bapak Hari Sasongko, landasan hukum rekrutmen anggota dan kader adalah sebagai berikut.

“Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan yang mewajibkan setiap tingkatan untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi” (wawancara, 3 Juli 2016).

Pelaksanaan rekrutmen anggota baru menjadi tanggungjawab bersama seluruh anggota PDI Perjuangan, hal ini dikatakan oleh Bapak Hari Sasongko sebagai berikut.

“Di dalam struktural, kader diharuskan melakukan perekrutan anggota baru secara terus menerus. Ketua DPC berposisi sebagai penanggung jawab rekrutmen anggota baru yang mana melaksanakan agenda rapat di tingkat cabang untuk mengagendakan kegiatan lanjutan pasca dilakukannya rekrutmen. Dalam ruang konsolidasi tersebut seluruh kader diberikan pemahaman dan instruksi untuk melakukan rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan Kabupaten Malang” (wawancara 3 Juli 2016).

Jenis keanggotaan dijelaskan di dalam Pasal 12 Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan, menyebutkan bahwa anggota partai dibagi menjadi 4, yaitu:

1) Anggota Biasa:

Anggota Biasa Partai adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai Anggota Biasa Partai oleh Pimpinan Partai. Syarat untuk menjadi anggota biasa partai tertuang di dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu:

- (a) Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- (b) Bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya;
- (c) Bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai;
- (d) Bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai;
- (e) Bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai; dan
- (f) Bersedia memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

2) Anggota:

Anggota Partai adalah Anggota Biasa Partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai. Syarat untuk menjadi Anggota Partai diatur di dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART), tertuang sebagai berikut:

- (a) Anggota Biasa yang telah melalui tahanan pendidikan, pelatihan dan pembinaan, mendapatkan rekomendasi dari DPC Partai, dan selanjutnya dilantik menjadi Anggota dan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Partai.

3) Kader:

Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader Partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdian kepada Partai dan masyarakat umum. Syarat untuk ditetapkan menjadi Kader tertuang pada Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART), yang dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Telah memiliki kemantapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi;
 - (b) Telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai;
 - (c) Telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat;
 - (d) Memiliki moral yang baik; dan
 - (e) Telah lulus pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Partai.
- 4) Anggota Kemormatan

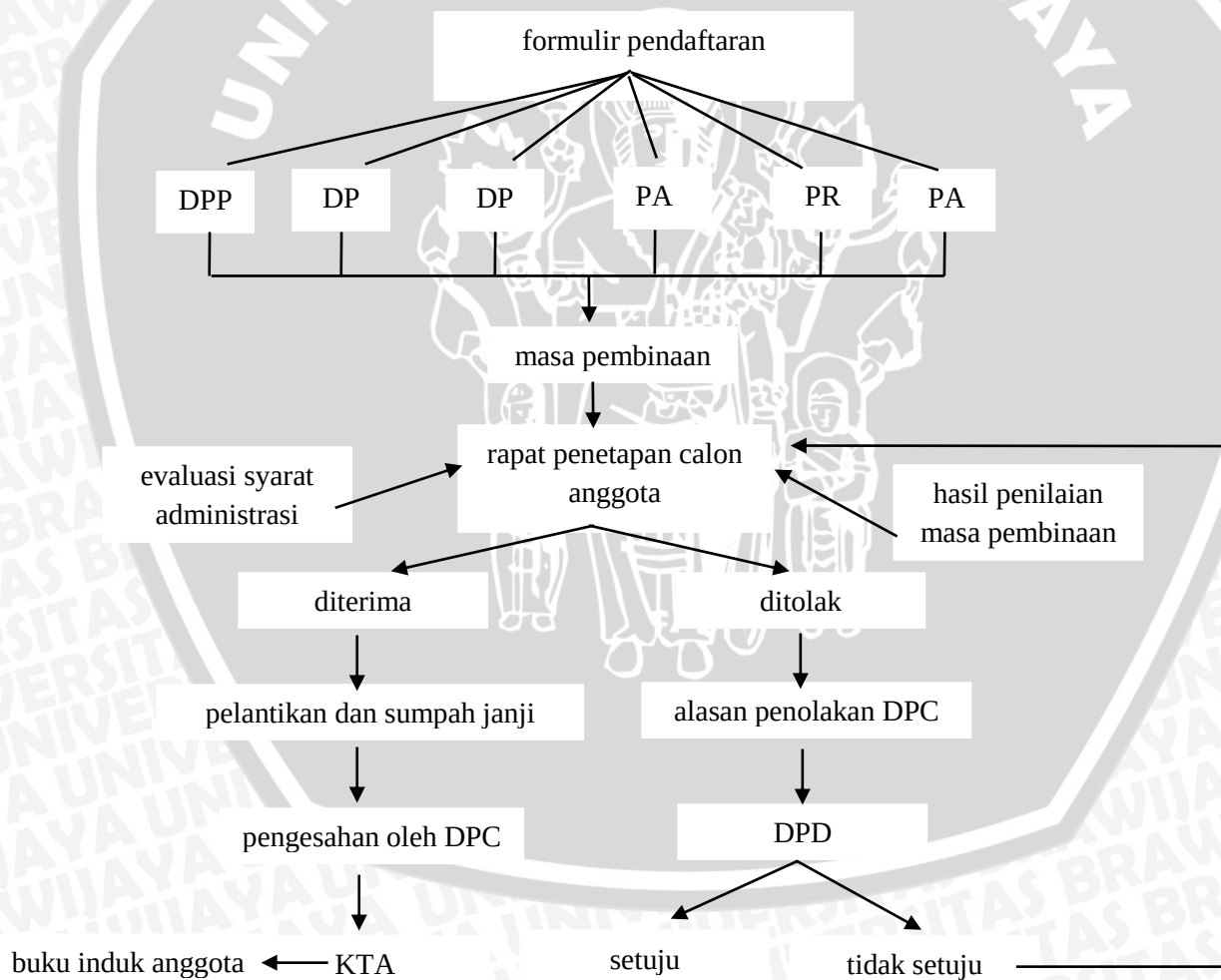
Anggota Kehormatan Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak, dan Tujuan Partai. Syarat diantara seseorang dinobatkan sebagai Anggota Kehormatan tertuang di dalam Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang Anggota Kehormatan, kriteria calon anggota kehormatan yaitu:

- (a) Tidak berstatus sebagai anggota partai;
- (b) Berjasa besar dalam upaya kemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- (c) Berjasa besar dalam menjaga eksistensi dan soliditas Partai;
- (d) Berperan penting dalam membantu Partai dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Partai; dan
- (e) Berperan penting ikut mewujudkan program-program strategis Partai.

Mekanisme implementasi rekrutmen anggota PDI Perjuangan dapat digambarkan melalui bagan berikut ini.

Gambar 3. Mekanisme Penerimaan Anggota Baru berdasarkan AD/ART



Sumber: Peneliti (2016)

Bapak Hari Sasongko sebagai Wakil Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dalam wawancara dengan peneliti memaparkan tahapan untuk menjadi anggota PDI Perjuangan adalah sebagai berikut.

“Tahap menjadi anggota partai dimulai dengan calon anggota mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang struktural yang ada seperti DPP, DPD, DPC, PAC, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting (PAR) dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian diusulkan untuk diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan partai” (wawancara, 3 Juli 2016).

Dalam proses penerimaan anggota baru, DPC melakukan rapat penetapan calon anggota, di mana DPC mempertimbangkan syarat-syarat administratif dengan penilaian-penilaian tertentu. Jika rapat DPC partai memutuskan calon anggota diterima sebagai anggota PDI Perjuangan, maka anggota akan mendapatkan KTA dan ditulis dalam buku induk anggota.

Berikut contoh Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan dibawah ini.

Gambar 4. Contoh KTA PDI Perjuangan tampak depan



Gambar 5. Contoh KTA PDI Perjuangan tampak belakang



Rekrutmen tidak hanya dilaksanakan dengan membuka pendaftaran kepada masyarakat. DPC PDI Perjuangan juga mempunyai cara dalam melakukan rekrutmen anggota baru yang bersifat persuasif, yakni dengan mendekati masyarakat secara langsung, sebagaimana dikemukakan oleh sekretaris PAC Kepanjen PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Bapak Herman Hidayat sebagai berikut.

“PDI Perjuangan melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, kami melakukan rekrutmen dengan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya secara benar, yaitu dengan berpartisipasi pada partai politik. Kami menyediakan ruang konsolidasi dengan mengisi diskusi tentang kritik terhadap undang-undang, akuntabilitas pemerintah, dll. dengan harapan masyarakat bisa melakukan fungsi *monitoring* secara cerdas dalam mengawasi kinerja administrasi pemerintahan yang ada, di samping itu kami berharap masyarakat kemudian tertarik untuk bergabung dengan partai” (wawancara, 12 Juli 2016).

Selain itu, rekrutmen juga dilakukan oleh kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang dengan menggunakan metode infiltrasi, yaitu masuk ke dalam elemen-elemen atau organisasi-organisasi masyarakat. Hal tersebut legal dilaksanakan, selama sejasas dan seaspirasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 66 Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan, di mana partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang sejasas dan seaspirasi dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi tersebut.

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Herman Hidayat sebagai berikut.

“Rekrutmen anggota baru partai juga kami lakukan dengan keikutsertaan beberapa anggota kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang di dalam Paguyuban Nasionalis. Organisasi Paguyuban Nasionalis adalah organisasi

independen yang memiliki unsur masyarakat berasas nasionalis. Di sana kebetulan salah satu anggota DPC yaitu Bapak Sujud Pribadi menjabat sebagai Dewan Pembina bagi Paguyuban Nasionalis. Sujud Pribadi adalah pejabat struktural partai, yakni sebagai Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Di dalam Paguyuban Nasionalis pendekatan kami tetap persuasif, pendekatan yang dilakukan adalah pada model pendidikan yang memperkenalkan perasan nilai-nilai perjuangan serta arah gerak partai politik, khususnya PDI Perjuangan” (wawancara, 12 Juli 2016)

Rekrutmen yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dalam merekrut anggota kader baru lebih bersifat halus dan tidak menggunakan cara-cara yang identik dengan cuci otak (*brain washing*), sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Herman Hidayat sebagai berikut,

“PDI Perjuangan melakukan rekrutmen anggota baru dengan cara yang baik, kami tidak melakukan *brain washing* atau cuci otak. Yang kita lakukan adalah mewacanakan tentang ideologi dan program partai di dalam pertemuan-pertemuan formal maupun non formal di organisasi masyarakat atau lingkungan sekitar masyarakat. Karena kami sadar bahwa sangat sulit mengkoordinasi massa dengan tingkat apatis yang tinggi. Kami membiarkan masyarakat menilai apakah PDI Perjuangan layak untuk menjadi partainya atau tidak pasca kami memberikan materi di setiap pewacanaan tentang partai kepada masyarakat” (wawancara, 12 Juli 2016).

Pelaksanaan perekrutan anggota baru selama ini dilakukan dengan menugaskan PAC dan Pengurus Ranting untuk melakukan rekrutmen di daerah masing-masing. Ada pula perekrutan berdasarkan pada masyarakat yang mendaftarkan diri. Sebagaimana mekanisme rekrutmen penerimaan anggota baru yang telah dipaparkan, seorang calon anggota yang akan mendaftar akan mengisi beberapa prosedur, diantaranya formulir serta persyaratan-persyaratan administratif lainnya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Supriadi

“di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, untuk menjadi anggota baru harus menjalani prosedur pendaftaran, diantaranya pengisian formulir dan kelengkapan administrasi, seperti data-data diri. Setelah itu seluruh hasil rangkaian pendaftaran tersebut diserahkan kepada pengurus DPC untuk dijadikan bahan rapat internal untuk menentukan apakah calon itu diterima atau tidak. Sejauh ini, untuk sekedar menjadi anggota biasa saja sudah pasti diterima. Sedangkan untuk pembinaan di dalam proses mendapatkan KTA tidak ada, mungkin karena untuk anggota biasa tidak diperlukan keahlian khusus. Mungkin yang lebih membutuhkan proses pembinaan itu ya calon legislatif atau kepala daerah saja” (wawancara 19 Agustus 2016)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan rekrutmen di tingkat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang telah memenuhi mekanisme yang ditetapkan di dalam AD dan ART PDI Perjuangan. Tapi dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tidak melaksanakan pembinaan pada calon anggota yang telah mendaftarkan diri. Sehingga pasca mendaftarkan diri sebagai anggota, maka tanpa proses pembinaan orang tersebut sudah dianggap menjadi anggota.

Di lain pihak, beberapa kader yang berada di organisasi masyarakat juga melakukan perekrutan pada anggota organisasi tersebut, seperti yang dilakukan oleh beberapa kader partai di organisasi Paguyuban Nasionalis. Sosialisasi kepada masyarakat oleh PDI Perjuangan Kabupaten Malang juga dilakukan dengan terjun langsung. Sosialisasi ini mempunyai tujuan mendapat dukungan masyarakat sekaligus dukungan kepada aktifitas masyarakat yang positif agar tetap eksis dan produktif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Herman Hidayat mengenai salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.

“Kami seringkali memantau kegiatan masyarakat, seperti kegiatan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di beberapa tempat. Ini merupakan salah satu cara untuk mendekat kepada masyarakat. Kami pernah menyediakan

fasilitas untuk karang taruna desa berupa sarana penunjang aktifitas olahraga, seperti bola baru dan memperbaiki lapangan kampung agar aktifitas masyarakat tidak mati dan itu positif untuk mencetak generasi yang produktif di masa depan. Kami hanya menjalankan tugas sebagai partai yang punya kode etik untuk dekat dengan rakyat, Sehingga kami harus hadir di tengah rakyat pula. Untuk urusan apakah nanti mereka akan memilih kami itu hanya bonus dari kedekatan kami dengan masyarakat” (wawancara, 12 Juli 2016).

Upaya untuk terjun langsung pada masyarakat masih terkendala persoalan anggaran dan sumberdaya yang tersedia. Sebagaimana pemantauan yang pernah dilakukan oleh Marhaendra Pramudya Mahardika, Manajer Program dari Indopolling Network Jakarta. Di dalam pernyataannya, Marhaendra melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik, salah satunya PDI Perjuangan Kabupaten Malang, masih bergantung kepada dana-dana dari kader yang berada di kursi legislatif.

Hal ini dikatakan oleh Marhaendra dalam sebuah pernyataan sebagai berikut

“berdasarkan riset lapangan yang sudah pernah dilakukan di hampir seluruh wilayah Jawa Timur menunjukkan bahwa partai politik hanya turun ke publik pada saat agenda-agenda Reses legislatif atau Jamsas yang memang dianggarkan oleh negara. Ini memang dimanfaatkan untuk meningkatkan citra politik partai sekaligus anggota legislatifnya. Ada kalanya setiap fraksi memberikan asupan dana kepada masyarakat dengan kepentingan-kepentingan tertentu (transaksi politik)” (wawancara 7 Agustus 2016).

Hal ini membenarkan pernyataan Bapak Herman Hidayat yang memaparkan bahwa selama ini PDI Perjuangan Kabupaten Malang, baik di tingkat DPC sampai ke bawah, hanya dapat melaksanakan agenda jika dana yang tersedia baru ada. Dana yang dimaksud adalah sumbangan-sumbangan dari kader yang berada di legislatif, sedangkan untuk anggaran internal partai sendiri banyak

tidak dapat direalisasikan menjadi agenda partai. Berikut pernyataan Bapak Herman Hidayat.

“kawan-kawan DPC atau PAC kebanyakan tidak bisa melaksanakan agenda seperti rekrutmen atau kaderisasi, terutama kaderisasi, secara tertib karena asupan dana untuk melaksanakan agenda tersebut tidak dapat berjalan stabil. Di samping PDI Perjuangan Kabupaten Malang tidak memiliki badan usaha, kawan-kawan masih sangat bergantung kepada kader-kader yang berada di legislatif, kami sangat bergantung kepada dana-dana Reses atau Jamsas yang memang turun dalam jumlah besar dari anggota legislatif. Karena dengan dana kolektif dari setiap PAC atau Ranting hanya dapat direalisasikan menjadi agenda-agenda sederhana saja yang progressnya hanya sedikit” (wawancara, 12 Juli 2016)

Implementasi rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan salah satunya juga bergantung pada kualitas kader dan tokoh PDI Perjuangan. Jika kader dan tokoh PDI Perjuangan dinilai baik di mata masyarakat, maka masyarakat akan tertarik untuk ikut bergabung dengan PDI Perjuangan, lain halnya jika kader dan tokoh PDI Perjuangan buruk, masyarakat tidak akan tertarik dengan PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Herman Hidayat, sebagai berikut.

“Sebagai kader, saya punya tanggung jawab untuk berbaur dengan masyarakat dan menunjukkan perilaku yang baik di masyarakat. Tetapi juga harus diingat bahwa masyarakat saat ini berpikir cukup instan dengan hanya melihat sosok orang tertentu untuk merepresentasikan partai yang dinaunginya. Seperti Pak Sujud Pribadi yang notabene adalah mantan Bupati Malang, beliau mempunyai nama baik di kalangan masyarakat dan organisasi Paguyuban Nasionalis, selama ini beliau membina organisasi dengan baik dan sosoknya mempunyai citra yang baik. Hal ini membawa keuntungan bagi kader PDI Perjuangan yang lain, karena secara tidak langsung juga dianggap baik seperti Pak Sujud Pribadi” (wawancara, 12 Juli 2016).

Anggota PDI Perjuangan kemudian dapat dipilih menjadi kader partai.

Ketentuan mengenai syarat anggota untuk menjadi kader diatur dalam Pasal 4

Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan tentang Kader Partai

sebagaimana di jelaskan di atas. Mengenai kader PDI Perjuangan, Wakil Bidang Kehormatan, Bapak Hari Sasongko menjelaskan sebagai berikut.

“Kader partai pada dasarnya haruslah anggota yang sudah melalui mekanisme kaderisasi atau pendidikan kader yang dilaksanakan di tingkat-tingkat tertentu (Kader Pratama, Kader Madya, Kader Utama). Karena hanya melakukan pendaftaran KTA sebenarnya masih berstatus sebagai anggota saja, itu tidak merepresentasikan seorang kader. Kader haruslah orang yang telah mengikuti mekanisme pendidikan (pengkaderan) yang diadakan struktur di atasnya, karena seorang kader haruslah mengerti garis perjuangan partai secara benar dan berbekal teori yang mapan” (wawancara, 28 Juli 2016).

Keanggotaan berakhir dengan mekanisme pemecatan atau pemberhentian anggota partai sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 24. Keanggotaan berakhir apabila anggota partai berpindah ke partai politik lain, mengundurkan diri, diberhentikan, dan meninggal dunia. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Hari Sasongko sebagai berikut.

“Status kader sebenarnya bersifat tidak terbatas, tidak ada status alumnus seperti halnya organisasi di tingkat pelajar atau mahasiswa. Status anggota atau kader di dalam partai hanya bisa hilang ketika berpindah partai atau meninggal dunia. Tetapi dapat juga dengan mekanisme pemecatan, jika melakukan penyimpangan terhadap partai. Bisa juga pihak yang terkait menyatakan pengunduran diri” (wawancara, 28 Juli 2016).

b. Rekrutmen Akademis Anggota dan Kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Rekrutmen akademis adalah proses mencari, menemukan, dan menarik sejumlah SDM yang berkualitas secara akademik untuk bergabung bersama suatu organisasi, atau dapat pula bertujuan untuk mendistribusikan SDM untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Di dalam partai politik, rekrutmen akademis adalah mekanisme menjaring SDM dengan suatu mekanisme pendidikan atau biasa disebut kaderisasi, di mana akan ada suatu kegiatan

pembelajaran dan seleksi untuk menguji dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terhadap partai. Tapi dapat pula rekrutmen akademis itu berupa berlakunya syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi oleh SDM yang tersedia ataupun yang akan bergabung. Rekrutmen akademis yang dilakukan DPC PDI Perjuangan adalah menerapkan mekanisme kaderisasi pada anggota-anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Malang untuk memenuhi status jenjang yang ditetapkan oleh partai menjadi kader, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di dalam Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hari Sasongko, yakni

“Rekrutmen akademis yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang yaitu dengan melakukan kaderisasi. Hal ini dilakukan karena untuk menjadi anggota partai tidak diperlukan syarat-syarat akademis, sehingga rawan terjadi kegemukan SDM dengan tingkat pendidikan rendah. Oleh sebab itu, dilakukan filterisasi kembali dengan memberi tingkatan di atas anggota, yakni kader. Di mana untuk mencapai jenjang tersebut, seorang anggota harus menempuh sebuah mekanisme pendidikan sekaligus seleksi” (wawancara, 28 Juli 2016)

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kaderisasi adalah mekanisme rekrutmen akademis yang selama ini ada di dalam tubuh partai. Mekanisme yang ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan melalui AD/ART kepada DPC adalah mekanisme Kaderisasi Tingkat Pratama (KTP). Mekanisme KTP tidaklah sama dengan konsep Sekolah Partai, materi dan agenda yang dilaksanakan lebih sedikit dan disiapkan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah yang dikoordinir oleh DPC. Tetapi, secara inti hampir sama, Sekolah Partai lebih mengarah pada pendidikan elit partai, hal itu diberlakukan karena untuk menjadi elit partai harus memiliki beberapa kriteria khusus, hal ini

dikarenakan tanggungjawab yang akan diemban juga cukup besar. Di dalam KTP, pembelajaran yang dilakukan adalah tingkat eksekusi, sehingga bobot kedalaman materi yang disajikan adalah kemampuan untuk menangkap instruksi-instruksi dari struktural di atas (intruksi DPP), untuk dijadikan pegangan dalam melangkah dan menjalankan keputusan pimpinan secara benar.

Hal ini tentu perlu dibedakan mengapa ada mekanisme rekrutmen akademis berbentuk kaderisasi, namun ada pula bentuk rekrutmen akademis dengan sistem rekomendasi. Hal ini didasarkan pada Pasal 9 Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan yang menyatakan fungsi partai adalah “melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktural partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga publik”. Dari pasal tersebut terdapat dua penyebutan, yakni anggota dan kader. Hal ini tentu ada kaitannya dengan pola rekrutmen politik yang diberlakukan oleh PDI Perjuangan. Salah satu mekanisme yang dapat menjelaskan makna pasal tersebut adalah rekrutmen anggota dan kader untuk direkomendasikan ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Mekanisme tersebut adalah mekanisme *Fit and Property* di mana rekrutmen tersebut diselenggarakan.

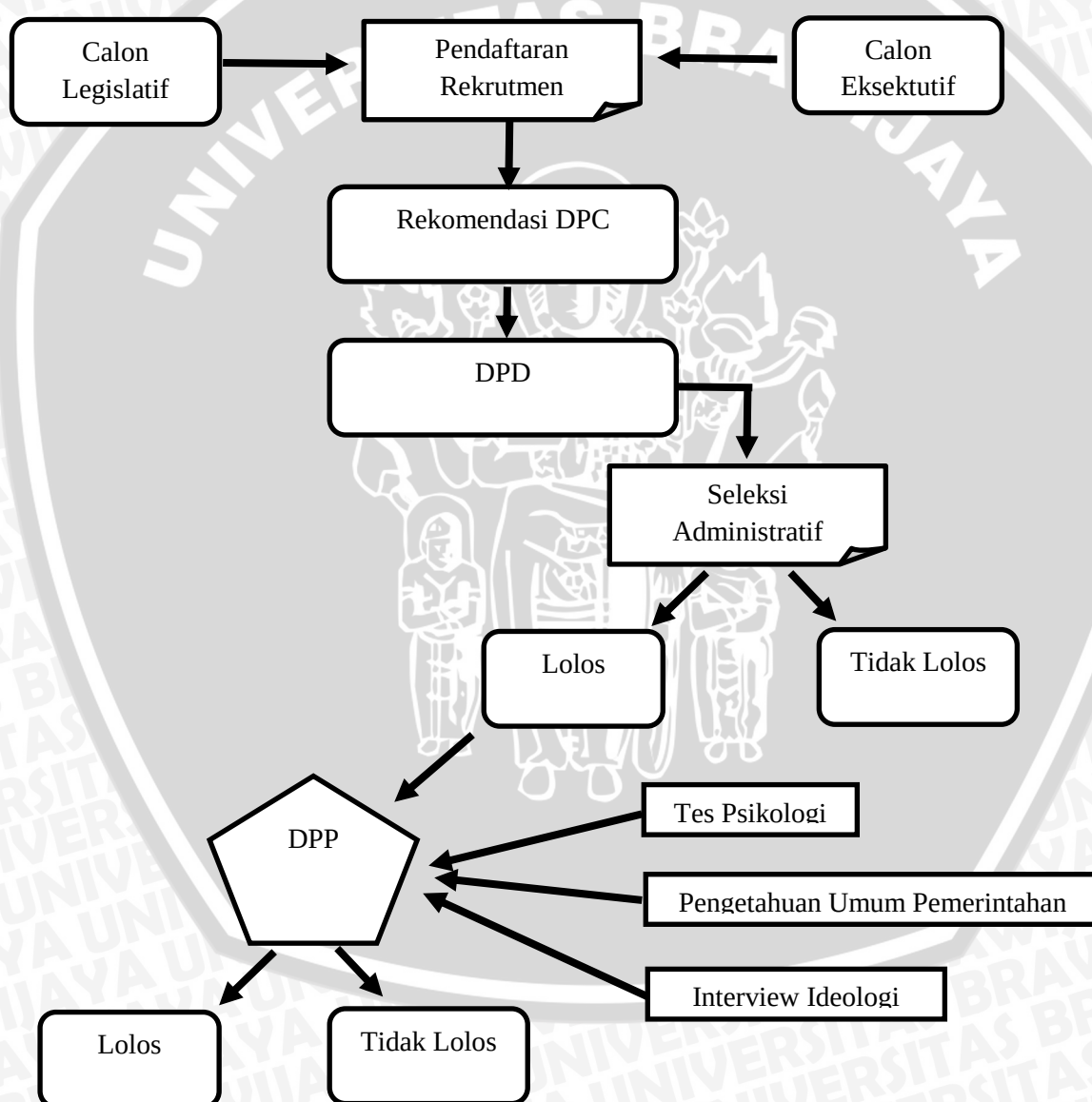
Hal ini dijelaskan Bapak Hari Sasongko sebagai berikut.

- 1) DPC PDI Perjuangan melakukan penjangkaran atau membuka *open recruitmen* untuk direkomendasikan menjadi pejabat legislatif (misalnya DPRD) dan pejabat eksekutif (Bupati/Walikota);
- 2) Setelah dilakukan proses penjangkaran, kemudian DPC melakukan pemeriksaan berkas rekrutmen untuk diserahkan kepada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDI Perjuangan;
- 3) Oleh DPD kemudian dilakukan seleksi administratif untuk kemudian direkomendasikan ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat);

- 4) Pada proses akhir di DPP, dilakukan proses seleksi akademis dengan tiga jenjang seleksi, yakni tes psikologi, interview seputar pengetahuan umum pemerintahan, dan interview seputar ideologi.

Mekanisme rekrutmen akademis yang dilakukan untuk menjangking calon legislatif atau eksekutif dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 6. Mekanisme Rekrutmen Politik PDI Perjuangan (Rekomendasi DPC untuk Caleg dan Eksekutif).



Sumber : Peneliti (2016)

Di dalam tingkat kader pratama, terdapat tiga penempatan sekaligus materi yang disampaikan di setiap lapangan yang digelutinya. Hal tersebut bisa digambarkan melalui tabel berikut

Tabel 9. Kerangka Proses Pembelajaran Kaderisasi Pratama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Lapangan Kerja	Subjek Kader	Materi
Pendidik	Pengurus PAC	Partai Ideologis: struktur dan kultur
		Ideologi Dalam Praktek Tata Pemerintahan Daerah
		Pengorganisasian Cabang Pelopor
		Pengorganisasian Pendidikan Kader dan Teknik Dasar Pemanduan
Pimpinan	Pengurus PAC	Ideologi Dalam Praktek Tata Pemerintahan Daerah
		Dasar-dasar Kepemimpinan
		Kepemimpinan dalam partai, pemerintahan dan di tengah massa
Penggerak	Pengurus PAC	Ideologi Dalam Praktek Tata Pemerintahan Daerah
		Dasar-dasar Pengorganisasian Rakyat dan Trias Dinamika
		Penyelidikan Sosial

Sumber : Laporan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang (2012)

Kaderisasi Tingkat Pratama (KTP) yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang di tahun 2012 adalah 3 hari, dengan peserta sebanyak 165 orang yang terdiri dari 5 orang yang dikirim oleh PAC. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hari Sasongko.

“Di tahun kepengurusan 2010-2015, telah dilakukan KTP (Kaderisasi Tingkat Pratama) yang diselenggarakan selama 3 hari, peserta yang kami bina sebanyak 165 orang, terhitung 5 orang per PAC. Kaderisasi ini dilakukan karena pengurus PAC masih banyak yang berstatus sebagai anggota, sedangkan dalam AD/ART disebutkan bahwa anggota harus menempuh kaderisasi untuk menjadi kader. Dengan menjadi kader, maka kami akan lebih siap untuk regenerasi dan mengikuti proses politik dengan SDM yang cakap karena telah mendapatkan materi dan seleksi dari agenda KTP” (wawancara, 3 Juli 2016)

Ditanya mengenai seleksi yang pernah dilakukan di dalam KTP di sesi wawancara berikutnya, Bapak Hari Sasongko menyatakan tidak semua anggota lulus menjadi kader, pada saat sesi akhir kaderisasi, setiap peserta diminta mengerjakan tugas akhir dan menjalani evaluasi akhir. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari DPP Partai, sedangkan yang tidak lulus, akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan mengikuti proses evaluasi kembali sampai dinyatakan lulus.

“Pengurus DPC tidak meluluskan sejumlah anggota karena memang tidak lolos dalam evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kader. Agenda tersebut juga merupakan evaluasi dari rekrutmen yang selama ini dilakukan agar juga mempertimbangkan aspek akademik berupa pengetahuan yang mumpuni dalam menjaring kader, tidak hanya mementingkan kuantitasnya saja” (wawancara, 28 Juli 2016)

Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai juga merupakan bentuk daripada rekrutmen akademis partai, di mana hanya kader dengan kualifikasi tertentu yang dapat mengikutinya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam skema akademik, menuntun adanya pemahaman tentang materi yang sebaiknya dikembangkan oleh partai, serta tahap jenjang akademik. Tentu saja dalam mendapatkan kejelasan mengenai skema akademik, termasuk penyusunan kalender akademik, dibutuhkan suatu proses tersendiri yang tentu melibatkan sebanyak mungkin pihak, baik pihak yang memahami masalah kurikulum, kepartaian, dan berbagai masalah lainnya. Berikut merupakan uraian tentang kebutuhan kader PDI Perjuangan, sesuai dengan lapangan yang hendak digelutinya, berikut adalah penjelasan di dalam buku dokumen Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan:

Pertama, *Kader Penggerak*, yakni kader yang bekerja di tengah basis (tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan dusun), dan kader yang akan bekerja secara sektoral, seperti massa tani, buruh, nelayan, pedagang pasar tradisional, perempuan, dan lain-lain. Wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan secara umum ada dua, yakni kemampuan untuk menjelaskan dan bersama-sama dengan rakyat memahami apa yang sedang terjadi, mengapa suatu kejadian ada seperti ini, dan meletakkan semua dalam kerangka ideologi, konstitusi, sistem politik, kepartaian, dan lain-lain. Dalam batas tertentu, kader penggerak, harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai ideologi partai dan tanggungjawab warga bangsa dalam mengawal proses perwujudan ideologi dalam hidup nyata masyarakat. Kemudian, kemampuan dalam mengorganisasi rakyat, menggerakkan partisipasi, memobilisasi dan mengajak basis untuk menjadikan partai politik sebagai senjata perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Untuk daerah-daerah atau komunitas yang belum menjadi bagian dari partai, maka kader harus mampu menyesuaikan diri, dengan membentuk komite-komite kerja, yang pada waktunya ditransformasikan menjadi organ partai.

Kedua, *Kader Pendidik* atau kader yang akan bekerja di lapangan ilmu pengetahuan (sains). Kader pendidik adalah kader yang bekerja mengembangkan pendidikan dalam skema kaderisasi atau sekolah partai, bagi basis dan juga bagi kader-kader partai di tingkat basis dan level di atasnya. Pengertian ini tentu telah memberikan penjelasan yang memadai untuk mengetahui kemampuan apa yang selayaknya dikuasai oleh kader pendidik tersebut. Dari segi wawasan, kader

pendidik harus menguasai apa yang seharusnya dikuasai oleh kader penggerak, dengan ditambah dengan wawasan tentang pendidikan rakyat yang mengacu pada model pendidikan nasional dan pengembangan karakter bangsa. Kader pendidik inilah yang akan mengembangkan modul-modul alternatif, yang dapat dikembangkan menjadi bahan pendidikan di tingkat basis.

Ketiga, *Kader Pimpinan dan Pengurus Partai*. Yakni kader yang akan bekerja di struktur partai, dari tingkat terbawah sampai tingkat tertinggi. Para pengurus dan pimpinan partai tentu harus memiliki wawasan yang cukup, terutama mengenai masalah ideologi, politik dan organisasi kepartaian. Dengan materi ajar berupa organisasi kepartaian maka diharapkan akan terbentuk etika kerja yang antusias dalam upaya memajukan partai, membangun kekuatan, sehingga partai dapat mencapai tujuannya. Selain wawasan mengenai ideologi, politik dan organisasi, kader partai juga perlu dibekali kemampuan dalam mengelola partai, mulai dari mengadakan rapat-rapat, sampai dengan langkah menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui partai politik. Pada prinsipnya, kader dimaksud memiliki kemampuan untuk menggerakkan partai dan menegakkan kepemimpinan partai dalam ideologi dan politik, serta kemasyarakatan.

Keempat, *Kader Parlemen*. Yakni kader yang akan ditugaskan partai menjadi anggota parlemen. Pengertian ditugaskan dapat bermakna bahwa kader yang bersangkutan adalah kader yang dipromosikan oleh partai untuk duduk menjadi wakil rakyat, dan kader di luar partai yang memiliki keterpanggilan mengabdikan diri menjadi anggota parlemen, dan dipandang layak oleh partai. Kaderisasi

atau sekolah partai dengan demikian harus mengembangkan kemampuan standar dari sosok legislator, yang mampu menjadi wakil rakyat. Dalam hal ini legislator membutuhkan kemampuan dan keterampilan dasar, mulai dari masalah-masalah keideologian, negara, kepartaian, dan sistem politik nasional, serta posisi dan peran strategis parlemen. Secara teknis, legislator membutuhkan keterampilan komunikasi politik dengan rakyat, media, eksekutif, termasuk keterampilan dalam menyusun kebijakan yang berbasis aspirasi rakyat.

Kelima, *Kader Eksekutif*. Yakni kader yang akan bekerja sebagai pejabat publik (eksekutif), dari Presiden sampai dengan Bupati/Walikota. Partai mempersiapkan kebutuhan kader ketika ditempatkan dalam posisi jabatan publik. Secara umum kebutuhan kader eksekutif adalah kemampuan untuk memimpin berdasarkan ideologi dan garis partai. Untuk itu, kader dimaksud harus memiliki cukup keterampilan politik, baik dalam rangka menggalang dukungan, menggerakkan birokrasi dan memperkuat partisipasi rakyat. Di kemudian hari harus ada unsur pembeda yang jelas antara kualitas kepemimpinan kader dengan kader partai lain.

Keenam, *Kader Khusus*. Yakni kader yang akan bekerja di luar kelima kader sebelumnya yang telah disebut, dan menjadi faktor pelengkap dari kinerja-kinerja yang ada. Kader khusus akan bekerja melalui penugasan dari partai, dan langsung bertanggungjawab pada pimpinan.

Di dalam gagasan Sekolah Partai, terdapat dua jalur rekrutmen dan dua jenis kader pada PDI Perjuangan. Pertama, jalur normal, yakni rekrutmen dengan kriteria normal, di mana kader-kader yang telah mengikuti pendidikan di

kaderisasi di tingkat DPC (Kaderisasi Tingkat Pratama) atau DPD (Kaderisasi Tingkat Madya), atau kedua tahap tersebut, kemudian akan mendapatkan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatan pendidikan. Misalnya, kader yang mengikuti kegiatan belajar-mengajar untuk kader pendidik, maka setelah selesai mengikuti kegiatan kaderisasi, akan mendapatkan tugas menjadi pendidik, baik mengembangkan kegiatan pendidikan di komunitas, mengembangkan bahan-bahan belajar atau mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan partai. Atau kader legislatif, yang setelah mengikuti kegiatan kaderisasi atau sekolah akan bertugas menjadi legislatif, atau akan berjuang sampai duduk menjadi legislatif, baik nasional ataupun di daerah. Kader melalui jalur normal adalah kader yang ditunjuk oleh struktur partai, untuk mengikuti kegiatan kaderisasi atau sekolah partai.

Kedua, jalur khusus, yakni jalur rekrutmen kader peserta kaderisasi atau sekolah, dengan kriteria khusus. Yang dimaksud dengan kriteria khusus, sebagai berikut:

- (1) Sekolah partai, melalui DPP Bidang Kaderisasi, akan meminta DPD, DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting, masing-masing mengirimkan 10 nama kader yang siap untuk dididik di sekolah partai;
- (2) Struktur partai dalam hal ini memberikan daftar yang diminta DPP, dan kemudian sekolah partai akan berkomunikasi langsung dengan nama-nama yang dimaksud. Dari komunikasi tersebut diharapkan memperoleh kader-kader terpilih yang benar-benar ingin belajar dan bersedia mengabdikan untuk kepentingan partai, tanpa memiliki pamrih

jangka pendek, seperti ambisi untuk duduk di kepengurusan partai, atau mempunyai ambisi untuk duduk di jabatan publik. Dan gambaran mengenai bagaimana proses pendidikan akan diselenggarakan, karena tidak mungkin proses pendidikan dilakukan secara serentak dan terpusat, mengingat jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, kaderisasi atau sekolah partai akan mengembangkan model pendidikan khusus kepada kader-kader yang dimaksud dengan arah bahwa kader-kader ini akan bekerja membangun daya dukung bagi partai.

c. Hubungan Good Administration and Performances dengan Pola Rekrutmen dan Kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Pembangunan SDM kader PDI Perjuangan di Kabupaten Malang oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang jelas akan membantu penyerapan tenaga ahli politik di Kabupaten Malang. Hal yang paling utama daripada itu adalah tentang pembangunan konsep etika daripada SDM, dengan menerapkan teori konsep etika sudah pasti kualitas kader akan meningkat dengan sendirinya. Logikanya, etika atau biasa disebut integritas adalah hal yang paling banyak menjadi penilaian subjektif dari partai atau pimpinan partai. Selain itu perekrutan dan pendidikan kader dalam bentuk rekrutmen dan kaderisasi yang mengadopsi konsep etika akan dengan mudah mencetak kader berkualitas, terutama kader yang jauh dari kejahatan administrasi, seperti:

- 1) Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
- 2) Pelayan publik yang buruk;
- 3) Kepemimpinan tirani;

4) Pengambilan keputusan yang lambat; dan lain-lain

Hal ini juga dikuatkan oleh Bapak Hari Sasongko:

“Pastinya, setiap kader harus selalu diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang beretika berdasarkan jati diri dan watak yang diajarkan oleh partai. Tetapi pada prinsip lain kader juga merupakan pemimpin rakyat, di mana kepada publik lah kader akan mengabdikan dalam membangun bangsa. Tapi memang untuk melakukan hal itu tidak mudah, masih banyak kader-kader PDI Perjuangan yang sifatnya masih merasa elit, tidak taat aturan, tidak tertib administrasi, dll. ini perlu ditindak oleh pimpinan partai, partai sudah harus memikirkan etika kadernya agar rakyat percaya kepada partai” (wawancara, 27 Juli)

Dari pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa perlu adanya infrastruktur etika yang baku di dalam kepengurusan partai. Keberadaan DPP saja tidaklah cukup, karena untuk mengawasi etika seluruh kader PDI Perjuangan tidak bisa hanya diawasi terpusat. Kepentingan membangun etika tersebut bukan hanya sekedar menjaga kehormatan partai, melainkan juga membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah mulai apatis terhadap keberadaan partai politik.

Kemudian peneliti memperkenalkan konsep *Good Administration Performance* (GAP) tersebut secara umum kepada informan. Dalam pandangannya, Bapak Hari Sasongko setuju dengan konsep GAP tersebut, menurutnya prinsip *attitude* memang harus dimiliki oleh kader PDI Perjuangan yang dijuluki partai *wong cilik* (orang kecil).

Hal ini disampaikan oleh Bapak Hari Sasongko:

“Teori ini dapat dijadikan acuan dalam rekrutmen dan kaderisasi oleh DPC PDI Perjuangan di agenda berikutnya, tetapi memang harus melalui proses musyawarah dan penetapan peraturan partai dalam mengefektifkan teori itu. DPC memang seringkali *kecolongan* dalam merekrut kader. Sampai-sampai masuk ke berita bahwa kader partai terlibat konflik hebat untuk berebut kursi pimpinan itu saja sebenarnya masyarakat sudah

menilai bahwa kader PDI Perjuangan tidak punya *attitude*” (wawancara, 28 Juli 2016)

Hal ini juga diperkuat oleh Marhaendra:

“Teori seperti GAP ini memang bisa diterapkan, tetapi memang harus digodok oleh struktural pimpinan. Saya sendiri juga pernah mendengar tentang perilaku buruk kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Bahkan yang parah adalah berita tentang salah satu anggota PAC PDI Perjuangan di Kabupaten Malang melakukan perampokan dengan nilai kerugian sekitar Rp. 13,5 Juta. Saya sebagai publik melihat dengan kacamata teori saudara peneliti juga perlu mempertanyakan bagaimana seleksi yang dilakukan DPC sampai-sampai orang seperti itu lolos rekrutmen partai” (wawancara, 7 Agustus 2016)

Di dalam pencarian data rekrutmen kader, peneliti tidak mendapatkan DPC PDI Perjuangan mempunyai sistem pembukuan terhadap data kader secara terpusat di DPC. Data-data kader hanya berada di tingkat PAC dan PR (Pengurus Ranting). Menanggapi kondisi tersebut, peneliti meminta pendapat kepada Marhaendra tentang kondisi administrasi PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Hal ini tertuang dalam pernyataan oleh Marhaendra:

“Memang sulit jika harus berhadapan dengan partai politik yang secara administratif tidak seketat birokrasi. Dokumentasi yang tidak tertib dan tidak tersimpan dengan baik seringkali terjadi. Belum lagi mekanisme-mekanisme administratif yang kerap terlambat, tidak pasti, dan banyak diskresi. Hal yang perlu juga mendapat sorotan adalah tentang implementasi kaderisasi yang katanya juga mempunyai mekanisme pendidikan untuk kader yang akan menduduki struktural partai” (wawancara, 7 Agustus 2016)

Hubungan antara teori GAP dengan pola rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang bukan berarti adanya pengadopsian daripada ilmu birokrasi atau ilmu manajemen bisnis ke dalam suatu organisasi seperti partai politik. Hal ini adalah model yang berasal dari studi administrasi yang fokus kepada pelaksanaan etika dan integritas yang mana wajib keberadaannya, baik di

dalam birokrasi pemerintahan, bisnis, maupun partai politik. Hubungan tersebut kemudian dapat digambarkan serta dilakukan pengejawantahan penulis dengan tabel berikut.

Tabel 10. Penerapan Konsep *Good Administration and Performances* (GAP) di dalam Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik

Indikator	Prinsip GAP	Penerapan Rekrutmen dan Kaderisasi
Azas Etik (<i>Principle of Ethics</i>)	Kekuatan Prosedur Administrasi	- Direncanakan dengan meninjau prosedur yang baku - Adanya yurisprudensi serta doktrin dalam tata kelola administratif - Adanya infrastruktur administrasi dan peradilan
Kode Etik (<i>Code of Ethics</i>)	Nilai filosofis sebagai <i>mindset</i> (pola pikir)	- Dijalankan dengan sikap yang mencerminkan jatidiri dan watak organisasi - Adanya identitas substansial
Etika Kerja (<i>Work Ethics</i>)	Kerja Cerdas (<i>work smart</i>)	- Adanya produktivitas dan konsistensi - Adanya sistem pemandu keahlian, bakat, atau kompetensi

Sumber : Peneliti (2016)

Deskripsi dari hubungan tersebut peneliti deskripsikan sebagai berikut:

a) Pertama, Azas Etik (*Principle of Ethics*)

Pertama, Perencanaan dengan meninjau prosedur yang baku. Peneliti meninjau berdasarkan laporan pelaksanaan Kaderisasi Tingkat Pratama (KTP), serta wawancara dengan Bapak Hari Sasongko yang pada kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang masa bakti 2010-2015 menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Dalam prosedurnya, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang melaksanakan KTP melalui inisiatif kepengurusan DPC untuk melaksanakan KTP, di mana DPC adalah pengemban tugas penyelenggaraan KTP tersebut. Pola yang dihasilkan dan diterapkan hingga kini adalah prosedur yang telah dijelaskan pada mekanisme penerimaan anggota baru, serta untuk kaderisasi

telah dijelaskan di dalam rekrutmen akademis. Sejauh ini prosedur administrasi tidaklah kuat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota yang belum menjadi kader (sudah melaksanakan kaderisasi).

Hal ini disampaikan Bapak Hari Sasongko sebagai berikut:

“Kaderisasi yang dilakukan di kepengurusan saya di tahun 2015 memang pada dasarnya tidak mengacu pada peraturan partai, ini hanya sebuah inisiatif untuk melakukan program tingkat cabang. Maka diusulkanlah kaderisasi tingkat pratama (KTP), yang mana menurut AD/ART tanggungjawabnya diemban oleh DPC. Sekaligus melaksanakan komitmen pada kepengurusan saya, salah satunya adalah harus melakukan proses kaderisasi. Tanpa melaksanakan program tersebut, kepengurusan saya bisa dinyatakan tidak etis menjalankan kerja partai” (wawancara, 27 Juli 2016)

Kedua, tentang adanya yurisprudensi serta doktrin dalam tata kelola

administratif. Dalam hal ini DPC PDI Perjuangan mentaati asas partai sebagaimana termaktub di dalam Pasal 5 Anggaran Dasar (AD), yakni asas Pancasila sebagai landasan yurisprudensi, juga sekaligus menjadi dasar tata kelola administratif. Menurut informan, asas tersebut merupakan landasan yang dipakai secara praksis di dalam pola kaderisasi, terutama pada pendalaman materi doktrin yang wajib mengangkat tema tentang Pancasila 1 Juni. Secara praksis pengelolaan organisasi, sektor lapangan tetap diserahkan kepada masing-masing pengurus untuk kemudian membuat sistem sendiri berupa peraturan partai. Sejauh ini, peneliti tidak menemukan adanya peraturan partai yang mengatur tentang pola rekrutmen dan kaderisasi secara khusus dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Ketiga, tentang adanya infrastuktur administrasi dan peradilan. Maksudnya adalah, partai politik hendaknya memiliki tempat untuk menjalankan proses rekrutmen dan kaderisasi. Dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi, DPC PDI

Perjuangan mempunyai kantor sekretariat yang bertempat di Jalan Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kemudian, yang dimaksud dengan infrastruktur peradilan adalah badan musyawarah yang dibentuk untuk menentukan etis tidaknya proses rekrutmen dan kaderisasi tersebut, tujuannya adalah memantau apabila terdapat praktek-praktek rekrutmen yang bersifat KKN atau Oligarkis, serta rekrutmen yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dari pantauan peneliti, infrastruktur peradilan ini perlu untuk ada, dengan menugaskan kader-kader utama yang telah menempuh pendidikan tingkat DPP seperti KTU atau Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai, untuk kemudian berada di struktural DPC PDI Perjuangan agar program-program partai dapat direalisasikan dan informasi kepada DPP menjadi lebih cepat. Untuk program DPC PDI Perjuangan sampai tahun 2016 ini belum ada keberlanjutan, terutama untuk rekrutmen dan kaderisasi. Pasca Pemilukada Kabupaten Malang 2015, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang belum melaksanakan program-program partai, tapi hanya kerja-kerja struktural semata.

b) Kode Etik (*Code of Ethics*)

Pertama, pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan harus mencerminkan jatidiri dan watak organisasi. Kode etik kader PDI Perjuangan tertuang di dalam Pasal 5 Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan, yakni jatidiri partai adalah kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam ranah praksis, kode etik tersebut digunakan dalam dasar hukum perilaku kader. Di mana sanksi akan diberlakukan ketika kode etik tersebut dilanggar.

Sedangkan watak organisasi PDI Perjuangan adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner. Hal ini dapat disederhanakan dalam satu wadah, yakni pelayanan sebagai watak dasar partai, maka dari itu etika pelayanan adalah etika partai, pemimpin partai atau kader partai yang tidak kuat dan tangguh dalam etika pelayanan bukanlah pemimpin partai sejati. Hal ini menandakan bahwa masing-masing kader harus memiliki watak demikian. Tetapi praksis di lapangan menunjukkan bahwa rekrutmen dan kaderisasi belum menunjukkan tingkat progresif revolusioner tersebut, hal ini dilihat dari kurang terkoordinirnya massa dan tidak berjalannya agenda kaderisasi secara rutin, terutama pasca KTP di tahun 2012. Sejauh ini peneliti masih melihat belum ada pelayanan pengaduan masyarakat yang terstruktur di dalam DPC PDI Perjuangan, selain itu beberapa petinggi tidak memberikan klarifikasi terkait permohonan peneliti untuk meminta keterangan seputar tata kelola rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Penempatan kode etik partai dapat pula berupa pelaksanaan tanggungjawab dari setiap struktural. Seorang politikus tanpa lekatan dan hayatan nilai etis hanya akan membuat politik, tanpa berpolitik dan kepemimpinan politik. Dalam melaksanakan tanggungjawab strukturalnya, Wakil Bidang Kaderisasi dan Ideologi terlalu fokus pada aktifitas konsolidasi pada organisasi non-partai, yakni Paguyuban Nasionalis. Di mana organisasi tersebut juga dihuni oleh politikus partai lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hari Sasongko mengenai fenomena tersebut:

“Bidang Kaderisasi dan Ideologi sudah pernah disinggung tentang cara kerja yang lebih banyak mementingkan konsolidasi di lembaga non-partai,

seperti yang dilakukan beberapa kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang di Paguyuban Nasionalis Kabupaten Malang. Agenda tersebut lebih bersifat konsolidasi daripada upaya rekrutmen atau kaderisasi, selain itu disana juga terdapat anggota-anggota partai politik lainnya, seperti Partai Gerindra. Dan itu bukan agenda partai, karena melibatkan orang luar. Seharusnya bidang kaderisasi dan ideologi mulai melihat prospek pembangunan organisasi sayap partai yang sampai saat ini belum ada di Kabupaten Malang. Jika model infiltrasi tersebut terus menerus dilakukan tanpa memperdulikan internal partai dan kaderisasi partai, maka bisa saja hal itu merupakan pelanggaran kode etik atau tidak melaksanakan tanggungjawab struktural, atau bisa dikatakan tidak etis” (wawancara, 27 Juli 2016)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peneliti mendapat perlakuan yang tidak etis dari para petinggi partai karena tidak diberikan akses yang terbuka untuk menggali informasi secara langsung.

c) Etika Kerja (*Work Ethics*)

Dalam prinsip *work ethics*, kesadaran etis dan etos adalah dua sisi mata uang, karena manakala semakin kuat kesadaran etis, akan semakin kuat etosnya. Dikatakan produktif apabila partai politik telah memberikan sebuah produk kebijakan serta upaya membangun sistem kerja etis yang baik. Pada sesi KTM di tahun 2012 sudah dibentuk sebuah laporan *progress report* yang menerangkan tentang jalannya proses KTP oleh DPC PDI Perjuangan, bahkan laporan tersebut diminta oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDI Perjuangan Jawa Timur untuk dijadikan bahan kajian pelaksanaan KTM (Kaderisasi Tingkat Madya).

Hal ini disampaikan oleh Bapak Hari Sasongko sebagai berikut

“Dasar acuan pelaksanaan yang dipakai oleh DPC Kabupaten Malang dalam melaksanakan KTM ini memang murni inisiatif daripada rapat kerja DPC. Malahan tata *grand design* yang kami buat kemudian diminta oleh DPD untuk dijadikan acuan melaksanakan kaderisasi tingkat madya yang ditanggungjawabkan kepada DPD.” (wawancara, 28 Juli 2016)

KTM tersebut merupakan upaya penertiban anggota PAC yang mana di dalam KTM diberikan pembekalan teori untuk memperjelas ruang gerak dan membentuk etos kerja. Di samping itu, upaya kaderisasi juga merupakan agenda dalam memberi tanggungjawab tinggi kepada anggota PAC yang masih berstatus sebagai anggota, dengan kata lain, naiknya tingkat seorang anggota menjadi kader akan memberikan pembekalan mental kepada kader, jadi kinerjanya akan lebih konsisten serta loyal.

Hal ini dijelaskan Bapak Hari Sasongko sebagai berikut

“Kaderisasi yang dilakukan oleh kepengurusan saya di tahun 2012 memang khusus untuk mengkader anggota PAC, bidang organisasi tidak perlu melakukan rekrutmen karena anggota yang tersedia tetapi belum melaksanakan kaderisasi cukup besar, bahkan mayoritas PAC di Kabupaten Malang saat itu belum menjalani kaderisasi tingkat pratama atau kaderisasi di tingkat cabang (DPC). Jadi sifatnya kaderisasi tingkat pengurus. Karena ini merupakan upaya menertibkan anggota yang sudah terhimpun banyak tetapi belum terkaderisasi. Ini penting supaya ada penanaman mental yang jelas sebagai kader, tidak hanya sekedar ikut saja seperti simpatisan.”

Sejauh ini berbicara dampak dari pelaksanaan kaderisasi tersebut, justru yang peneliti rasakan dalam meninjau situasi kantor DPC pada saat penelitian memperlihatkan budaya kerja yang kurang produktif. Peneliti melihat seringkali kantor terlihat kosong dan hanya beberapa orang yang terlihat hanya duduk dan menonton televisi saja. Sedangkan di dalam AD/ART telah tersirat dan tersurat bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki prinsip produktif dengan cara bekerja gotong royong.

Pandangan peneliti juga tertuju pada perilaku kader yang seharusnya menjadi informan peneliti. Kebanyakan tidak mampu menjelaskan bagaimana tata kelola partai, serta pembahasan skripsi peneliti tentang rekrutmen dan kaderisasi.

Bahkan untuk buku-buku profil DPC saja tidak tersedia, padahal dalam susunan personalia di bidang kesekretariatan terdapat tiga orang jajaran. Hal ini sedikit memperlihatkan bagaimana proses kaderisasi yang pada tahun 2012 pernah dilaksanakan rupanya tidak ditangkap baik-baik oleh sebagian kader untuk menjadi budaya kerja partai. Di samping itu, pejabat struktural DPC juga hanya ada satu orang yang dapat diminta kesediaannya dalam memaparkan apa-apa yang menjadi fokus penelitian, ditambah dengan satu kader dari PAC. Terdapat empat orang pejabat struktural yang tidak memberikan klarifikasi terkait pola rekrutmen dan kaderisasi di DPC PDI Perjuangan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Marhaendra selaku informan pendukung

“Memang perlu diketahui bahwa partai politik saat ini hanya akan terlihat cara bekerjanya ketika pada momen pemilu saja atau pergantian pengurus. Yang menjadi masalah adalah membentuk tim kerja struktural tersebut masih saja merekrut kader-kader non-potensial yang cenderung bekerja seenaknya dan jauh dari kata tertib administrasi. Hanya ketika pimpinan pusat memberi instruksi saja baru mereka bekerja” (wawancara, 7 Agustus 2016)

4. Pandangan tentang Rekrutmen dan Kaderisasi PDI Perjuangan dan Isu-Isu Strategis

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan yaitu Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kepanjen Kabupaten Malang, dan informan pendukung yaitu Manajer Program Indopolling Network Jakarta. Kemudian dengan mengumpulkan data dan dokumen serta literatur, maka diperoleh informasi dan pembahasan sebagai berikut.

a. Pandangan Konsep Pola Rekrutmen dan Kaderisasi PDI Perjuangan

Rekrutmen di dalam sebuah partai politik sejatinya merupakan sebuah upaya dalam menjaring dan mendistribusikan SDM ke dalam organisasi partai, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga publik, dan lain sebagainya. Pola rekrutmen di dalam partai politik bentuk dan fungsinya beragam, seringkali terdapat penyebutan “rekrutmen politik” untuk mengartikan praktek perekrutan calon legislatif atau eksekutif oleh partai politik. Instrumen hukum yang digunakan pun beragam, mulai dari Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Partai, SK, hingga Instruksi Pimpinan. Tetapi di lain pihak praktek-praktek rekrutmen politik masih belum cukup untuk menjelaskan praktek substansial daripada cara kerja partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Salah satu dasar berdirinya sebuah partai adalah adanya ideologi, yaitu sebuah cara berpikir, paham, teori, dan tujuan yang merupakan cikal bakal daripada program politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Goodnow dalam Thoha (2014 : 77) yang mengejawantahkan fungsi pemerintahan menjadi dua jenis, yakni politik dan administrasi. Di mana, dalam menjalankan fungsi politik adalah membuat kebijakan, sedangkan administrasi adalah upaya untuk mencapainya. Dalam perspektif ini mengartikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan perlu ada suatu aktifitas politik untuk dapat membuat kebijakan yang akan menjadi sebuah program pembangunan negara atau daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah partai politik, sebagaimana diketahui bahwa partai politik telah menjadi bagian penting dalam mendistribusikan SDM yang akan menduduki

pemerintahan (eksekutif dan legislatif), yang dalam hal ini adalah pembuat kebijakan dan pengarah jalannya pelaksanaan kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa partai politik bukanlah institusi pengawas semata dan kerdil perannya di bidang pemerintahan.

Sebagai institusi, partai politik juga merupakan organisasi dengan multi disiplin sebagaimana dijelaskan oleh Heywood (2014 : 392) dalam klasifikasinya tentang partai politik. PDI Perjuangan dapat dikatakan sebagai partai dengan multi klasifikasi. Dengan aturan main pemilu langsung memaksa PDI Perjuangan untuk menjadi partai massa yang bertujuan untuk meraih simpati massa sebanyak-banyaknya untuk kepentingan politik. Namun di balik itu, ada disiplin partai yang menginginkan PDI Perjuangan untuk menjadi sebuah partai kader yang memiliki disiplin doktrin tinggi pada setiap anggotanya. Hal tersebut tentu merupakan hal yang berlawanan, di sisi lain PDI Perjuangan merupakan partai dari hasil fusi yang tetap akan mengundang perbedaan prinsip, juga kendala sistem pemilu langsung yang harus menempatkan jumlah suara pemilihan sebagai parameter keberhasilan utama.

Di sisi lain, keinginan PDI Perjuangan di semua jajaran (DPP, DPD, DPC, dst.) untuk menjadi partai yang proaktif juga terlihat kabur secara makna, karena pada kenyataannya seluruh partai politik bertipikal representatif, sebagaimana dijelaskan oleh Neumann (1956) di dalam Heywood (2014 : 394) tentang perbedaan partai representatif dengan integratif. Semua partai politik dewasa ini lebih banyak mengutamakan pembentukan opini publik untuk menjamin kekuatan konstituen. Banyaknya survey-survey elektabilitas politik kader-kader partai di

tengah masyarakat telah mengindikasikan bahwa partai seringkali menilai perspektif masyarakat sebagai representasi suara pemilihan, bukan sebagai suatu bentuk aspirasi publik.

Sebagai partai yang mengatasnamakan progresif revolusioner sebagai watak partai. Sudah sepantasnya PDI Perjuangan merupakan partai yang banyak menggagas tentang hal-hal reformis (reformasi). Tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan hanya ketika kader PDI Perjuangan memenangkan kursi legislatif atau eksekutif, sedangkan pada partai sendiri secara sepihak tidak menjadi pelopor sebuah agenda reformasi kecuali menjadi partisipan pemilihan umum (pemilu) yang dikatakan sebagai produk reformasi. Di sisi lain, kepentingan membangun watak progresif revolusioner juga mengadopsi mekanisme pengorganisasian model partai integratif yang banyak melakukan aksi-aksi proaktif dengan melakukan mobilisasi, menginspirasi masyarakat, daripada hanya merespon tuntutan-tuntutan.

Partai politik sebagaimana dijelaskan oleh Heywood (2014 : 398) yang memiliki enam fungsi, yakni “perwakilan, pembentukan dan rekrutmen elit, perumusan tujuan, artikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi dan mobilisasi, pengorganisasian pemerintahan”. Memang tidak semua fungsi dapat diberlakukan di Indonesia. Tetapi pada dasarnya semua fungsi partai memiliki satu mekanisme yang sama di dalam menentukan dasar daripada menjalankan roda partai, yakni rekrutmen. Konsep rekrutmen elit yang dianggap sebagai fungsi daripada partai politik oleh Heywood sejatinya benar, tetapi kurang tepat untuk meninjau beberapa perilaku partai yang mempunyai disiplin ideologi. Pada suatu sistem

negara multi-partai, partai politik yang mempunyai disiplin ideologi, mengenal istilah kaderisasi, yakni suatu proses pendidikan jangka panjang, serta peletakan identitas tertentu, dan bertanggungjawab atas kualitas kader. Di sisi lain, berbeda halnya dengan negara dengan sistem partai tunggal yang tidak mengenal istilah kaderisasi, tetapi lebih kepada pendidikan kader. Hal ini tentu berbeda, seperti yang dilakukan pada Partai Rusia Bersatu yang dipimpin oleh Vladimir Putin, di mana partai politik tersebut adalah partai nasional. Sehingga proses pendidikan dalam negeri merupakan pengejawantahan dari ideologi partai yang dituangkan ke dalam segala sistem. Berbeda dengan negara dengan sistem multi-partai seperti Indonesia, di mana proses pendidikan partai politik terpisah dari pendidikan formal negara serta sistem tata kelola negara. Perbedaan ini didasari oleh sikap netralitas negara dan birokrasi dari unsur ideologi politik tertentu. Di samping itu, pemberlakuan ideologi negara juga memaksa semua partai politik untuk membuat sistem pendidikan untuk anggotanya hanya dapat diselenggarakan di dalam internal, sedangkan untuk berkontribusi kepada negara harus menyesuaikan pandangan dengan konstitusi negara.

Di dalam praksis organisatoris, PDI Perjuangan memiliki dasar teori untuk bergerak di sektor rekrutmen dan kaderisasi dengan berlandaskan pada teori *machtsvorming* Bung Karno. Artinya, ambisi PDI Perjuangan memang adalah menguasai banyak sektor untuk membentuk suatu kekuatan. Tentu secara konsep tidak sama dengan prinsip Marxisme yang melakukan perombakan total (revolusi) di bidang ekonomi sampai birokrasi. *Machtsvorming* merupakan ide untuk membangun suatu kekuatan dari elemen-elemen dalam negeri untuk mengurangi

intervensi-intervensi pihak asing atau pihak non-konstitusional yang dapat memonopoli sistem. Ide tersebut memang pada dasarnya hidup di masa kolonialisme Belanda, ide tersebut digagas untuk menyatukan kaum-kaum amtenar (pegawai negeri) yang pernah disebut oleh Clifford Geertz sebagai kelas *priyayi* yang dibahas pada analisis tentang Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa yang termaktub di dalam Geertz (1989 : 305). Pada masa itu kaum-kaum amtenar memang dianggap adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas birokrasi dan dapat dimanfaatkan untuk menjegal kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak etis atau koersif.

Dewasa ini, prinsip tersebut memang telah sulit ditemukan, terlebih lagi selama 30 tahun rezim Orba telah melakukan desukarnoisasi (pelarangan ajaran-ajaran Bung Karno). Tetapi praktek daripada teori tersebut, walaupun tidak sama persis, dapat kemudian dilihat pada sistem pemerintahan Indonesia. Banyak sekali partai-partai politik telah melakukan perubahan-perubahan di dalam administrasi publik. Jika sebelumnya kepala daerah merupakan petugas mandataris (pejabat karir), kini kepala daerah dapat muncul dari basis partai, hal ini tentu merupakan kesempatan yang baik bagi partai politik untuk menerapkan prinsip teori *machtsvorming* tersebut. Memang pada dasarnya birokrasi tidak bisa dirubah coraknya menjadi milik partai, tetapi dengan kemampuan kepemimpinan kader yang baik, serta penerapan ideologi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan proaktif, maka dengan sendirinya loyalitas birokrasi dan masyarakat akan mengikuti cara kerja ideologis yang dibawa oleh kader partai di dalam lembaga-lembaga politik atau publik tersebut. Tetapi hal itu semua tidak bisa

dijalankan secara instan. Jauh sebelum dilakukannya infiltrasi tersebut, harus ada penjaringan dalam rangka mendistribusikan SDM yang baik, satu-satunya cara dalam upaya filterisasi tersebut adalah rekrutmen politik dan kaderisasi.

Sejauh peneliti menelisik literatur sekolah partai yang digagas oleh DPP PDI Perjuangan, terdapat banyak persoalan yang ditemukan dalam gagasan itu sendiri. Pertama, konsep sekolah partai otomatis membutuhkan infrastruktur berupa bangunan sekolah, kemudian adanya kurikulum serta gelar yang akan disematkan kepada lulusan sekolah partai. Kedua, sekolah partai masih bersifat terpusat di Ibukota Jakarta, sedangkan disana adalah perputaran arus politik yang banyak mengandung gesekan keras. Artinya, secara kondisi lokasi Ibukota tidak cukup kondusif untuk mengumpulkan kader dalam jumlah besar dan mengagendakan suatu aktifitas sekolah. Ketiga, masih belum tersedia gagasan untuk menindaklanjuti pola kaderisasi di tingkat daerah dan cabang. Hal ini dikarenakan dalam rentang waktu 2012 sampai dengan 2016, untuk wilayah Jawa Timur saja, baru terlaksana program kaderisasi di satu tempat, tepatnya agenda KTP (Kaderisasi Tingkat Pratama) di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Pandangan peneliti mengenai konsep rekrutmen dan kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang juga menghasilkan sebuah hasil pengamatan di mana proses rekrutmen dan kaderisasi lebih bersifat formalitas daripada substansial. Hal ini diperlihatkan dari proses rekrutmen pada anggota yang berasal dari anggota masyarakat umum, di mana agenda rekrutmen dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang benar secara mekanisme rekrutmen. Calon anggota PDI Perjuangan hanya cukup mendaftarkan diri kemudian dengan rapat internal sudah

dapat disahkan menjadi seorang anggota PDI Perjuangan, padahal hanya dengan melihat parameter administratif tidaklah cukup untuk menilai apakah seseorang dikatakan layak menjadi anggota partai. Hal ini tentunya berseberangan dengan anggapan bahwa PDI Perjuangan adalah partai kader yang memiliki mekanisme yang proporsional dalam menjaring anggotanya. Hal tersebut juga menandakan bahwa PDI Perjuangan, khususnya di Kabupaten Malang juga merupakan partai yang lebih memprioritaskan kuantitas anggota daripada kualitas anggota. Pola rekrutmen semacam itu lebih banyak diterapkan oleh partai massa, oleh sebab itu apabila memang PDI Perjuangan dikatakan sebagai partai kader yang juga partai massa, seharusnya ada suatu mekanisme pembinaan harus dilaksanakan agar tidak terjadi penumpukan SDM berkualitas rendah dan hanya bisa menjadi konstituen saja.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Herman Hidayat

“Berdasarkan mekanisme atau juklak, ada mekanisme yang mengamankan DPC untuk melakukan pembinaan kepada calon anggota baru. Tetapi itu baru dilaksanakan apabila memenuhi jumlah minimal. Maksudnya, jika jumlah anggota baru yang mendaftar berjumlah besar, maka akan dilakukan proses pembinaan. Sedangkan proses pembinaan tidak dilakukan apabila jumlah calon anggota terlampau sedikit karena membina calon anggota dalam kesatuan besar akan lebih efektif dan efisien, tetapi mendapatkan KTA sembari DPC menunggu jumlah pendaftar mencapai jumlah besar kemudian dilakukan pembinaan” (wawancara, 19 Agustus 2016)

Hal ini senada pula dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Hari Sasongko

“Rekrutmen dengan pembinaan hanya dilakukan pada saat rekrutmen politik, sedangkan untuk rekrutmen masyarakat umum hanya dilakukan dengan pola sederhana saja, yaitu dengan cara pengisian formulir yang disediakan oleh DPC. Setelah mengisi formulir tersebut maka calon anggota telah diterima menjadi anggota. Memang perbedaan pola rekrutmen tersebut merupakan sikap adaptif dari DPC untuk mensiasati pemilu, terkadang DPC tidak memiliki kader dengan kualitas akademik

yang mumpuni dalam jumlah besar, sehingga seringkali melakukan *lobbying* atau rekomendasi dari masyarakat non-partai tetapi memiliki sejumlah catatan akademik yang bagus” (wawancara, 19 Agustus 2016)

Sedangkan dalam perspektif anggota, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Supriadi

“Rekrutmen berjalan cukup mudah dengan hanya mendaftarkan diri ke kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Tetapi tidak ada agenda pembinaan kepada calon anggota baru. Beberapa orang anggota baru lebih banyak mengisi waktu dengan mengikuti kajian-kajian materi yang dilakukan oleh kader-kader atau petinggi DPC saja. Umumnya ada masa pembinaan kepada anggota baru hanya pada saat pemilihan legilatif, pembinaan tersebut hanya dilakukan pada calon legislatif saja” (wawancara, 19 Agustus 2016)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa proses rekrutmen di DPC PDI Perjuangan pada dasarnya memang terbagi menjadi dua jenis, yakni rekrutmen biasa (umum) dan rekrutmen politik. Di mana rekrutmen biasa lebih bersifat intens, sedangkan rekrutmen politik terjadi saat mendekati momen-momen politik seperti pemilu atau kampanye. Dari informasi yang dihimpun oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 13 orang anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang di DPRD Kabupaten Malang, terdapat 9 orang yang merupakan kader dan 4 orang merupakan anggota baru.

b. Isu-isu Strategis

Demokrasi telah dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai basis pengelolaan kepentingan dan hidup bersama di Republik Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia telah memilih untuk memposisikan partai politik sebagai institusi terpenting dalam aktivitas berpolitik dan bernegara. Dengan masa transisi di tahun 1998 yang melakukan penyempurnaan dalam hal karakteristik dan atribut-atribut pendukungnya. Hal yang sama terjadi pada partai politik, yang mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran karakteristik demokrasi dan

aturan-aturan pendukungnya. Kendati demikian, keluhan akan kinerja partai politik yang kurang baik di Indonesia masih kerap terdengar. Eksistensi partai politik bahkan kerap disebut sebagai bagian dari kelangsungan problem korupsi, satu dari sejumlah masalah besar bagi Indonesia dewasa ini. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Matei (2014 : 685) yang mengatakan bahwa harus dilakukan sebuah upaya pelaksanaan reformasi di bidang administrasi yang kemudian mempromosikan adanya poin-poin etika serta integritas di dalamnya.

Pergeseran dan penataan sistem politik demokrasi dalam waktu lebih 10 tahun terakhir, terutama dengan pengenalan pemilihan langsung untuk eksekutif dan penguatan sistem pemilu proporsional yang dimodifikasi. Peran penting partai politik bagaimanapun tidak terpisahkan dari demokrasi itu sendiri. Artinya, jika menerima demokrasi, maka serta merta juga harus menerima eksistensi partai politik. Memang kondisi telah menunjukkan keberadaan antara partai yang baik dan tidak baik, tetapi itu soal lain. Partai politik yang tidak baik dan praktek politik nasional yang tidak baik ini harus dicari cara untuk menanganinya. Menata sistem politik serta atribut-atributnya adalah cara yang selama ini ditempuh untuk memaksa partai politik menjadi baik dan relevan dengan kehendak publik.

Dalam rencana strategis DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, terdapat isu-isu strategis yang menjadi pokok kebijakan yang harus ditangani. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berhubungan langsung dengan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal, di mana isu-isu banyak mempengaruhi perjalanan organisasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua isu memiliki nilai strategis.

Secara normatif, proses pemilu, terutama pemilu legislatif yang menerapkan konsep proporsional tertutup, dipahami sebagai salah satu metode yang demokratis untuk menjalankan pemilu. Meningkatnya partisipasi aktor politik diasumsikan dapat menciptakan lapangan kerja, membawa tenaga ahli baru, serta lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu, meningkatnya partisipasi politik masyarakat juga diasumsikan dapat menciptakan pola pikir yang lebih objektif dalam memilih wakil-wakil rakyat.

Dalam pandangan Heywood (2014 : 392) yang mengatakan bahwa partai massa menekankan pada keanggotaan yang luas dan pengembangan basis pemilih yang luas. Hal ini senada dengan kondisi di mana banyak partai, salah satunya adalah PDI Perjuangan kemudian bergerak mengarah kepada praktek-praktek partai massa. Hal ini menyisakan sebuah problem bahwa saat ini sistem pemilu proporsional terbuka telah membawa masyarakat masuk ke dalam situasi psiko-politik “anti-partai” dan “anti-ideologi”. Partai politik harus bekerja dalam suatu masyarakat yang pragmatis, transaksional, dan berpikir instan untuk kepentingan individual jangka pendek. Partai politik juga harus bekerja dalam situasi di mana sebagian pihak menganggap bahwa menduduki jabatan publik melalui jalan partai adalah jalan baru bagi keamanan ekonomi. Sehingga muncul stigma bahwa partai bukan lagi menjadi alat ideologi atau alat perjuangan, tapi alat akumulasi ekonomi. Partai menjadi sarana transportasi cepat untuk keuntungan ekonomi individual, bukan lagi sarana untuk mewujudkan kepentingan rakyat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Hari Sasongko:

“Sistem pemilu dengan proporsional terbuka memang saat ini dipandang sebagai cara yang objektif dalam menyajikan proses politik kepada

masyarakat. akan tetapi harus diingat bahwa di sana peran partai akan semakin kerdil. Diterapkannya sistem *marketing* membuat partai politik dewasa ini lebih mirip korporasi pemilik saham (mahar politik). Dampak yang terjadi di internal partai kemudian terjadi transaksi jual beli kursi karena menang atau tidaknya seseorang dinilai dari bagaimana angka perolehan didapat oleh calon yang bersangkutan, jadi musyawarah di internal partai semakin minim dan esensi musyawarah untuk mufakat semakin dikedirikan.” (wawancara 28 Juli 2016).

Berbeda dengan pemilu di tahun 1955 yang dianggap paling demokratis, di mana sistem yang diberlakukan adalah model proporsional tertutup, partai politik mendaftarkan diri sebagai partisipan pemilu dan dipilih oleh masyarakat dengan hanya mencantumkan partai di dalam lembar pencoblosan. Hal ini dikarenakan jumlah perolehan partai akan diserahkan kepada partai untuk kemudian di pilih siapa-siapa kader yang akan menduduki kursi pemerintahan, terutama pada sektor legislatif.

Hal ini dijelaskan secara kontekstual oleh Bapak Hari Sasongko

“Dengan teknis pemilu proporsional tertutup akan menekan partai supaya menampakkan jati dirinya secara ideologis dan progresif dalam melakukan komunikasi politik, selain itu teknis proporsional tertutup akan memberikan kesempatan partai politik melakukan proses kaderisasi dan rekrutmen yang jelas dan objektif terhadap kader-kadernya. Sepintas memang seperti menutup politik dengan tirai di mata masyarakat, tetapi hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena partai yang punya integritas akan objektif. Selama ini publik menganggap partai politik tidak objektif dalam mencalonkan individu-individu tertentu akibat dari kurangnya pengetahuan tentang aturan main dalam pemilu. Dengan proporsional terbuka, kebanyakan partai memanfaatkan itu untuk menjual figur artis atau tokoh masyarakat daripada program atau ideologi. Hal ini karena figur-figur terkenal lebih menjanjikan dalam menyerap suara dalam pemilu, hal itu menjadi tujuan utamanya.” (wawancara, 28 Juli 2016)

Isu strategis yang sedang berkembang saat ini adalah tentang RUU Pemilu Legislatif yang sedang digodok oleh DPR RI, di mana terdapat tiga fraksi partai politik di legislatif RI, yakni PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

dan Golkar sedang mengupayakan untuk kembali diberlakukannya sistem pemilu legislatif dengan model proporsional tertutup. Tetapi memang pada akhirnya keputusan sidang RUU Pemilu Legislatif tersebut harus menunggu kesepakatan dari fraksi-fraksi yang lainnya.

Hal ini pun dijelaskan oleh Bapak Hari Sasongko

“Partai politik dengan basis kader yang kuat seperti PDI Perjuangan, PKS dan Golkar saat ini cenderung menginginkan sistem proporsional tertutup. Hal tersebut berlawanan dengan partai politik lain yang tidak memiliki agenda kaderisasi atau pendidikan kader secara intensif dan ideologis, yang umumnya membuka *open recruitment* pada momen-momen menjelang pemilu dilaksanakan. Dengan ini maka esensi musyawarah akan dijunjung tinggi untuk mencapai mufakat, tidak sepenuhnya menyerahkan hasil pada angka perolehan semata. Karena masyarakat harus mengetahui hak partai politik sebagai organisasi untuk mengambil keputusan lewat musyawarah” (wawancara, 28 Juli 2016)

Isu tersebut berhubungan dengan mekanisme rekrutmen politik dan proses kaderisasi atau pendidikan kader di semua partai politik di Indonesia. Sebagai organisasi yang mendistribusikan SDM ke sistem pemerintahan sebagai *policy maker* (pembuat kebijakan). Sistem pemilu dengan mekanisme proporsional tertutup akan membuat masyarakat beralih pada objektifitas partai politik, bukan lagi perseorangan.

Hal ini di jelaskan oleh Marhaendra selaku informan pendukung sebagai berikut

“Mekanisme proporsional tertutup adalah di mana masyarakat memilih partai politik pada saat mencoblos di TPS, kemudian dilakukan rekapitulasi oleh KPU untuk kemudian diumumkan berapa perolehan dari masing-masing partai. Letak tertutupnya dilihat dari pendistribusian hasil perolehan tersebut kepada partai untuk kemudian dieksekusi secara internal oleh partai. Sehingga anggota legislatif yang muncul adalah hasil dari kesepakatan internal partai, bukan pada perolehan perseorangan” (wawancara, 7 Agustus 2016)

Sementara itu, mekanisme proporsional tertutup dinilai lebih efektif untuk menekan politik citra dan praktek kanibalisme di dalam partai politik yang sedang ramai dikritik oleh publik. Marhaendra juga menjelaskan sebagai berikut

“Tidak banyak publik mengetahui bahwa ada praktek kanibal di dalam partai politik pada saat penentuan hasil pemilu dengan proporsional terbuka. Seringkali terjadi perolehan perseorangan dari calon terlalu membengkak dan ada praktek untuk mengambil suara perolehan calon lain yang tidak lolos untuk kemudian di klaim menjadi perolehannya” (wawancara, 7 Agustus 2016)

Ketika ditanya mengenai pola rekrutmen dan kaderisasi di partai politik, khususnya pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Marhaendra sebagai informan pendukung memiliki pandangan bahwa secara umum partai politik memiliki mekanisme yang relatif sama dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi

“Partai politik saat ini banyak kehilangan waktu untuk mendidik SDM yang berkualitas. Karena untuk saat ini kebutuhan paling mendesak dari partai politik adalah menang pemilu, sedangkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak adalah bantuan ekonomi atau pekerjaan untuk penghasilan. Keduanya akan sulit bertemu, terutama jika partai politik memang punya rencana untuk merekrut dan mengkader masyarakat untuk dicetak menjadi SDM yang ideologis. Namun pada kenyataannya partai politik jauh lebih pragmatis, rekrutmen mayoritas ditujukan untuk merekrut kader non-potensial, tapi lihai dalam memanfaatkan anggaran yang disediakan negara, seperti dana Jamsas atau Reses” (wawancara, 7 Agustus 2016)

Rekrutmen dewasa ini berjalan relatif sama di semua partai, termasuk pada PDI Perjuangan. Di mana partai melakukan rekrutmen rutin untuk anggota-anggota dari masyarakat kelas bawah, yang bertujuan memperkuat basis konstituen, bukan pada pengakaran ideologi di tingkat akar rumput (*grass root*). Sedangkan di momen-momen politik, partai lebih banyak melakukan rekrutmen SDM yang tidak potensial secara ideologi, tapi potensial dalam hal mencari suara.

Hal ini memberikan pandangan bahwa pragmatisme sangat kental terjadi pada partai politik

Hal ini dijelaskan oleh Marhaendra, sebagai berikut

“Kita sama-sama mengetahui bahwa agenda pendidikan kader, kaderisasi, atau sekolah partai adalah agenda yang menguras banyak waktu, tenaga dan biaya. Sementara praktek di lapangan selalu kalah dalam *marketing politic* serta minim *output* akibat kebijakan yang harus berkompromi dengan partai lain. Misalnya, PDI Perjuangan terutama di Kabupaten Malang, untuk anggota biasa saja rata-rata bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan sektor-sektor kecil saja. Jika harus memilih antara partai atau pekerjaan, mereka akan lebih memilih pekerjaan, karena uang lebih mendesak. Mungkin hanya kalangan tertentu yang sanggup mengikuti agenda-agenda partai” (wawancara, 7 Agustus 2016)

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas dan efisiensi daripada rekrutmen dan kaderisasi, terutama pada sisi kaderisasi. Hal ini membenarkan asumsi sebelumnya yang diutarakan oleh kedua informan utama tentang pemaknaan dari agenda rekrutmen dan kaderisasi pada tingkat praksisnya.

Hal ini tertuang dalam asumsi Bapak Hari Sasongko, yakni

“Kaderisasi adalah syarat wajib seorang anggota untuk bisa dikatakan sebagai kader. Namun memang kondisi setiap daerah berbeda-beda, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang yang sudah melakukan kaderisasi di tahun 2012 masih menyisakan pekerjaan rumah. Yakni merekrut SDM dari kalangan akademisi yang paham betul akan seluk beluk partai politik secara teori. Kaderisasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2012 hanya ditujukan pada PAC (Pengurus Anak Cabang) agar dapat memenuhi syarat sebagai kader” (wawancara, 28 Juli 2016)

Sedangkan Bapak Herman Hidayat menyatakan sebagai berikut

“Saat ini memang pola rekrutmen dan kaderisasi belum sempurna, masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah lemahnya relasi dengan dunia akademisi. Hanya sedikit dari kader PDI Kabupaten Malang yang memiliki latar belakang seorang akademisi. Hal itu akan mempersulit manuver partai untuk lebih mendekat dalam bergerak, karena strategi gerilya yang dilakukan di tingkat akar rumput (*grass root*) ini lemah secara koordinasi, dan caranya bisa dikatakan

adalah ciri khas masyarakat biasa (cara *wong ndeso*)” (wawancara, 12 Juli 2016)

Mengenai keberadaan organisasi sayap PDI Perjuangan, seperti BMI (Banteng Muda Indonesia), Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia), dan Taruna Merah Putih (TMP). Kedua informan mengatakan bahwa di Kabupaten Malang keberadaan organisasi sayap masih belum ada. Hal ini juga yang membuat DPC PDI Perjuangan hanya bisa menginstruksikan kepada struktural di bawahnya untuk melakukan rekrutmen pada warga sekitar. Namun tidak cukup efektif dalam mendapatkan calon anggota potensial, kebanyakan adalah anggota penggerak yang lebih cocok menjadi penguat konstituen (pemilih dalam pemilu).

Ditanya mengenai pentingnya organisasi sayap, Bapak Hari Sasongko memberikan pernyataan bahwa DPC PDI Perjuangan memang membutuhkan sayap untuk memperkuat basis pemuda (BMI), masyarakat muslim (Bamusi), serta kelompok karya (TMP) untuk membentuk suatu front yang akan mempermudah ruang gerak program-program partai untuk masuk kepada masyarakat, tidak hanya sekedar urusan pemilu.

“Dengan adanya organisasi sayap sebenarnya partai akan lebih mudah dalam mengelompokkan basis dan membinanya. Karena dengan melimpahkan semua basis kepada DPC akan menambah beban dan cenderung akan tidak dikerjakan. Selain itu, organisasi sayap juga akan menjadi filter pertama dalam rekrutmen politik. Misalnya, seorang kader PDI Perjuangan yang bekerja di struktural BMI pasti memiliki kemampuan mengorganisasi kelompok pemuda dan program-program kepemudaan. Dengan kompetensi ini, partai akan mudah mempromosikan kader tersebut untuk menjadi Menteri Kepemudaan dan Olahraga atau juga menjadi Anggota Legislatif yang bekerja di sektor kepemudaan, dan jabatan-jabatan publik lainnya” (wawancara 28 Juli 2016)

Hal tersebut disepakati oleh Marhaendra, di mana ketika proses rekrutmen dan kaderisasi partai, salah satunya PDI Perjuangan, dapat berjalan dengan baik

dan militan, sudah tentu akan menjadi kekuatan besar yang mampu memobilisasi masyarakat menuju cita-cita negara, yaitu kesejahteraan sosial.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Marhaendra, yakni

“kita perlu melihat kebelakang bagaimana partai politik di dekade 1950an banyak sekali memiliki organisasi sayap maupun organisasi afiliasi. Sebut saja GmNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), Pemuda Marhaenis, dll yang merupakan organisasi afiliasi atau juga sayap dari PNI (Partai Nasional Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang merupakan organisasi afiliasi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Ada pula Pemuda Rakyat, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), CGMI (*Concentrate* Gerakan Mahasiswa Indonesia), dll. yang merupakan *underbow* atau organisasi sayap dari PKI (Partai Komunis Indonesia). Organisasi-organisasi tersebut banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh nasional yang banyak terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan saat ini masyarakat sangat skeptis dengan organisasi tersebut, padahal organisasi-organisasi tersebut adalah pintu awal diperkenalkannya konsep pembangunan sosial yang dahulu bisa membuat Indonesia mengusir kolonialisme” (wawancara, 7 Agustus 2016)

Berkaitan dengan era modern, tipe kolonialisme telah berubah menjadi kapitalisme global, di mana negara telah berkurang fungsinya dengan berlakunya mekanisme pasar yang mengadopsi sistem-sistem atau *mindset* ekonomi sebagai basis pembangunan di segala lini. Hal ini tentu menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Di mana pembangunan masyarakat yang dipilih oleh PDI Perjuangan adalah konsep pembangunan berorientasi sosial, yakni TRISAKTI, di mana salah satu penggalan isi di dalamnya menyebutkan tentang “berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Hari Sasongko

“Sejauh ini kita perlu melaksanakan konsep TRISAKTI itu ke dalam internal partai. Salah satu aspek penting adalah tentang ekonomi berdikari. Dengan ekonomi berdikari kita mampu melaksanakan semua kegiatan

dengan modal sendiri, tanpa harus bergantung pada sumbangan kader. Pola ekonomi berdikari di dalam partai perlu kiranya ditinjau dari berdirinya BUN (Bank Umum Nasional) milik PNI di masa lalu, di mana aktifitas partai akan dibiayai lewat BUN, sedangkan BUN bertugas memutar uang menjadi usaha untuk menghidupi partai. Tetapi pasca runtuhnya Orde Lama, BUN tersebut mengalami likuidasi dan bangkrut, sehingga keberadaannya tidak lagi ada, bahkan tidak pernah dibangun kembali” (wawancara 27 Juli 2016)

Kesimpulannya, iklim politik partai di Kabupaten Malang relatif stabil dan kondusif di tingkat masyarakat. Namun untuk kondisi internal partai politik sendiri, khususnya yang berhubungan dengan administrasi partai tidak bisa dikatakan baik. Terhitung di tahun pertama kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang masa bakti 2015-2020 masih belum dilaksanakan rekrutmen dan kaderisasi baru semenjak tahun 2012. Macetnya kaderisasi secara rutin selalu terhalang masalah anggaran, serta tidak tertibnya administrasi, yang sama sekali bertolak belakang dengan status “partai kader sekaligus partai massa” yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dampak yang mungkin terlihat jelas adalah banyaknya Pejabat Politik atau Pejabat Publik yang tidak dapat menjalankan program partai atau ideologi partai, namun karena keterbatasan SDM, maka rekrutmen politik dijalankan dengan meninjau sisi pragmatis.

Infiltrasi adanya penekanan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai kader sekaligus partai massa memunculkan isu kesenjangan yang muncul di antara kader juga memunculkan pandangan negatif tentang pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Sebagaimana dijelaskan oleh Heywood (2014 : 392) yang mengatakan bahwa partai kader merupakan partai dengan SDM yang profesional dan militan, sedangkan partai massa lebih menekankan kepada partisipasi tanpa adanya

keterikatan terhadap kesepakatan prinsip dan tujuan seperti ideologi. Hal ini paling terasa ketika muncul kebingungan bahwa rekrutmen politik telah membuat pemisah antara kader dengan anggota baru yang potensial. Di mana dalam hal ini seorang kader masih belum bisa dikatakan pasti memiliki kesempatan untuk direkomendasikan oleh pimpinan partai di tingkat daerah atau DPC. Di sisi lain, proses penilaian militansi kader dan anggota memiliki indikator yang abstrak, yakni tergantung instruksi pimpinan tertinggi. Sistem penerimaan calon dari kalangan non-partai hampir menutup kesempatan kader-kader lama untuk mendapatkan rekomendasi. Gesekan paling terasa adalah ketika pimpinan DPC kemudian merekomendasikan calon non-partai untuk kemudian dijadikan anggota eksekutif atau Kepala Daerah.

Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Supriadi

“Kebanyakan anggota biasa tidak mempunyai daya saing yang seimbang dengan kader-kader lainnya. Terlebih lagi jika harus bersaing untuk mendapatkan rekomendasi dari DPC melawan calon-calon legislatif dari kalangan non-partai (belum anggota) yang kadang derajat akademisnya sangat tinggi. Contohnya, ketika seorang kader dengan riwayat pendidikan sarjana S-1 dan dia merupakan kader aktif dan sudah menjalani kaderisasi, kemudian harus bertarung mendapatkan rekomendasi melawan calon non-partai yang berpendidikan S-2 dan punya kedekatan dengan petinggi. Tentu ini membuat proses rekrutmen politik menjadi tidak pasti untuk kalangan kader. Bahkan itu akan melahirkan suatu persepsi bahwa menjadi anggota partai dan mengikuti kaderisasi tidak akan berguna, lebih baik meniti karier di luar partai dan memanfaatkan partai hanya untuk kendaraan saja ketika ingin menjadi Kepala Daerah atau Anggota Legislatif. Hal itu menjadi bahan pembicaraan karena PDI Perjuangan ini memiliki anggota yang banyak, tapi masih saja ada ruang untuk kalangan non-partai untuk mendapat rekomendasi dalam rekrutmen” (wawancara, 19 Agustus 2016)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang masih menyisakan

kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras. Tetapi, hal itu menandakan bahwa proses kaderisasi juga mengalami kemacetan sehingga partai masih memberikan ruang terhadap kalangan non-partai untuk berpartisipasi dalam agenda politik. Bisa dikatakan partai juga mulai menyadari bahwa kualitas kader yang dibina dengan metode kaderisasi di setiap tingkat juga belum mampu secara kompetitif bersaing dengan kalangan lulusan akademisi non-politik.

Proses kaderisasi memang tidaklah mudah dilaksanakan dengan model akademisi seperti Universitas atau Sekolah pada umumnya. Tetapi gagasan Sekolah Partai dari DPP PDI Perjuangan patut menjadi orientasi bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang maupun DPC-DPC PDI Perjuangan lain di seluruh Indonesia untuk mendistribusikan kader-kader potensialnya untuk dididik secara intensif di dalam Sekolah Partai. Dengan mempertemukan tradisi keilmuan dan tradisi kepartaian di dalam Sekolah Partai, kemudian akan mencetak kader-kader yang siap menjadi pemimpin di dalam struktural partai, lembaga politik, maupun lembaga publik.

Isu strategis mengenai upaya pengesahan RUU Pemilu Legislatif 2019 yang akan menerapkan model pemilu proporsional tertutup hendaknya menjadi tantangan bagi PDI Perjuangan, khususnya DPC PDI Perjuangan. Untuk turut serta meningkatkan kualitas pola rekrutmen dan kaderisasi dengan lebih baik lagi. Khususnya ada pada kaderisasi yang akan memberikan dasar-dasar ilmu dan teori kepada kader, sekaligus upaya evaluasi terhadap kelayakan seorang kader. Dengan diterapkannya pemilu proporsional tertutup, maka partai politik akan

lebih sehat dalam bersaing di dalam internal partai, serta menghindarkan konflik internal partai dari publik. Hal ini disebabkan konflik politik masih dipahami secara awam oleh publik kebanyakan, hanya kalangan-kalangan tertentu yang lebih memahami.

Hal ini menandakan bahwa kaderisasi merupakan kunci daripada kepentingan rekrutmen partai politik di masa depan. Khususnya untuk DPC PDI Perjuangan yang memiliki daya serap tinggi terhadap anggota, yakni sejumlah 3.964 orang, dengan 13 orang menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Malang, 1 orang menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan kebutuhan di masa mendatang, DPC PDI Perjuangan seharusnya mulai merancang kembali dan mengembangkan pola rekrutmen dan kaderisasi yang lebih mumpuni dan mampu melahirkan kader-kader baru yang ideologis, progresif revolusioner, dan etis.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan yang telah dilakukan. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak terkait di dalamnya untuk lebih memahami pentingnya membangun pola rekrutmen dan kaderisasi dengan penempatan etika di dalam tata kelolanya Kesimpulan berisi tentang beberapa poin yang merupakan inti dari pembahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi mengenai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pola rekrutmen dan kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pendekatan *Good Administration and Performances* (Studi pada Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang) yang telah dipaparkan di depan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat poin pasal pada AD dan ART yang tidak sesuai dengan visi PDI Perjuangan sebagai partai kader, yakni pada pasal 9 yang menjelaskan bahwa partai melakukan rekrutmen anggota untuk ditugaskan dalam struktural partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga publik. Hal ini kemudian dapat memberi kesan bahwa proses kaderisasi tidak

perlu dilaksanakan jika seorang individu memiliki tujuan untuk menduduki struktural partai maupun lembaga-lembaga politik atau publik, hal ini menimbulkan kesenjangan bagi para kader yang telah menempuh proses kaderisasi yang panjang.

2. Kesimpulan hasil analisis pola rekrutmen dan kaderisasi pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis rekrutmen, yakni rekrutmen biasa (umum) dan rekrutmen politik. Masing-masing tipe rekrutmen tersebut dilandasi atas kebutuhan DPC PDI Perjuangan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas. Sedangkan dalam analisis tentang konsep kaderisasi dan pendidikan Sekolah Partai, PDI Perjuangan telah memberikan gagasan yang baik dalam mempertemukan antara tradisi keilmuan dengan tradisi kepartaian untuk mencetak kader dan pemimpin bangsa. Kesimpulan analisis akhir adalah, ditinjau dengan prinsip *good administration and performances* (GAP), sejauh ini pola kaderisasi secara konseptual tidak memenuhi kualifikasi setelah dibandingkan dengan GAP. Pola rekrutmen dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang belum dikatakan etis, baik secara pelaksanaan maupun representasi progress yang diberikan.
3. Realisasi rekrutmen dan kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang disimpulkan bahwa dalam prosedur rekrutmen calon anggota terlebih dahulu ke Kantor DPC untuk memberikan pernyataan untuk bergabung di PDI Perjuangan. Kemudian calon anggota diarahkan untuk

menjalani prosedur administrasi berupa KTA nisasi (Kartu Tanda Anggota) untuk mengajukan permohonan izin bergabung menjadi anggota. Dari pihak kesekretariatan permohonan diproses untuk dilakukan pembukuan serta pembuatan KTA. Rekrutmen PDI Perjuangan Kabupaten Malang (DPC, Ranting, dst.) tidak bisa dikatakan stabil, sebab dalam perjalanannya cenderung tidak menentu. Pada beberapa tahun jumlah partisipan politik PDI Perjuangan Kabupaten Malang sangat tinggi, dilihat dari jumlah pemilih pada pemilu legislatif. Namun dari segi perekrutan menjadi kader dan proses kaderisasi banyak terjadi kemacetan akibat tidak terlaksananya agenda kaderisasi.

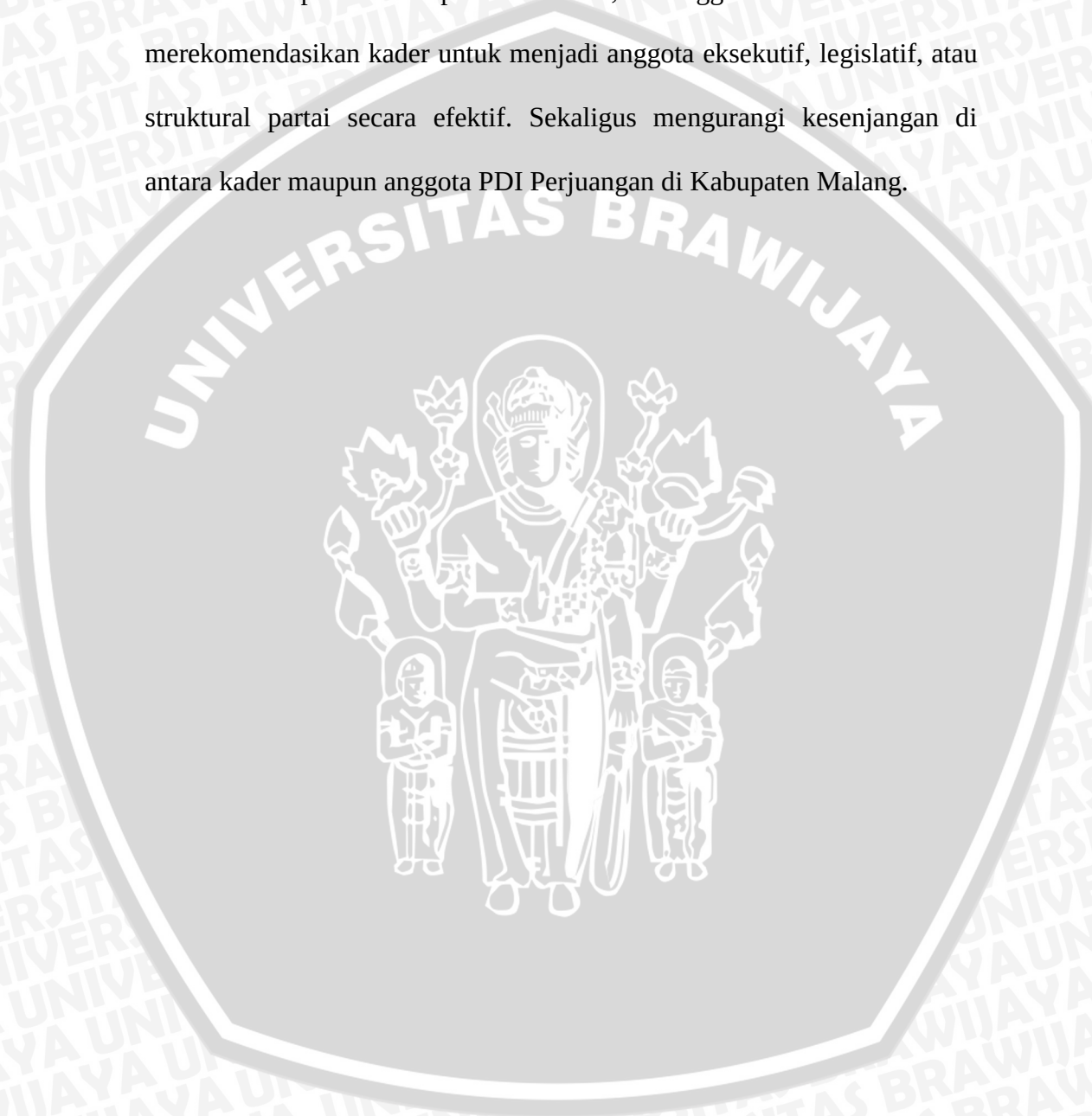
4. Disimpulkan bahwa rekrutmen dan kaderisasi memiliki keterkaitan dengan kehidupan politik PDI Perjuangan. Diketahui berdasarkan pandangan-pandangan informan yang menjadi kunci informasi penelitian. Daya serap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang untuk merekrut anggota baru sangat besar, tetapi praksis secara organisasi dan tertib administrasi masih banyak tertinggal. Selain itu, dalam pembahasan mengenai isu-isu strategis dapat disimpulkan bahwa upaya kaderisasi menjadi hal yang substansial di masa mendatang. Dengan rencana pemilu legislatif dengan model proporsional tertutup akan kembali menjadi ajang perbaikan partai untuk merekrut kader-kader potensial dan memiliki intelektualitas tinggi, serta melakukan kaderisasi secara intensif. Keberadaan mekanisme *marketing politic* yang sarat akan politik uang dan politik citra akan lebih mudah dihindari.

B. Saran

Berdasarkan fenomena-fenomena yang berhasil diungkapkan oleh peneliti berkaitan dengan masalah rekrutmen dan kaderisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Malang, maka peneliti mencoba menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu perubahan poin pada AD dan ART Pasal 9 tentang fungsi partai agar status anggota dihilangkan, sehingga hanya anggota yang telah menjadi kader partai melalui proses kaderisasi yang dapat ditugaskan ke dalam struktural partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga publik. Hal ini disarankan agar proses kaderisasi sebagai pendidikan kader dapat berjalan, karena disiplin partai perlu dipahami dan dijalankan oleh setiap kader. Dengan proses kaderisasi anggota akan menjadi kader yang memahami jati diri dan watak partai serta mampu mengimplementasikan ideologi dalam tugas kerjanya di dalam struktural partai, lembaga politik, maupun lembaga publik.
2. Agar partai dapat diminati masyarakat di Kabupaten Malang, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang sebaiknya mengembangkan organisasi sayap partai yang sudah ada agar mampu menjaring potensi-potensi masyarakat di daerah. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang harus meningkatkan promosi potensi organisasi sayap partai di Kabupaten Malang, seperti BMI, Bamusi, atau TMP. Selain itu DPC PDI Perjuangan juga dapat memanfaatkan organisasi sayap tersebut untuk memudahkan proses rekrutmen yang berbasis keahlian yang sudah dibina dalam organisasi sayap partai.

3. Pemerataan pendidikan politik harus terus dikembangkan oleh DPC PDI Perjuangan, dengan melaksanakan pendidikan berupa kaderisasi, maka kualitas setiap kader dapat sama rata, sehingga memudahkan DPC merekomendasikan kader untuk menjadi anggota eksekutif, legislatif, atau struktural partai secara efektif. Sekaligus mengurangi kesenjangan di antara kader maupun anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Malang.



DAFTAR PUSTAKA

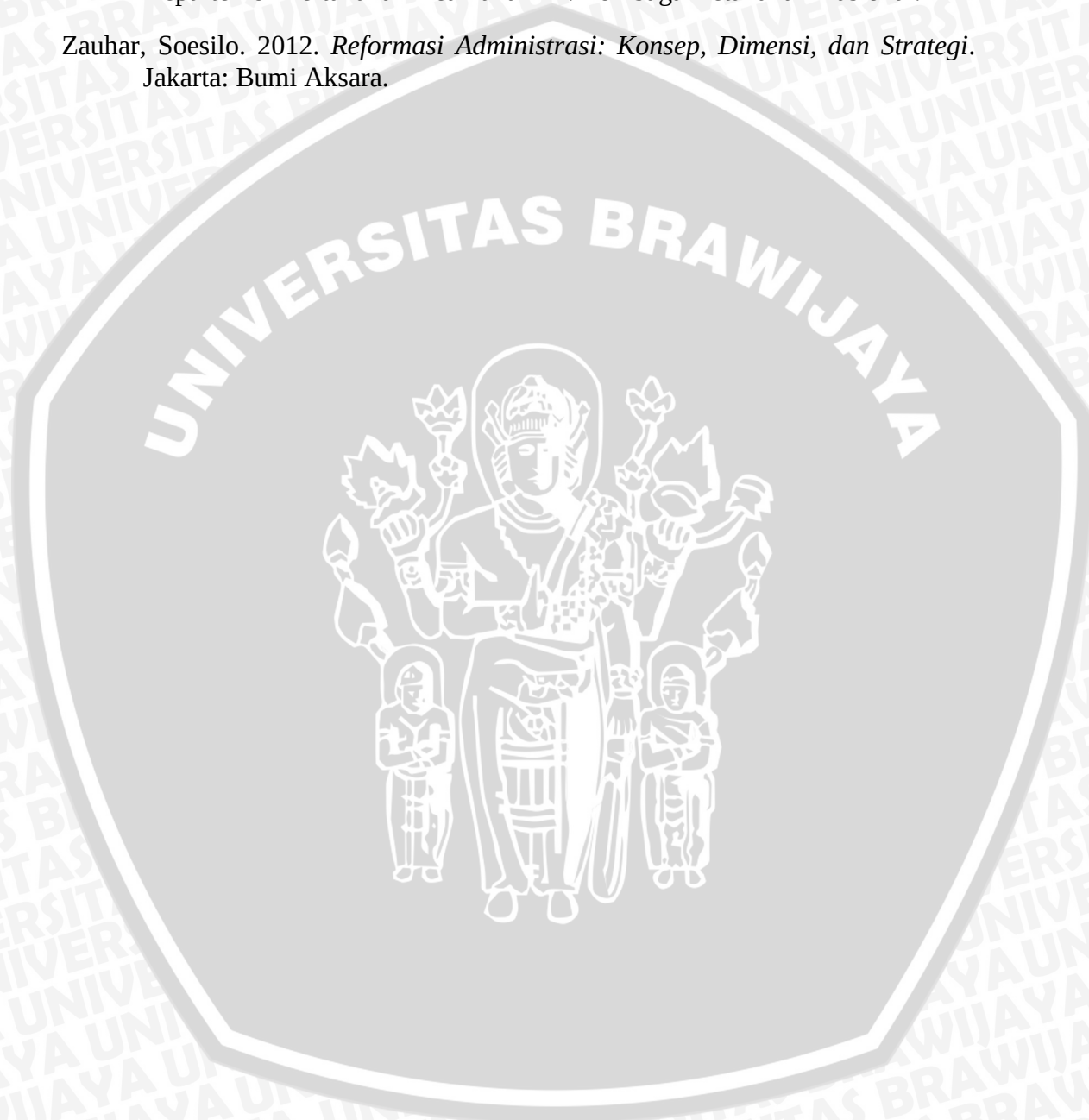
- Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. 1996. *The Politics of Developing Areas*. News Jersey: Princeton University Press.
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2015-2020
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Caiden, Gerald. 1969. *Administrative Reform*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Downs, Anthony. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gallagher, Michael. 2001. *The Secret Garden of Politics*. Beverly Hill and London.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. 1960. The Free Press of Glencoe. Mahasin (penterjemah). 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Edisi Ketiga 3. PT Dunia Pustaka Jaya.
- Giddens, A. 1994. *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Horizon, Liza. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 27.23-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang (online) melalui <http://kpud-malangkab.go.id/> Diakses pada 1 Juli 2016
- Krouwel, Andre. 2006. *Party Model, Handbook of Party Politics*. Los Angeles: Sage Publications.

- Lasswell, Harold. 1936. *Politics: Who Gets What, When, How?*. New York: McGraw-Hill.
- Mainwaring, Scott and Edurne Zoco. 2007. *Political Sequences and the Stabilization of Inter Party Competition: Electoral Volatility in Old and new Democracies*. Jurnal Politik Vol. 13 No. 2 2007.
- Matei, Ani and Razvan Baiesiu. *Good Administration and Performance of Local Public Administration* (Online) melalui <http://www.sciencedirect.com/> diakses pada 26 Juli 2016
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Teori dan Praktek Partai Politik Indonesia*. Institute For Democracy and Welfarism.
- PDI Perjuangan (Online) melalui <http://www.pdiperjuangan.id/> Diakses pada 1 Juli 2016
- Pippa, Norris. 2006. *Political Recruitment*. Cambridge: Cambridge UP.
- Qodir, Abdul. 2014. *Hasil Pemilu Legislatif 2014: PDIP Menang* (Online) melalui <http://www.tribunnews.com/>, diakses pada 1 Juli 2016
- Reuven, Hazan. 2001. *Candidate Selection Methods*. London: Sage Publication.
- Rusadi, Kantaprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Rush, Michael and Philip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, dalam Kartini Kartono (ed). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samawi, H.M. Idham. 2012. *Sekolah Partai, Dasar-dasar Pendirian dan Persiapannya*. Jakarta: DPP PDI Perjuangan.
- Sevilla, Conseulo et, Al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S., ed. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel N. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Utoyo, Indra Bambang. 1994. *Sistem Kaderisasi Kepemimpinan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Masa Mendatang*. Departemen Pertahanan Keamanan RI: Lembaga Ketahanan Nasional.

Zauhar, Soesilo. 2012. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG-65119

SURAT KETERANGANNOMOR : 072/ *Cag* /35.07.205/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fak. Ilmu Administrasi UB Malang Nomor : 9006/UN10.3/PG/2016 Tanggal
14 Juni 2016 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Penelitian oleh :

Nama / Instansi : Ahmad Nizar Hilmi/ Mhs. FIA UB Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang
Thema/Judul/Survey/Research : Analisis pola rekrutmen dan kaderisasi partai demokrasi
Indonesia perjuangan (PDIP) dalam pendekatan good
administration performance
Daerah/tempat kegiatan : Kantor DPC PDIP Kab. Malang

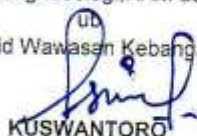
Lamanya : 1 Bulan
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 27 Juni 2016
An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kasubid Wawasan Kebangsaan


KUSWANTORO

Penata

NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :
Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi UB Malang
2. Sdr. Ketua DPC PDIP Kab. Malang
3. Sdr. Mhs/ Ybs
4. Arsip

Lampiran 2 Tanda Terima Surat Riset di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang



TANDA TERIMA

Hari/Tanggal	: Rabu 29 Juni 2016
Yang Menyerahkan	: Ahmad Nizar Hilmi (Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang)
Jenis Berkas	: 1. Proposal Riset Skripsi 2. Surat Kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang
Penerima	: MASKUD



Tanda tangan
Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Malang



MASKUD

Tanda tangan



AHMAD NIZAR HILMI

